

Sudirman

PERANAN MEDIA MASSA PADA MASA PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN RI DI ACEH 1945-1949



**Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh**

**Peranan Media Massa pada Masa Perjuangan Mempertahankan
Kemerdekaan RI di Aceh 1945—1949**

**Penulis
Sudirman**

**Editor
Prof. Dr. Misri A. Muchsin**

**Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh
Jln. Twk. Hasyim Banta Muda 17, Banda Aceh
Tlp. 0651 23226**

Hak Cipta 2012, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa izin dari penulis

Cetakan Pertama, 2012

Penulis

Sudirman

Editor

Prof. Dr. Misri A. Muchsin

Peranan Media Massa pada Masa Perjuangan Mempertahankan
Kemerdekaan RI di Aceh 1945--1949

ISBN 978-602-9457-03-2

Hak Penerbitan pada BPSNT Banda Aceh

Setting/Layout

Sudirman

Desain Cover

Lizar Andrian

Penerbit

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Jln. Twk. Hasyim Banta Muda 17, Banda Aceh

Tlp. 0651 23226

KATA SAMBUTAN

Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Aceh merupakan daerah modal perjuangan bangsa Indonesia. Satu di antara modal perjuangan tersebut adalah peranan media massa. Media massa di Aceh begitu besar peranannya, terutama pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, buku ini diterbitkan untuk mensosialisasikan nilai-nilai kesejarahan, terutama yang berkaitan dengan Aceh sebagai daerah modal perjuangan bangsa Indonesia. Penerbitan buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai jembatan antara masa lalu dengan masa kini dan akan datang untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sejarah bangsanya.

Terbitnya buku ini, selain menambah informasi tentang sejarah dan budaya Aceh, juga memperkaya khazanah literatur tentang Aceh. Dengan demikian, ia diharapkan dapat menjadi masukan, baik untuk kepentingan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan maupun untuk memperluas wawasan masyarakat terhadap negara dan bangsanya.

Banyak pihak yang telah membantu sehingga buku ini dapat diterbitkan. Untuk itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih. Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari pembaca kami terima dengan lapang dada demi perbaikan selanjutnya.

Banda Aceh, Juli 2012

Djuniat, S. Sos.

NIP 19570607 197903 1 011

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji syukur penulis persembahkan kepada Allah Yang Maha Esa karena atas kehendak-Nyalah buku ini dapat diterbitkan. Buku berjudul *Peranan Media Massa dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan RI (1945—1949)* ini membahas peranan media massa di Aceh dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI. Dalam buku ini diungkapkan aktivitas yang dilakukan oleh rakyat Aceh sehubungan dengan kehadiran media massa pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI di Aceh. Hal demikian sesuai dengan status Aceh sebagai daerah modal perjuangan bangsa Indonesia. Satu di antara modal Aceh adalah media massa.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa mengurangi arti dan peran dari berbagai pihak tersebut, kesempatan pertama ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh. Hal itu disebabkan atas inisiatifnya untuk menerbitkan buku ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada editor yang telah melakukan berbagai perbaikan. Demikian pula kepada (Alm) Ridwan Azwad, atas masukan dan sarannya selama penelitian ini.

Tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman di BPSNT Aceh yang telah memberikan pula berbagai bantuan, baik berupa literatur dan informasi maupun diskusi-diskusi dalam penulisan buku ini.

Kata Pengantar

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Akhirul kalam, hanya kepada Allah penulis mohon petunjuk dan hidayah-Nya. Penulis berharap buku ini bermanfaat sebagai usaha menggali sumber sejarah lokal di daerah, baik sebagai masukan bagi kebijakan maupun untuk memperluas wawasan masyarakat terhadap bangsa dan negaranya.

Banda Aceh, Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KEPA LA BALAI PELESTARIAN	i
SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL BANDA ACEH	
KATA PENGANTAR PENULIS	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
 BAB II PERKEMBANGAN MEDIA MASSA DI ACEH	 11
1. Radio.....	11
1) Zaman Hindia Belanda.....	11
2) Zaman Pendudukan Jepang.....	12
2. Media Cetak.....	13
1) Zaman Hindia Belanda.....	14
2) Zaman Pendudukan Jepang.....	18
 BAB III PERANAN MEDIA MASSA DALAM PERJUANG- AN MEMPERTAHAKAN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI ACEH	 25
1. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di Acch.....	25
2. Peranan Radio pada Masa Revolusi Kemerdekaan.....	27
1) RRI Kutaradja.....	32
2) Radio Rimba Raya.....	37
3. Peranan Media Cetak pada Masa Revolusi Kemerdekaan..	59
1) Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.....	64
2) Revolusi Sosial.....	73
3) Ketidakadilan.....	79
4) Pembaharuan Keagamaan dan Pendidikan.....	81
5) Membangkitkan Semangat Juang.....	84
6) Presiden Sockarno ke Acch.....	90
7) Acch Menolak Negara Sumatera.....	105

8) Maklumat Pemerintah.....	108
9) Tokoh Media Massa.....	135
BAB IV PENUTUP.....	147
DAFTAR PUSTAKA	150

BAB I

PENDAHULUAN

Agresi Belanda, baik pertama maupun kedua menyebabkan hampir seluruh wilayah Indonesia dapat dikuasai kembali oleh Belanda, kecuali daratan daerah Aceh. Hanya Sabang termasuk yang dapat dikuasai oleh Belanda pada agresi tersebut. Itulah di antara alasan Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, memberikan gelar Aceh Daerah Modal. Hal demikian disebabkan negara Indonesia masih mempunyai modal dasar wilayah yang kuat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru saja diproklamasikan.

Satu di antara modal yang dimiliki oleh masyarakat Aceh adalah media massa. Hal itu disebabkan wilayah Indonesia yang sudah diblokade oleh Belanda, untuk menembus blokade tersebut hanya dapat dilakukan melalui media massa. Dengan adanya media massa dapat membantu kelangsungan perjuangan bangsa Indonesia.

Media massa merupakan alat komunikasi yang begitu berpengaruh dalam membentuk opini masyarakat, baik pada masa-masa damai maupun pada masa-masa yang tidak damai. Melalui media massa, pesan atau ide dengan mudah dapat disampaikan kepada khalayak ramai hingga ke daerah yang tidak mungkin dikunjungi.

Media massa sebagaimana yang dikenal dewasa ini adalah suatu nama kolektif bagi media cetak dan elektronik. Pada zaman modern, alat komunikasi massa merupakan satu di antara alat komunikasi yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat dan negara. Media massa mencakup seluruh alat komunikasi massa, seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, maupun hasil-hasil penerbitan yang memenuhi syarat untuk disebarluaskan, terbit secara periodik, bersifat umum, dan aktual.¹

¹Suhartinah. *"Kehidupan Persuratkabaran di Yogyakarta pada Masa Revolusi Fisik : Sebuah Studi Awal"*. dalam Zulfikar Ghazali (peny.), *Sejarah*

Pendahuluan

Media massa merupakan kekuatan sosial politik yang ampuh dan mempunyai hubungan rangkap dalam rangka membangkitkan pendapat umum atau opini publik dalam masyarakat. Media massa bukan saja memantulkan atau merefleksikan pendapat-pendapat umum yang telah ada dalam masyarakat, tetapi juga menimbulkan, menciptakan, menempa, dan memupuk sendiri suatu opini tertentu melalui pemberitaan-pemberitaan.²

Menyadari arti penting media massa pada periode perjuangan mempertahankan kemerdekaan 1945--1949. Oleh karena itu, penelitian tentang peranan media massa dalam perjuangan menarik untuk dilakukan dalam penelitian yang berjudul "Peranan Media Massa dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan 1945--1949".

Berdasar pada latar belakang penelitian di atas, permasalahan adalah media massa memiliki peranan penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI di Aceh, tetapi belum banyak diungkapkan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada peranan media massa dalam mempertahankan kemerdekaan RI di Aceh. Fokus permasalahan tersebut dirinci menjadi beberapa pertanyaan penelitian menurut tingkat pemecahannya, sebagai berikut. Apa peranan media massa pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di Aceh? Apa saja media massa yang berperan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Aceh? Dalam bentuk apa saja peranan media massa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI di Aceh? Rumusan permasalahan ini diharapkan penelitian tentang peranan media massa di Aceh dalam perjuangan kemerdekaan dapat dijelaskan secara runtun dan mudah difahami.

Lokal: Kumpulan Makalah Diskusi. Jakarta: Depdikbud, 1995. Hlm. 19.

² Oesman Raliby. "Peranan Pers dalam Perjuangan Kemerdekaan dan Pembangunan Bangsa". *Sinar Darussalam*, No. 32 Maret 1971. Hlm. 14.

Pendahuluan

Demikian besarnya peranan media massa pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, tetapi belum banyak diungkapkan secara khusus untuk daerah Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini sebagai studi awal untuk selanjutnya diharapkan ada penelitian yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian tentang peranan media massa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan bertujuan mengungkapkan aktivitas yang dilakukan oleh rakyat Aceh sehubungan dengan kehadiran media massa pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI di Aceh.

Dengan demikian, penelitian ini sebagai studi awal yang bertujuan mengungkapkan aktivitas yang dilakukan oleh rakyat Aceh sehubungan dengan kehadiran media massa tersebut pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dalam kerangka demikian tepat sekali ucapan Sir John Seeley (sejarawan Inggris) yang mengatakan bahwa “tujuan mempelajari sejarah supaya kita dapat lebih arif sebelum sesuatu peristiwa terjadi”. Apabila tidak mempunyai akses yang cukup terhadap fakta dan kebenaran masa lalu maka *sense of history* menjadi semakin menipis. Dengan demikian, akan kehilangan apresiasi terhadap hubungan dengan masa lampau yang sesungguhnya banyak mengandung arti dan menjelaskan berbagai duduk perkara masa kini.

Selanjutnya, untuk dapat mencerminkan dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan daerah, khususnya bidang sejarah, sebagai unsur penting yang dapat memperkaya dan memberi corak kebudayaan nasional. Penelitian sejarah lokal (daerah) juga berarti membina loyalitas daerah dalam rangka perjuangan nasional untuk mengadakan dan mempertahankan kehidupan negara Republik Indonesia. Kajian ini juga dimaksudkan untuk mengungkapkan sisi lain dari Aceh Daerah Modal, yaitu modal media massa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Pendahuluan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut. Secara teoretis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi gagasan suatu model penelitian dan penulisan sejarah di daerah. Adapun kegunaan secara praktis, yaitu dapat mempergunakan pengalaman masa lalu yang dikisahkan dalam penelitian ini, untuk menentukan langkah dan tindakan yang lebih baik pada masa kini dan akan datang dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul. Manfaat selanjutnya adalah sebagai usaha menggali sumber sejarah lokal di daerah, baik sebagai masukan bagi kebijakan maupun untuk memperluas wawasan masyarakat terhadap bangsa dan negaranya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Proses penelitian sejarah tidak terlepas dari definisi sejarah secara umum. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari dinamika dan perkembangan kehidupan manusia *sebagai makhluk sosial* pada masa lampau,³ mengaitkan, dan merekonstruksikannya dalam bentuk tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai karya tulis sejarah. Hasil penulisannya adalah sejarah sebagai kisah yang menerangkan dan memahami peristiwa sebagaimana terjadinya.

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman masa lampau.⁴ Dengan demikian, penelitian yang menggunakan metode penelitian sejarah kritis harus menggunakan pula aturan dan prinsip-prinsip yang ada dalam ilmu sejarah. Ada beberapa tahap yang harus ditempuh dalam penelitian sejarah dengan metode kritis, yaitu pengumpulan sumber. Verifikasi (kritik sumber dan keabsahan sumber), yang terdiri dari kritik interen untuk membuktikan

³ Taufik Abdullah. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Press, 1990. Hlm. 6.

⁴ Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho NS. Jakarta: UI Press, 1969. Hhlm. 32.

Pendahuluan

kredibilitas (data dapat dipercaya atau tidak), dan kritik eksteren (digunakan untuk menguji keaslian sumber yang diperoleh). Tahap selanjutnya adalah interpretasi berupa analisis dari sintesis, kemudian penulisan (historiografi).

Dalam penelitian ini ruang lingkup wilayah penelitian adalah Provinsi Aceh karena yang ingin dijelaskan adalah peranan media massa pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Aceh. Hal itu disebabkan media massa begitu berperan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Aceh. Ruang lingkup temporal (waktu) adalah masa revolusi kemerdekaan RI 1945 hingga 1949. Tahun 1945 ditetapkan sebagai awal penelitian karena pada tahun tersebut mulai berakhirnya Jepang di Indonesia, khususnya di Aceh dan memasuki awal masa revolusi kemerdekaan, satu di antara modal perjuangan tersebut adalah media massa. Akan tetapi, penjelasan tahun sebelumnya dalam ruang lingkup ini juga dilakukan agar latar belakang permasalahan yang diteliti dapat dijelaskan secara runtun dan berkesinambungan. Membicarakan peranan media massa pada periode perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Aceh 1945--1949, dirasakan kurang lengkap apabila tidak dijelaskan tentang sejarah media massa di Aceh pada masa-masa sebelumnya. Hal demikian didasarkan pada kenyataan bahwa media massa yang dibicarakan pada periode perjuangan, mempunyai hubungan yang erat dengan keadaan media massa pada masa-masa sebelumnya. Adapun tahun 1949 ditetapkan sebagai batas akhir penelitian karena pada tahun tersebut berakhirnya kegiatan revolusi kemerdekaan di Indonesia, khususnya di Aceh.

Sifat penulisan ini adalah diskriptif-analisis. Sejarah analisis merupakan penulisan sejarah yang menguraikan mengapa sesuatu peristiwa terjadi dan menggambarkan kejadian sebagai proses yang dicakup dalam uraian analisis.⁵ Perkembangan suatu peristiwa disertai

⁵ Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia, 1992. Hlm. 10.

Pendahuluan

dengan faktanya tentang apa, siapa, kapan, dimana, serta bagaimana, kemudian diurutkan secara kronologis hubungan antara sebab dan akibat, dan motivasi sebagai suatu kompleksitas kejadian-kejadian. Hal itu dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengapa peristiwa itu terjadi.

Melalui metode tersebut dapat dilakukan studi secara mendalam sehingga diperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang peranan media massa. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat memberikan peluang untuk melakukan interpretasi secara akurat sehingga dapat melahirkan butir-butir pemikiran yang mengandung nilai dan kearifan bagi kepentingan kini dan akan datang.

(1) Pengumpulan Sumber

Natsir menyebutkan,

”teknik pengumpulan data merupakan alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Data yang dikumpulkan dapat berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan, dan beragam data yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diteliti”.⁶

Berdasar pada pengertian teknik pengumpulan data dan wujud data yang dikumpulkan, dalam penelitian ini digunakan tiga teknik utama pengumpulan data atau sumber, yaitu wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik tersebut digunakan karena pengumpulan data dalam suatu penelitian harus pula melalui teknik-teknik dalam metode yang digunakan.

a. Wawancara

Sesuai dengan batasan temporalnya yang kontemporer, sumber lisan dapat digunakan sebagai sumber yang dapat memberikan kemungkinan luas untuk menggali suatu peristiwa langsung dari pelakunya yang tidak ditemukan dalam dokumen tertulis. Sejarah

⁶ Natsir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia, 2003. Hlm.328.

Pendahuluan

kontemporer sekitar tahun 1945-1949, kebanyakan masih tersimpan dalam ingatan para pelaku sehingga sejarah lisan dapat menggambarkan peristiwa secara menyeluruh.⁷

Teknik wawancara digunakan karena ingin menggali keterangan yang lebih mendalam tentang peranan media massa, melalui pendapat, kesan, pengalaman, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya dari informan. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan informan atau orang yang dimintai informasi berkaitan dengan objek yang diteliti, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.⁸

Informan yang dipilih adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami sumber dan informasi tentang media massa. Hal itu disebabkan dalam penelitian sejarah, yang lebih penting adalah informan memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek yang diteliti.⁹ Sumber lisan juga digunakan untuk melengkapi terhadap sumber tertulis dan untuk melakukan *cross check* terhadap sumber tertulis. Oleh karena itu, informan yang digunakan untuk diwawancarai terdiri atas sejarawan atau tokoh sejarah dan pelaku sejarah.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan terhadap dua hal, *pertama*, mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai dokumen atau arsip, seperti laporan kegiatan dan program kerja.

⁷Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana/Aditya, 1992. Hlm. 25-26.

⁸H.M. Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008. Hlm. 108.

⁹ *Ibid.*, hlm. 138.

Pendahuluan

Kedua, studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai tulisan yang relevan dengan objek yang diteliti. Sumber-sumber tertulis yang digunakan dalam penelitian ini, seperti buku-buku, jurnal, buletin, dan leaflet. Hal ini dilakukan agar hasil wawancara menjadi lebih akurat apabila didukung oleh data tertulis.

Pengumpulan data tertulis dilakukan melalui sejumlah bacaan di perpustakaan, seperti Perpustakaan Museum Aceh, Badan Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Perpustakaan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, Perpustakaan Museum Ali Hasjmy, buku-buku koleksi penulis, dan sumber elektronik.

Studi pustaka digunakan untuk memperoleh data, baik primer maupun sekunder yang diperlukan berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut kemudian ditelaah secara *intens* sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.¹⁰

(2) Analisis data

Michael Quinn Patton menyebutkan,

"analisis data adalah proses urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Menafsirkan adalah memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian".¹¹

¹⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009. Hlm. 149.

¹¹ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004. Hlm.103.

Pendahuluan

Berdasar pada pengertian di atas dapat dipahami bahwa analisis data bermaksud mengorganisasikan data. Analisis data dalam hal ini adalah pengaturan, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya. Oleh karena itu, analisis data dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini.

- a. Dibaca dan difahami data secara berulang-ulang sehingga diperoleh data yang sesuai dengan objek yang diteliti,
- b. Identifikasi dan klasifikasi data,
- c. Verifikasi, yakni menguji kebenaran interpretasi dan kesesuaiannya dengan data sehingga melahirkan fakta yang akurat,
- d. Memahami makna data untuk menjawab masalah yang dirumuskan, menafsirkan, dan membuat simpulan, dan
- e. Menyajikan fakta dalam bentuk laporan penelitian.

Sistematika penulisan dimaksudkan agar pembahasan tentang objek penelitian dapat dijelaskan secara runtun dan mudah dipahami. Oleh karena itu, agar dapat memberikan gambaran yang jelas, hasil penelitian disusun dalam beberapa bab. Penyusunan dalam beberapa bab dilandasi supaya dapat menyajikan suatu gambaran yang berlatar belakang historis, yakni menunjukkan kontinuitas perkembangan yang saling berkaitan. Hal demikian seperti dikatakan oleh Sartono Kartodirdjo bahwa tugas dari pembahasan sejarah akan lebih dipusatkan pada masalah kontinuitas dalam pembahasan tersebut.¹² Persoalan-persoalan yang mempunyai akar pada masa lampau akan berkembang terus sampai sekarang dan masa yang akan datang.

Secara keseluruhan tulisan ini terdiri atas empat bab. **Bab pertama** Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. **Bab kedua**, Perkembangan Media Massa di

¹² Sartono Kartodirdjo. "Modernisme dalam Perspektif Historis", dalam *Buletin Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM*, No. 5, 1997. Hlm. 134.

BAB II

PERKEMBANGAN MEDIA MASSA DI ACEH

1. Radio

Sebagaimana lazimnya daerah jajahan, semuanya dikontrol oleh penjajah. Demikian pula radio yang merupakan alat komunikasi begitu dibatasi. Hal demikian dimaksudkan agar berita yang disampaikan harus selalu yang mendukung keberadaan penguasa. Dengan demikian, perkembangan radio begitu dibatasi.

1) Zaman Hindia Belanda

Siaran radio di Indonesia zaman penjajahan Belanda dimulai dengan berdirinya *Bataviasche Radio Vereniging* pada 16 Juni 1925. Setelah itu muncul beberapa badan radio, seperti *Nederlandsche Indische Omroep Mij* di Jakarta, Bandung, dan Medan. Sementara di Surakarta berdiri pula *Solosche Radio Vereniging*, *Mataramsche Vereniging Voor Radio Omroep* di Yaoyakarta, dan *Vereniging Voor Oosterse Radio Luisteraars* di Bandung. Badan siaran radio lainnya adalah *Vereniging Voor Oosterse Radio Omroep* di Surakarta, *Chineese en Inheemsche Radio Luistraas Vereniging Oost Java* di Surabaya, *Erste Madiunse Radio Omroep* di Madiun, dan radio Semarang.¹

Selain *Nederlandsche Indische Omroep Mij*, di Medan juga terdapat radio siaran swasta, yaitu *Meyer Omroep Voor Allen*, yang diusahakan oleh Tuan Meyer dan *Allgemene Vereniging Omroep Medan*. Di antara sekian banyak radio siaran lainnya hanya *Nederlandsche Indische Omroep Mij* yang terbesar dan terlengkap. Hal

¹Lembaga Pembina Jiwa 45. *Indonesia Kini dan Esok*. Lembaga Pembina Jiwa 45, Jakarta, 1974, hlm. 170.

Perkembangan Media Massa di Aceh

itu disebabkan radio *Nederlandsche* mendapat bantuan penuh dari Pemerintah Hindia Belanda.

Radio-radio tersebut lebih menguntungkan Pemerintah Hindia Belanda. Program-program siarannya selalu berorientasi kepada kepentingan atau misi pemerintah kolonial Belanda, baik yang menyangkut politik maupun sosial budaya. Belanda menggunakan media komunikasi radio untuk memperoleh informasi mengenai situasi daerah jajahan sehingga melalui radio dapat mengontrol dan memantapkan kekuasaannya di Indonesia.

Untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan radio siaran Belanda yang tidak menguntungkan perjuangan bangsa Indonesia, pada 29 Maret 1937 diadakan pertemuan untuk memikirkan keadaan radio milik bangsa Indonesia. Pertemuan itu dilaksanakan atas usaha anggota *volksraad* yang dipelopori oleh M. Sutarjo Kartohadikusumo dan Ir. Sarlito Mangunkusumo. Pertemuan itu melahirkan suatu badan baru yang bernama Perserikatan Perkumpulan Radio Ketimuran.

Tujuan perkumpulan semata-mata untuk memajukan kesenian dan kebudayaan daerah yang telah terancam akibat perkembangan radio siaran Pemerintah Kolonial Belanda. Selain itu, juga bertujuan untuk memajukan masyarakat Indonesia, baik rohani maupun jasmani. Perkumpulan berusaha agar dapat menyelenggarakan siaran sendiri sepenuhnya tanpa bantuan badan radio pemerintah Belanda. Rencana tersebut baru dapat dilaksanakan pada 1 November 1940.

2) Zaman Pendudukan Jepang

Berkat bantuan media radio sebagai alat propaganda, pada 8 Maret 1942, Jepang berhasil mengusir Belanda bersama rakyat Indonesia dari tanah air Indonesia. Sejak itu, semua bekas jajahan Hindia Belanda resmi dikuasai oleh pemerintah militer Jepang. Segala

Perkembangan Media Massa di Aceh

sesuatu harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak dan perintah tentara Jepang untuk mendukung peperangan Asia Timur Raya.

Radio siaran yang selama ini bersatus swasta diambil alih oleh pemerintah militer Jepang. Pemancar radio dikuasai seluruhnya oleh Jepang, sementara radio-radio rakyat disegel. Siaran radio selanjutnya ditangani oleh jawatan khusus yang bernama *Hoso Kanri Kyuku*, sebagai pusat siaran radio di Jakarta. Cabang-cabangnya di daerah dinamakan dengan *Hoso Kyuku*, seperti yang terdapat di Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta Semarang, Surabaya, dan Malang.

Semua siaran radio diarahkan untuk kepentingan militer Jepang. Rakyat tidak diperbolehkan mendengarkan siaran radio luar negeri karena dikhawatirkan akan dapat melunturkan kepercayaan terhadap pemerintah Jepang. Siaran radio yang dapat didengar hanyalah siaran yang dipancarkan oleh radio *Hoso Kyuku* di Jakarta.

Berita-berita yang disiarkan hanyalah yang dapat membangkitkan semangat rakyat untuk membantu tentara Jepang dalam melawan Sekutu di seluruh Asia. Jepang selalu bersemboyan bahwa Asia Timur Raya dalam artian Asia adalah untuk bangsa Asia. Semboyan tersebut juga disambut oleh wartawan untuk membangkitkan semangat juang para pahlawan dalam mencapai cita-cita kemerdekaan.

2. Media Cetak

Sebagaimana halnya media elektronik, seperti radio, media cetak pun begitu dibatasi pada zaman penjajahan. Selain penerbitannya yang dikontrol oleh penjajah, masyarakatpun belum banyak yang mampu mengelolanya. Akan tetapi, pelan tapi pasti, media cetak mulai berkembang sejak zaman penjajahan, baik yang dikelola oleh penjajah maupun oleh masyarakat pribumi.

Perkembangan Media Massa di Aceh

1) Zaman Hindia Belanda

Perkembangan persuratkabaran di Aceh pada masa pemerintahan Belanda berhubungan erat dengan terbentuknya kekuasaan Belanda di Aceh. Kenyataannya bahwa kekuasaan Belanda baru masuk ke Aceh pada sekitar akhir abad ke-19 M. Oleh karena itu, perkembangan persuratkabaran di Aceh baru dimulai pada sekitar abad tersebut. Dengan demikian, wajarlah apabila Aceh ketinggalan dalam hal surat kabar dibandingkan dengan daerah lain, baik dari segi dimulai terbitnya surat-surat kabar maupun dari segi jumlahnya.² Surat-surat kabar yang diterbitkan pada masa pemerintah kolonial Belanda ada yang mempergunakan bahasa pengantar dalam bahasa Belanda, Melayu, Cina, dan ada pula yang mempergunakan bahasa daerah.

Untuk kepentingan masyarakat Indonesia sendiri pers berbahasa Melayu lebih penting daripada pers berbahasa Belanda. Hal demikian disebabkan pers yang berbahasa Melayu langsung dapat menarik pembaca-pembaca pribumi dalam jumlah yang banyak.³ Perkembangan pers bumiputra atau yang berbahasa Melayu, menimbulkan pemikiran di kalangan pemerintah kolonial Belanda untuk menerbitkan sendiri surat kabar berbahasa Melayu dengan jumlah yang besar dan dengan sumber-sumber penerbitan yang baik.

²Mengenai jumlah surat kabar yang terbit di Aceh dengan daerah-daerah lain dapat dibandingkan, misalnya, dengan daerah Sumatera Barat. Pada waktu itu di Kutaraja terbit surat kabar *Pemberita Atjeh* dan merupakan satu-satunya surat kabar yang diterbitkan dalam kalangan orang-orang bumiputra, di Sumatera Barat pada periode tersebut sudah diterbitkan beberapa surat kabar, misalnya, *Sinar Soematra*, *Tjahaja Soematra*, *Warta Berita*, *Pertja Barat*, *Oetoesan Melajoe*, dan *Al-Moenir*. Di Medan selama periode 1885-1942, di antaranya terdapat *Deli Courant*, *Pewarta Deli*, *Soeara Tapanuli*, *Poesaka Karo*, *Soeara Batak*, *Soeara Bondjol*, *Mandailing*, *Tjin Po*, *Hoa Kiaw*, dan *Soeara Djawa*. Lebih lanjut lihat Sartono Kartodirdjo, dkk., *Sejarah Nasional*, jilid V, (Jakarta: Depdikbud, 1973).

³ *Ibid.*, hlm. 297.

Perkembangan Media Massa di Aceh

Adapula surat kabar-surat kabar yang berisi berita atau karangan-karangan yang hanya ditujukan bagi keturunan Cina, seperti yang terjadi pada surat kabar yang terbit di Jakarta, Surabaya, dan di Semarang. Ada juga surat kabar berbahasa Melayu yang dibiayai dan dikerjakan oleh orang-orang Cina, tetapi lingkungan pembacanya adalah penduduk bumiputra.⁴

Dalam perkembangannya, pers berbahasa Melayu mulai muncul pada tahun 1902 M di Medan. *Pertja Timoer* yang mengawali surat kabar berbahasa Melayu, meskipun dicetak di percetakan milik orang Belanda bernama J. Hallerman. Koran itu terbit setiap hari Senin dan Kamis dengan pemimpin redaksi Mangaradja Salembuwe.

Khusus di daerah Aceh pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, surat kabar yang diterbitkan ada yang berbahasa Belanda dan adapula yang berbahasa Melayu. Menurut beberapa catatan, surat kabar yang berbahasa Melayu pertama di Aceh adalah *Pemberita Atjeh* yang diterbitkan di Kutaraja.⁵ Surat kabar itu berada di bawah pemimpin Dja Endar Moeda. Surat kabar *Pemberita Atjeh* dapat digolongkan sebagai surat kabar yang progresif di Aceh.⁶

Pada awal abad ke-20, sesudah terbitnya *Pemberita Atjeh* di Kutaraja juga diterbitkan sebuah surat kabar lain pada tahun 1907 M, bernama *Sinar Atjeh*. Surat kabar *Sinar Atjeh* terbit dua kali seminggu, yaitu setiap hari Senin dan Kamis. Surat kabar itu diterbitkan oleh perusahaan *Sinar Atjeh Companie* yang berkantor di jalan Peunayong No. 59 Kutaraja. Percetakan yang dipergunakan untuk mencetak surat kabar itu adalah *Atjeh Drukkerij en Boekhandel fillial* dari *Deli Courant* Kutaraja. Limboen Hwat bertindak sebagai pemimpin redaksi,

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 303.

⁶ *Ibid.*, hlm. 298.

Perkembangan Media Massa di Aceh

sedangkan bidang administrasi dan tata usaha dipimpin oleh Lim Boen San.

Surat kabar *Sinar Atjeh* biasanya terbit tiga halaman setiap penerbitannya dan kadang-kadang empat halaman. Di dalamnya lebih banyak memuat iklan, baik dari pengusaha di Kutaraja sendiri maupun pengusaha dari Batavia (Jakarta). Ulasan mengenai politik yang dimuat dalam surat kabar itu banyak ditulis oleh seorang penulis yang sering memakai nama samaran "Aron Tutjoh".

Mengenai harga langganannya ditetapkan sebesar f.1.50 untuk tiga bulan dan sebesar f.3.00 untuk enam bulan. Untuk daerah Kutaraja dan sekitarnya ditetapkan f.0.50 per bulan. Surat kabar itu banyak pula yang dikirim hingga ke Nederland.

Satu surat kabar lainnya yang diterbitkan oleh orang Aceh yang dapat bertahan lebih lama adalah *Soeara Atjeh*. Surat kabar itu diterbitkan dua kali setiap Minggu dan diasuh oleh T. M. Usman, diterbitkan di kota Sigli. Penerbitan pertama surat kabar *Soeara Atjeh* itu pada tahun 1928 M dengan menggunakan bahasa Melayu.

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika pemimpin umum surat kabar tersebut, T. M. Usman, selaku pemimpin redaksi pindah ke Kutaraja pada tahun 1932 M, perkembangan surat kabar itu pun mengalami perubahan pula. Kepindahan T. M. Usman ke Kutaraja berhubungan dengan pembentukan suatu organisasi keagamaan yang diberi nama *Nadil Islahil Islamy* (Organisasi Perbaikan Islam), T. M. Usman menjadi ketua organisasi Islam itu.⁷

Sejak bulan Maret 1933, surat kabar *Soeara Atjeh* diterbitkan oleh organisasi *Nadil Islahil Islamy*. Dengan demikian, surat kabar itu

⁷Laporan Politik Mengenai Daerah Aceh dan Daerah Takluknya Selama Semester Pertama Tahun 1933, Seri Informasi Aceh, Th. V. No. 4. Alihbahasa Aboe Bakar, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1981), hlm. 5.

Perkembangan Media Massa di Aceh

bukan lagi kepunyaan perseorangan, tetapi menjadi surat kabar organisasi *Nadil Islahil Islamy*. Redaktornya selain T. M. Usman ditambah lagi dengan Mohd. Hasbi.⁸

Perkembangan persuratkabaran yang diterbitkan oleh organisasi-organisasi politik atau sosial sebenarnya telah ada sejak timbulnya pergerakan nasional di Indonesia. Perkembangan pers setelah berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional menduduki tempat yang lebih penting dari pers Eropa. Beberapa organisasi pergerakan nasional mempergunakan pers sebagai alat komunikasi dengan para anggotanya dan juga untuk menyerang kebijakan politik penjajahan Belanda.

Di Aceh pada masa-masa pergerakan, selain surat kabar *Soeara Atjeh* yang merupakan surat kabar organisasi, juga dikenal ada dua surat kabar kepunyaan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kedua surat kabar tersebut diterbitkan di Langsa, yaitu *Oetoesan Rakjat* dan *Batterij*.⁹ Johan Ahmad, pengikut aliran kiri, dari Sigli sering mengulas berita yang berlawanan dengan Pemerintah Hindia Belanda, bahkan satu di antara tulisannya yang mengulas tentang keadaan politik pada waktu itu, menyebabkan Johan Ahmad diasingkan oleh Pemerintah Hindia Belanda ke Cilacap.¹⁰

Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dalam perjuangannya juga mempergunakan majalah bulanan yang diberi nama *Penjoeloeh*. Majalah tersebut terbit setiap bulan sekali. Pemimpin redaksinya adalah Teungku Ismail Yakoeb. Majalah bulanan *Penjoeloeh* karena kesulitan percetakan di Aceh sehingga dicetak di Medan. Majalah *Penjoeloeh*

⁸ *Ibid.*,

⁹ Kartodirdjo, dkk., *loc. cit.*,

¹⁰ Abdullah Ali, dkk., *Sejarah Perjuangan Rakyat Aceh Dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949*. Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1985. Hlm. 107.

Perkembangan Media Massa di Aceh

dapat bertahan hingga mendaratnya balatentara pendudukan Jepang di Aceh, 1942.¹¹

2) Zaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang di Aceh, pers mempunyai ciri tersendiri, setiap media massa selain yang dikelola oleh pemerintah Jepang, dilarang terbit. Pemerintah Jepang di Aceh hanya menerbitkan surat kabar yang berada di bawah pengawasan Jepang, yaitu *Atjeh Sinbun*.¹²

Pemerintah pendudukan Jepang di Aceh membentuk suatu badan yang diberi nama *Hodoka*, yaitu suatu badan propaganda resmi Jepang. Badan tersebut didirikan untuk melakukan propaganda demi kepentingan Jepang dalam usahanya menguasai seluruh wilayah Asia Timur Raya. *Sinbun Bu* merupakan bagian dari *Hodoka* yang bertugas menerbitkan surat kabar untuk kepentingan propaganda Jepang. Surat kabar yang diterbitkan *Sinbun Bu* Aceh bernama *Atjeh Sinbun* yang dicetak pada percetakan *Atjeh Drukkerij*, suatu percetakan warisan kolonial Belanda di Aceh.

Atjeh Sinbun dipimpin oleh seorang direktur atau pemimpin umum, yaitu Abdul Wahid R, yang merupakan seorang penulis pada zaman kolonial Belanda di Medan. Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, ia dibawa ke Kutaraja untuk memimpin surat kabar *Atjeh Sinbun*. Sebagai staf pada dewan redaksi *Atjeh Sinbun* diperkerjakan para penulis Aceh yang selama masa pemerintahan kolonial Belanda telah berpengalaman pada bidang jurnalistik. Mereka

¹¹ Ismuha, "Mengenang Kembali Lahirnya Persatuan Ulama Seluruh Aceh 30 Tahun yang Lalu, *SinarDarussalam*, No. 15. Juli 1969, (Banda Aceh: Yayasan Pembinaan Darussalam / Studie Club Islam, 1969). Hlm. 33.

¹² *Ibid.*, hlm. 108.

Perkembangan Media Massa di Aceh

itu antara lain, Ismail Yakub,¹³ Ali Hasjmy, Amelz, Abdullah Arif, dan Talsya.

Anggota redaksi *Atjeh Sinbun* dari kalangan masyarakat Aceh itu ialah tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan di Aceh. Mereka para penulis yang terkenal pada masa-masa sebelumnya. Masuknya mereka sebagai anggota redaksi surat kabar *Atjeh Sinbun* tidak lepas dari kegiatan perjuangannya.

Tokoh-tokoh perjuangan yang ikut menjadi redaktur *Atjeh Sinbun* terpaksa harus melakukan kerja sama dengan pihak tentara pendudukan Jepang. Hal itu dimaksudkan supaya memperoleh kesempatan mendidik rakyat melalui media massa. Karena tidak mungkin terjadi apabila mereka tidak melakukan kerja sama dengan Jepang yang pada waktu itu masih menguasai Aceh.

Sebaliknya, Jepang berusaha memanfaatkan tenaga-tenaga yang terkenal di daerah sebagai orang-orang yang duduk dalam staf redaksinya. Hal demikian didasarkan kepada pertimbangan bahwa setiap propaganda-propaganda dari pemerintah pendudukan Jepang akan

¹³ Lahir di Lhoksukon pada tahun 1915. Pada tahun 1931 melanjutkan pendidikan ke Sumatera Barat hingga tahun 1939. Ketika kembali ke Aceh, ia masuk organisasi Muhammadiyah dan menjadi ketua Perguisa. Ia termasuk tokoh penting dari kelompok pemikir PUSA, dan diangkat oleh Jepang menjadi Inspektur Sekolah-Sekolah Agama di Aceh. Seorang penulis yang produktif untuk beberapa majalah yang terbit di Sumatera. Pengalamannya yang luas menyebabkan ia diangkat menjadi redaktur majalah PUSA, *PENJOELOEH* (1940-1942.) Selama masa revolusi, ia aktif sebagai pemimpin PNI dan juga dalam Markas Umum. Ia memainkan peranan yang aktif sebagai jaksa penuntut terhadap para *uleebalang* dalam rangka menyelesaikan Peristiwa Cumbok. Ia memperoleh Ijazah SMA pada tahun 1950-an, ia pernah dipenjarakan di Sumatera Barat sehubungan dengan keterlibatannya dalam pemberontakan Darul Islam. Setelah menyelesaikan hukuman, ia pergi ke Mesir dan memperoleh gelar MA dari Universitas Al Azhar, Cairo. Ia pernah bekerja di IAIN Sunan Ampel Surabaya dan IAIN Walisongo di Semarang. Di antara hasil karyanya adalah *Teungku Tjihik di Tiro: Hidup dan Perjuangan*.

Perkembangan Media Massa di Aceh

dengan mudah diterima oleh rakyat Aceh. Dari kerja sama kedua belah pihak itu, tampak bahwa terjadinya kerja sama itu disebabkan adanya saling ketergantungan antara kedua belah pihak.

Kerja sama antara tokoh-tokoh pejuang dengan Jepang tidak saja dalam bidang persuratkabaran, tetapi juga dalam bidang-bidang lain, misalnya, pemerintahan dan pertahanan. Melalui surat kabar *Atjeh Sinbun*, para pemimpin perjuangan di daerah Aceh berusaha memasukkan ide-ide perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. Sehubungan dengan adanya dua kepentingan yang berbeda itu, terjadinya pertentangan-pertentangan dalam maksud penerbitan surat kabar antara pihak pemerintah pendudukan Jepang dengan para pemimpin rakyat Aceh di surat kabar *Atjeh Sinbun*.

Pemerintah Jepang menyadari bahwa para redaktur surat kabar yang berasal dari kalangan masyarakat Aceh selalu berusaha mempergunakan surat kabar *Atjeh Sinbun* sebagai alat perjuangan mereka. Untuk mengawasi gerak-gerik para redaktur, di kantor redaksi *Atjeh Sinbun* ditempatkan seorang petugas Jepang yang mengawasi penerbitan *Atjeh Sinbun*. Dalam kenyataannya bahwa pihak pemerintah pendudukan Jepang begitu teliti dalam meneliti berita-berita ataupun ulasan-ulasan yang dibuat oleh para redaktornya. Sedikit saja ada unsur-unsur yang dianggap merong-rong kewibawaan pemerintah Jepang yang dimuat dalam surat kabar *Atjeh Sinbun* yang dimuat oleh para redaktornya, sudah barang tentu terhadap para redaktur diberikan sanksi. Dalam banyak kasus, tindakan yang diberikan oleh pemerintah Jepang terhadap para redaktur yang bekerja di *Atjeh Sinbun* yang dianggap tidak mematuhi garis kebijaksanaan pemerintah Jepang, selalu dalam bentuk yang halus dan begitu berhati-hati. Biasanya para redaktur dipindahkan dari staf-staf redaksi *Atjeh Sinbun* ke tempat lain, tetapi

Perkembangan Media Massa di Aceh

tidak kurang juga para redaktur harus meringkuk dalam tahanan *Kenpetai* Jepang.¹⁴

Tindakan terhadap para redaktur *Atjeh Sinbun* yang dianggap merong-rong kewibawaan pemerintah Jepang, pertama kali jatuh kepada Ismail Yakub pada awal tahun 1943 M. Alasan penindakan terhadap Ismail Yakub disebabkan tulisan-tulisannya yang dimuat dalam surat kabar *Atjeh Sinbun* dianggap oleh pemerintah Jepang sebagai suatu usaha yang sengaja dilakukannya terhadap pemerintah Jepang. Hal itu dianggap membahayakan bagi pemerintah pendudukan Jepang. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang terhadap Ismail Yakub, yaitu ia dikeluarkan dari pemimpin redaksi *Atjeh Sinbun*. Selanjutnya yang bersangkutan pindah kerja sebagai guru agama pada *Chugakko* (SMP) di Kutaraja.

Akibat pemberhentian Ismail Yakub, Ali Hasjmy ditunjuk sebagai pemimpin redaksi *Atjeh Sinbun*. Dengan demikian, susunan redaksinya berubah menjadi sebagai berikut: pemimpin redaksi Ali Hasjmy dengan stafnya antara lain: Amelz, A. G. Mutyara, Talsya, Ibnu Rasyid, dan Ridwan. Bagian Administrasi dan Tata Usaha dijabat oleh Syarif Alimi dan Aboe Bakar (abang Teungku Sulaiman Daud, mantan bupati pertama Aceh Utara). Untuk mengedarkan surat kabar tersebut ke seluruh daerah Aceh dan para langganan, dijabat oleh Nyak Raden dan dibantu oleh Tahir.

Setelah Ismail Yakub, menyusul Amelz yang dikeluarkan dari redaksi *Atjeh Sinbun*. Pemberhentian Amelz dilakukan dengan cara yang lebih halus, pemerintah Jepang mengatakan bahwa Amelz akan disekolahkan ke Singapura. Ketika sampai di Singapura Amelz tidak

¹⁴ Para redaktur yang diberi tindakan oleh pemerintah Jepang ada yang seolah-olah dipindahkan kerjanya ke tempat lain atau dengan alasan diperintahkan untuk mengikuti pendidikan, misalnya, pada kasus Amelz dan ada pula yang diperiksa oleh kempetai Jepang dan harus meringkuk dalam tahanan, misalnya, A.G. Mutyara.

Perkembangan Media Massa di Aceh

pernah mendapatkan pendidikan seperti yang dijanjikan oleh Jepang di Kutaraja.

Berikutnya, yang ditindak oleh pemerintah Jepang dari kalangan redaktur *Atjeh Sinbun*, yaitu Ibnu Rasyid kemudian menyusul A. G. Mutyara. Terhadap A. G. Mutyara dipersalahkan karena ulasannya yang dimuat dalam *Atjeh Sinbun* tentang pendaratan pasukan Sekutu di pantai Normandia. Akan tetapi, persoalan yang sebenarnya yang menyebabkan A. G. Mutyara ditindak oleh pemerintah Jepang adalah karena sebuah drama yang ditulisnya. Drama tersebut mengisahkan tentang perlakuan sewenang-wenang oleh majikan terhadap pembantunya. A. G. Mutyara dalam dramanya itu begitu mencela tindakan sewenang-wenang majikan yang menjajah pembantunya itu.¹⁵

Pemerintah Jepang menyadari bahwa ceritera drama yang disusun oleh A. G. Mutyara merupakan perlambang tentang hubungan antara pemerintah Jepang di Indonesia. Oleh karena itu, A. G. Mutyara ditahan oleh *Kenpetai* Jepang dan sempat dimasukkan ke dalam tahanan untuk beberapa lama. Setelah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh *kenpetai*, A. G. Mutyara diperintahkan untuk mengajukan surat alasan kesehatan. Dengan demikian, A. G. Mutyara secara halus disingkirkan dari redaksi *Atjeh Sinbun*. Satu per satu anggota redaktur *Atjeh Sinbun* yang terdiri atas kalangan para pejuang di Aceh dengan berbagai alasan diberhentikan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Akan tetapi, tidak pernah mau melepaskan sepenuhnya pemimpin harian tersebut. Mereka mempunyai suatu garis kebijakan bahwa biar orang-orang yang memimpin *Atjeh Sinbun* berganti-ganti asal saja ideologi perjuangan bangsa senantiasa sama.

¹⁵ Ali, dkk., *op.cit.*, hlm. 111.

Perkembangan Media Massa di Aceh

Surabaya, 24 Agustus 1945
No. 100, 101, 102, 103
Jumlah 300.000.000.000

Atjeh Sinbun

Surabaya, 24 Agustus 1945
No. 100, 101, 102, 103
Jumlah 300.000.000.000

Diterbitkan tiap hari Selasa Kuning Sabtu oleh: Atjeh Sya Saif. Nomor 100.000.000.000

Kemenangan2 Nippon di Tiongkok

Kota Kweilin sudah dekat adjing.

Shanghai 22 Agustus Domel.

Disebabkan pasokan2 Nippon mendesak dengan kapal-kapal Kweilin dari Tiongkok ke Laut Selatan, sekarang perangnya dengan Tiongkok melampaui Kweilin telah menjadi hal penting bagi Kweilin. Pasokan2 ini akan sangat penting bagi Kweilin karena mereka akan dapat memasok barang-barang yang diperlukan untuk mempertahankan kota Kweilin. Pasokan2 ini akan sangat penting bagi Kweilin karena mereka akan dapat memasok barang-barang yang diperlukan untuk mempertahankan kota Kweilin.

Setelah berhasil mempertahankan Kweilin, Nippon akan dapat menguasai seluruh Tiongkok. Nippon akan dapat menguasai seluruh Tiongkok. Nippon akan dapat menguasai seluruh Tiongkok.

Dalam pada-titik pasokan2 Nippon yang telah mencapai Tiongkok diwilayah Hsiao bagian selatan, Nippon akan dapat menguasai seluruh Tiongkok. Nippon akan dapat menguasai seluruh Tiongkok.

Setelah berhasil mempertahankan Kweilin, Nippon akan dapat menguasai seluruh Tiongkok. Nippon akan dapat menguasai seluruh Tiongkok.

Wenchow diduduki Nippon.

Tokyo 24 Agustus Domel.

Makroon. Di Hsiao bagian selatan, Nippon akan dapat menguasai seluruh Tiongkok. Nippon akan dapat menguasai seluruh Tiongkok.

Setelah berhasil mempertahankan Kweilin, Nippon akan dapat menguasai seluruh Tiongkok. Nippon akan dapat menguasai seluruh Tiongkok.

Dalam pada-titik pasokan2 Nippon yang telah mencapai Tiongkok diwilayah Hsiao bagian selatan, Nippon akan dapat menguasai seluruh Tiongkok. Nippon akan dapat menguasai seluruh Tiongkok.

Setelah berhasil mempertahankan Kweilin, Nippon akan dapat menguasai seluruh Tiongkok. Nippon akan dapat menguasai seluruh Tiongkok.

Contoh Surat Kabar Atjeh Sinbun

Surat kabar *Atjeh Sinbun* yang merupakan satu-satunya surat kabar yang boleh terbit pada masa pendudukan Jepang di Aceh, terakhir kali terbit pada 15 Agustus 1945. Sebenarnya untuk penerbitan tanggal 15 Agustus 1945, segala sesuatunya sudah disiapkan, pekerjaan yang belum selesai hanya melakukan pencetakannya. Tiba-tiba datang pejabat pemerintah Jepang dan memberitahukan kepada Ali Hasjmy,¹⁶ *Atjeh Sinbun* untuk terbitan tanggal 15 Agustus 1945 dibatalkan saja karena Jepang sudah kalah dalam peperangan melawan tentara Sekutu. Dengan

¹⁶Lahir di Montasik, Aceh Besar, pada tanggal 28 Maret 1914. Setelah menyelesaikan pendidikan di beberapa dayah dan *Inlandsche School*, dia pergi ke Padang Panjang, Sumatera Barat untuk belajar di Thawalib. Di sana ia terpilih sebagai Ketua Pelajar Aceh yang didirikan oleh Ismail Yakub. Kembali ke Aceh pada tahun 1939, ia masuk PUSA dan aktif di Pemuda PUSA, kemudian menjadi seorang tokoh penting dalam organisasi kepanduan pemuda PUSA, *Kasyasyafatul Islam*. Ia mendirikan IPI/BPI yang pada bulan Oktober 1945 menjadi Pesindo. Menjabat sebagai Kepala Kantor Sosial di Kutaraja selama 1946-1949. Menjadi staf Gubernur Militer selama 1947-1949. Sebagai pejabat di Kementerian Sosial Jakarta, sebelum diangkat menjadi Gubernur Aceh pada tahun 1957. Ia juga dikenal luas sebagai sastrawan dan ulama Aceh.

Perkembangan Media Massa di Aceh

demikian, *Atjeh Sinbun* untuk terbitan tanggal 15 Agustus 1945 dibatalkan penerbitannya. Dengan kejadian itu berakhirlah riwayat surat kabar *Atjeh Sinbun* di Aceh.

BAB III

MEDIA MASSA DALAM PERJUANGAN MEMPERTAHAKAN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI ACEH

1. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di Aceh

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, bukanlah akhir perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia masih dihadapkan pada sikap ketidakpuasan kolonial Belanda terhadap hasil perjuangan bangsa Indonesia. Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia dengan melancarkan agresi militernya. Situasi menjelang Agresi Militer Belanda II ditandai suasana yang begitu menegangkan antara Indonesia dengan Belanda. Belanda dengan taktik yang licik telah menceraiberaikan Indonesia dalam bentuk beberapa negara boneka, serta “menginjak-injak” kemerdekaan Republik Indonesia melalui agresi militernya yang pertama dan kedua.¹

Presiden Sukarno dalam suatu kesempatan perlawatannya ke Aceh pada tahun 1948, mengatakan bahwa daerah Aceh adalah daerah yang tidak pernah dikuasai oleh musuh. Daerah Aceh merupakan modal utama Republik Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan.² Apa yang dikatakan oleh Presiden Sukarno, berhubungan erat dengan kenyataan bahwa satu-satunya daerah dalam wilayah negara Republik Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan yang tidak pernah dikuasai lagi oleh tentara Belanda sejak tahun 1942 adalah Aceh seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Hal ini pula yang dijadikan modal utama utusan Indonesia (Bung Hatta) dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den

¹Abdullah Ali dkk. *Sejarah Perjuangan Rakyat Aceh Dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949*. Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1985. Hlm. 330.

² *Ibid.* Hlm. 291.

Media Massa dalam Perjuangan....

Haag untuk dijadikan sebagai alasan bahwa negara Republik Indonesia masih memiliki wilayah yang bebas dari penguasaan Belanda.³

Kota-kota di Sumatera Timur yang menjadi basis pertahanan pejuang Indonesia dan tempat berpusatnya tentara Republik Indonesia sudah dikuasai oleh Belanda. Setelah menguasai kota-kota strategis, mulailah Belanda menerapkan pembentukan negara-negara boneka dengan konsepornya adalah Dr. Van Mook.

Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948 juga berdampak bagi daerah Aceh sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu disebabkan situasi agresi tersebut menyebabkan kekuasaan Dewan Pertahanan Daerah pada 20 Desember 1948 diserahkan kepada Gubernur Militer. Suatu keuntungan bagi daerah Aceh adalah karena serangan Belanda dapat dihadang di perbatasan Sumatera Utara dengan Aceh. Daerah-daerah tersebut, yaitu Langkat, Tanah Karo, dan Dairi. Daerah Aceh merupakan daerah pertahanan yang begitu potensial untuk melakukan konsolidasi dan persiapan menyerang agresor Belanda.⁴

Semua staf divisi dan satuan-satuan bawahan dipersiapkan dan dikerahkan ke perbatasan Aceh-Sumut. Pasukan yang ikut dikerahkan, yaitu satuan-satuan penjaga pantai antara Ulee Lheue-Lhoknga hingga ke Lhokseudu di Aceh Besar. Sejalan dengan kegiatan perlawanan di beberapa sektor garis depan, dilakukan pula pengungsian bahan material dan personil militer di bawah pimpinan Kapten Namploh dan Letnan Abdul Muluk Lubis. Sejumlah staf dan alat-alat penting divisi diungsikan ke Burni Bius, sebuah tempat yang dipandang strategis untuk perjuangan, yaitu kota Takengon, Aceh Tengah.

Pengungsian menyebabkan situasi dan posisi komandan berada di pedalaman, sementara satuan-satuan bawahan berada terpencar dalam

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.* Hlm. 270.

Media Massa dalam Perjuangan....

hutan belantara. Situasi yang demikian itu dibutuhkan alat penghubung di antara mereka. Kebutuhan akan alat komunikasi begitu terasa penting untuk melakukan kontak, penyusunan strategi perang, dan menentukan sasaran penyerangan.

Alat komunikasi yang dibutuhkan tentu harus disesuaikan pula dengan kondisi alam dan medan juang. Satu di antara ciri alat komunikasi yang dibutuhkan adalah mampu menjangkau wilayah yang jauh dan dapat mencapai sasaran yang tepat. Jenis alat yang dimaksud adalah pemancar radio. Oleh karena itu, pemimpin tentara Divisi X, Letkol Husin Yusuf, memerintahkan bawahannya untuk mencari perangkat radio. Tugas tersebut dipercayakan kepada Kapten Nip Karim bersama dokter Sofyan untuk berangkat ke Malaysia guna mencari pemancar radio tersebut.

Nilai strategis yang dimiliki radio adalah dapat menjangkau batas-batas yang tidak mungkin ditempuh dengan fisik manusia bahkan alat fisik lainnya. Radio juga dapat menembus blokade-blokade pasukan musuh serta dapat menangkis propaganda-propaganda yang merugikan perjuangan bangsa Indonesia.

2. Peranan Radio pada Masa Revolusi Kemerdekaan

Satu di antara modal perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan adalah alat komunikasi, yaitu radio.⁵ Radio sebagai alat komunikasi memegang peranan penting dalam menyebarluaskan informasi, melalui radio berita dapat mencapai sasarannya dengan mudah. Sifat langsung dari medium radio seperti telah dirasakan ketika Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Berita kemerdekaan dapat disiarkan ke seluruh penjuru tanah air bahkan ke seluruh penjuru dunia.

⁵ Ali dkk. *op.cit.* Hlm. 296.

Media Massa dalam Perjuangan....

Sasaran radio yang bersifat langsung itu tidak saja bermanfaat dalam keadaan perang, tetapi juga dalam keadaan damai. Selain waktu, ruang pun tidak menjadi masalah bagi siaran radio. Bagaimanapun jaraknya sasaran yang dituju dapat dicapai dengan mudah melalui siaran radio.

Begitu besar manfaat yang diambil dari siaran radio, terutama oleh bangsa Indonesia pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sebab berita kemerdekaan dapat dikumandangkan melalui siaran radio. Demikian juga pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ketika situasi genting akibat blokade Belanda dengan aksi militernya yang mengepung Republik Indonesia. Melalui siaran radio, upaya pencarian dukungan dari luar negeri dapat diperoleh bangsa Indonesia.

Menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945, Jepang berusaha menjaga secara ketat agar rakyat Indonesia tidak mendengar berita luar negeri kecuali hanya berita yang disiarkan oleh *Radio Hosokawa*, tetapi beberapa pemuda Indonesia berhasil mendengar dan mengetahui berita kekalahan Jepang. Para pejuang bangsa Indonesia kemudian mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan berbagai kegiatan dan gerakan, karena pada saat itu yang paling tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan, yaitu pada 17 Agustus 1945. Karena semua stasiun radio sejak 15 Agustus 1945, dijaga ketat oleh tentara Jepang sehingga teks proklamasi tidak dapat disiarkan langsung pada waktu dibacakan. Baru pada malam harinya, sekitar pukul 19.00 Wib dapat diudarkan melalui Radio Republik Indonesia dalam bahasa Indonesia dan Inggris.⁶

⁶Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo. *Sumbangsih Radio Rimba Raya terhadap Republik*. Banda Aceh: Badan Perpustakaan Nanggroe Aceh Darussalam, 2004. Hlm. 30.

Media Massa dalam Perjuangan....

Teks proklamasi kemerdekaan baru pada 18 Agustus 1945 dapat dikumandangkan ke luar negeri, karena satu-satunya pemancar untuk luar negeri berada di Bandung dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Usaha-usaha itu dilakukan oleh petugas-petugas yang sewaktu-waktu dapat diketahui bahkan ditembak oleh tentara Jepang. Mereka adalah para penyiar radio *Hoso Kioku*, yaitu Sakti Alamsyah dan Hasyim Rahman. Teknisnya adalah Bambang Sukijun, A. R. Rasyid, Brotokusumo, dan Hardjoprawoto dari pihak PTT.⁷

Begitu pentingnya radio sehingga dianggap perlu untuk membentuk suatu organisasi yang ideal dan efektif, karena radio media yang dapat dipergunakan secara tepat untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pada 10 September 1945, pemimpin-pemimpin radio dari seluruh Jawa mengadakan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan persoalan itu dengan pemimpin negara, Presiden Soekarno. Mereka menuntut kepada Jepang yang sudah menyerah kepada Sekutu, untuk menyerahkan semua studio radio beserta pemancar dan perlengkapannya kepada bangsa Indonesia. Akan tetapi, Jepang tidak bersedia memenuhi tuntutan itu, karena menurut Jepang sebagai akibat kekalahannya, semuanya menjadi milik Sekutu.

Pada 11 September 1945, para pemimpin radio mengadakan pertemuan terakhir. Pada pertemuan itu, tepatnya pukul 24.00 dicapai suatu kesepakatan untuk mendirikan satu organisasi radio siaran dan menentukan tindakan-tindakan yang akan diambil oleh daerah-daerah. Berdasarkan kesepakatan itu, pada 11 September 1945 ditetapkan menjadi Hari Radio Republik Indonesia (RRI).⁸

⁷T. A. Lathief Rusydi. *Dasar-Dasar Rhetorica Komunikasi dan Informasi*. Medan: Firma Rimbow, 1989. Hlm. 161.

⁸Sufi dan Agus Budi Wibowo. *Op.cit.*, hlm. 31.

Media Massa dalam Perjuangan....

Tentara Sekutu (*Allied Forces*) pada awal Oktober 1945 mulai mendarat di Jakarta dan di daerah-daerah lain. Belanda sebagai penjajah Hindia Belanda dengan kalahnya Jepang merasa berhak kembali lagi untuk menguasai Indonesia. Belanda membonceng dan menyatukan diri bersama tentara Sekutu ke Indonesia. Akibatnya, terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata dengan para pejuang Indonesia yang tidak rela menerima kedatangan Belanda kembali. Pasukan Inggris juga mendarat di Surabaya, rakyat menyambut mereka dengan pekik perjuangan. Oleh karena itu, terjadilah pertempuran yang sengit dengan Inggris yang ingin mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia dengan rakyat dan pejuang kemerdekaan yang tidak bersedia lagi dijajah oleh siapa pun.

Pada 31 Oktober 1945, komandan tentara Sekutu di Jawa Timur mengeluarkan ultimatum yang berbunyi “kalau pada tanggal 10 November 1945, pukul 06.00 pagi orang yang membunuh A.W.S. Mallaby tidak diserahkan maka angkatan darat, laut, dan udara akan dikerahkan.”⁹ Ultimatum Sekutu tidak menyebabkan rakyat Indonesia menjadi takut dan gentar, bahkan sebaliknya menjadi bertambah semangat perlawanan dan kebencian atas kesombongan Inggris tersebut. Rakyat dan pejuang tidak mau menyerahkan pembunuh A.W.S. Mallaby, sehingga pada 10 November 1945, Inggris mengerahkan segala kekuatannya di darat, laut, dan udara. Para pemuda dan pejuang di Surabaya bangkit memberikan perlawanan yang menakjubkan menghadapi tentara Inggris yang profesional dan lengkap dengan senjata modern.

Pertempuran Surabaya telah melahirkan pejuang-pejuang yang gigih dan berani, seperti Bung Tomo. Dengan gayanya yang khas melalui mikrofon radio, suara Bung Tomo berkumandang untuk membangkitkan semangat perlawanan yang gigih tanpa menyerah, bukan hanya di Surabaya, melainkan juga pengaruhnya ke seluruh tanah

⁹Rusydi. *Op.cit.*, hlm. 180.

Media Massa dalam Perjuangan....

air. Akhirnya, tentara Inggris mengundurkan diri dari Indonesia, tetapi tentara Belanda masih tetap berada di tanah air.

Belanda terus melakukan aksi dalam rangka memantapkan kekuasaannya di Indonesia. Berbagai perundingan yang dilakukan selalu merugikan bangsa Indonesia. Dengan keinginan yang begitu besar hendak berkuasa kembali di Indonesia, Belanda telah melanggar persetujuan Linggar Jati, dengan melakukan aksi militernya yang pertama pada 21 Juli 1947. Kota-kota besar termasuk Jakarta telah dikuasai kembali oleh Belanda. Untuk kepentingan propaganda, Belanda mendirikan badan siaran radio yang lebih luas, bernama *Stichting Radio Omroep in Overgangstijd* (ROIO).¹⁰

Berkat perlawanan yang gigih dan pantang menyerah dari pejuang dan rakyat dengan cara perang bergerilya, mereka dapat memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Oleh karena itu, dilaksanakan perundingan yang menghasilkan persetujuan Renville. Akan tetapi, hasil perundingan itu juga dilanggar oleh pihak Belanda dengan melakukan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948. Perjuangan bangsa Indonesia bukannya semakin melemah, tetapi semakin meningkat. Semangat mempertahankan tanah air semakin menggelora dengan terus melakukan perjuangan, baik yang bersifat perjuangan senjata maupun perjuangan politik melalui diplomasi. Upaya untuk mengatasi konflik Indonesia-Belanda banyak mengalami jalan buntu, karena Belanda selalu melakukan tindakan-tindakan curang dengan melanggar beberapa perundingan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal yang demikian dapat dilihat dari tindakan Belanda yang melakukan agresi militer pertama dan kedua, karena hampir seluruh wilayah Indonesia berhasil dikuasai oleh Belanda, kecuali Aceh. Para pemimpin negara juga ditangkap, Belanda melalui

¹⁰Sufi dan Agus BW. *Op.cit.*, hlm. 33.

Media Massa dalam Perjuangan....

siaran radio memberitakan kepada dunia luar bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi dan sudah dikuasai sepenuhnya.

Pada saat-saat genting seperti itu, hadirilah Radio Rimba Raya sebagai satu-satunya radio siaran yang tidak berhasil dikuasai oleh Belanda. Radio Rimba Raya melakukan bantahan siaran berita Belanda yang mengatakan bahwa Indonesia sudah tidak ada lagi dan sekaligus memberitahukan kepada dunia luar bahwa Indonesia masih ada.

Pertikaian antara Indonesia dengan Belanda baru barakhir setelah diadakannya Konferensi Meja Bundar (KMB)Konferensi tersebut melahirkan keputusan untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia pada 27 Desember 1949. Menjelang penyerahan kedaulatan itu, Radio Republik Indonesia (RRI) bersama radio Belanda (ROIO) mengadakan musyawarah dan sepakat untuk berfusi. Sejak 27 Desember 1949, radio siaran di Indonesia menggunakan stasiun call Radio Republik Indonesia Serikat (RRIS), kecuali studio Yagyakarta yang tetap memakai siaran call Radio Republik Indonesia (RRI).

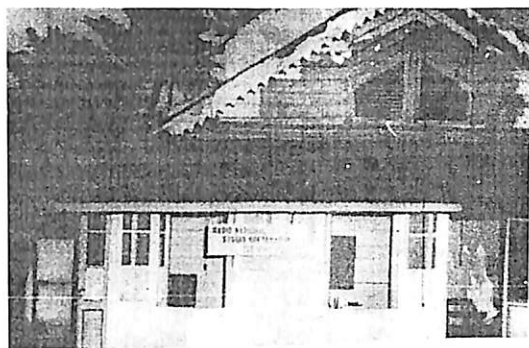
Selanjutnya, pada 15 Agustus 1950, pukul 08.05, Presiden Sukarno menyatakan bahwa seluruh Indonesia sejak hari itu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu pula kembali radio siaran di Indonesia yang terdiri atas 22 studio memakai call Radio Republik Indonesia.¹¹

1) RRI Kutaradja

Telah disebutkan sebelumnya, di antara modal perjuangan bangsa Indonesia pada masa perang mempertahankan kemerdekaan adalah alat komunikasi. Sejak awal perang kemerdekaan (1946), daerah

¹¹*Ibid.*, hlm. 34.

Media Massa dalam Perjuangan....



Kantor Pemancar Radio Kutaraja di Jalan Kraton.
Talsya II: 21

Aceh memiliki sebuah pemancar radio yang ditempatkan di Kutaraja yang dinamakan dengan Radio Republik Indonesia Kutaraja.

Cikal-bakal radio tersebut adalah radio rongsokan yang dirampas dari Jepang. Radio bekas

tersebut diperoleh atas prakarsa beberapa pemuda Aceh, seperti Tuwanku Mahmud, T. Ali Basyah Talsya, Abdul Aziz, Razali Yunus, dan Oesman Raliby, yang dipimpin oleh Said Ahmad Dahlan.¹² Setelah mereka memperoleh perangkat radio itu, mereka bekerja keras untuk merakitnya kembali.

Perangkat radio tersebut merupakan sisa-sisa radio Jepang, *Hodoka*, yang dihancurkan pada saat Jepang kalah dengan Sekutu. Penghancuran radio itu dimaksudkan oleh Jepang agar pemuda-pemuda Indonesia di Aceh tidak menggunakan radio tersebut untuk alat komunikasi.¹³ Pada masa pendudukan Jepang, radio *Hodoka* penyiarannya diselenggarakan oleh bagian penerangan Jepang. Jangkauan siarannya hanya sekitar wilayah Kutaraja. Setelah pejabat Jepang di Kutaraja (Banda Aceh) mengetahui bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu, Jepang segera menghancurkan radio *Hodoka* tersebut.¹⁴

¹²Ali, dkk. Hlm. 296 dan Amran Zamzami. *Jihad Akbar di Medan Area*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990. Hlm. 351.

¹³Sufi dan Agus BW. *Op.cit.*, hlm. 44.

¹⁴Ali dkk. *op.cit.*, hlm. 297.

Media Massa dalam Perjuangan....

Mengingat pentingnya alat komunikasi tersebut, para pemuda berusaha mencari peralatan radio yang dibutuhkan di gudang-gudang yang masih dikuasai oleh Jepang. Tindakan yang mengandung bahaya



Operator Pemancar Radio Kutaraja,
Oesman, sedang menjalankan tugasnya.
Talsya I: 291

terpaksa dilakukan karena radio tidak dapat digunakan sama sekali apabila onderdilnya tidak diganti. Untuk memperoleh alat-alat tersebut, para pemuda menyusup ke kubu-kubu pertahanan Jepang di Blang Bintang dan Lhoknga. Sebagian pemuda yang lain memasuki kampung-kampung untuk menghimpun alat-alat yang telah diambil atau berada di tangan penduduk.¹⁵

Pemancar radio berhasil dirakit kembali walaupun tidak dalam kondisi aslinya. Setelah berhasil dirakit, pada 11 Mei 1946 mulai mengudara perdana. Radio tersebut berkekuatan 25 watt, dipancarkan pada gelombang 68--73 meter, dengan jarak jangkauan siaran hanya sekitar Kutaraja.¹⁶ Studio RRI Kutaraja tidak luput dari intaian pesawat terbang Belanda. Akan tetapi, percobaan-percobaan untuk menghancurkan studio dapat digagalkan oleh barisan-barisan pasukan meriam yang ditempatkan tidak jauh dari studio RRI.¹⁷

Sejak itu, penduduk di Kutaraja dan sekitarnya sudah dapat mengikuti berbagai berita penerangan dan berita-berita yang

¹⁵*Ibid.*, hlm. 44.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 297.

¹⁷T. Ali Basyah Talsya, "Pemancar Radio Revolusi di Atjeh", dalam *Modal Revolusi 45*, (Seksi Penerangan/Dokumentasi Komite Musjawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, 1960. Hlm. 84.

Media Massa dalam Perjuangan....

mencetuskan semangat perjuangan. Selain itu, juga sudah dapat mengikuti, baik berita dari dalam maupun luar daerah.

Dalam perkembangan selajutnya, jarak jangkau yang begitu terbatas itu menyebabkan ketidakpuasan bagi para pejuang, karena tidak menjangkau daerah-daerah lain yang sedang melakukan perjuangan. Oleh karena itu, muncul inisiatif untuk memperbesar dan memperluas jarak jangkauan siaran. Pada tahun 1947, perluasan jarak jangkau siaran berhasil dilakukan berkat bantuan seorang Indo-Jerman yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Orang yang dimaksud adalah W. Schulz, yang bekerja pada Dinas Pos dan Telegram/Telepon, bersama seorang keturunan Cina, Hojok Tjam. Dengan bantuan mereka berdua, jarak jangkauan Radio Kutaraja semakin luas dengan kekuatan 100 watt, mengudara melalui gelombang 33 meter sehingga jangkauan siarannya hingga ke kota Medan dan Bukittinggi.¹⁸ Pada tahun 1947, Radio Kutaraja berubah pula namanya menjadi Pemantjar RRI Atjeh.

Bertambahnya jarak jangkau siaran membawa keuntungan bagi perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. Radio Republik Indonesia Kutaraja mempunyai kesempatan melakukan reportase kunjungan Presiden Sukarno ke Aceh. Dengan bantuan Relly di Bukittinggi dapat pula menyebarluaskan berita kunjungan Presiden Sukarno ke seluruh pelosok tanah air.

Pengembangan perluasan jarak jangkau tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi juga terus diperluas dengan cara memperbaiki dan memperbesar volume kekuatan. Perbaikan secara teknis serta bahan-bahan keperluan perbaikan diperoleh dari kubu-kubu pertahanan Jepang, yang terpaksa meninggalkan Aceh karena kekalahannya dengan Sekutu.

Berkat perjuangan dan kerja keras para pejuang, radio RRI Aceh pada 9 April 1948 menjadi 325 watt dan mengudara melalui

¹⁸Ali, dkk. *Op.cit.*, hlm. 297. Sufi dan Agus BW. *Op.cit.*, hlm. 45.

Media Massa dalam Perjuangan....

gelombang 33,5 meter. Dengan demikian, siaran RRI Aceh sudah dapat diterima siarannya di luar negeri. Ketika Dewan Keamanan PBB bersidang membicarakan masalah pertikaian antara negara Republik Indonesia dengan Belanda, Radio Republik Indonesia Aceh berulang kali mengadakan siaran. Materi yang disiarkan adalah mengenai keinginan dan tekad serta sikap Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya.¹⁹

Berbagai mosi dan resolusi disiarkan melalui RRI Aceh, terutama yang berhubungan dengan kepentingan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Isi siaran itu bahkan dapat diterima oleh Perwakilan Republik Indonesia di tempat sidang Dewan Keamanan PBB berlangsung. Dengan demikian, berita tersebut dapat dijadikan bahan-bahan yang berguna untuk dikemukakan dalam perdebatan-perdebatan yang diadakan oleh Dewan Keamanan PBB dalam membela kepentingan Indonesia.²⁰

Kampanye Belanda yang menjelek-jelekkan Indonesia di mata dunia Internasional dibantah dengan tegas oleh RRI Aceh. Pemancar RRI Aceh juga dipergunakan oleh PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) yang berkedudukan di Sumatera Tengah. Penggunaan itu dimaksudkan untuk mengirim berita-berita, menyiarkan pengumuman-pengumuman, dan instruksi-instruksi, baik yang ditujukan kepada tokoh-tokoh perjuangan bangsa Indonesia yang berada di dalam negeri maupun kepada Kepala Perwakilan Indonesia di luar negeri, seperti kepada Soedarsono di New Delhi dan N. Palar, Wakil Republik Indonesia di PBB.²¹

¹⁹ Ali dkk. *op.cit.*, hlm. 297.

²⁰ Husin Yusuf. "Prasaran Tentang Sejarah Perjuangan Pemuda di Daerah Aceh", *Seminar Perjuangan Rakyat Aceh Semenjak tahun 1873-1950*, Medan, 1967. Hlm. 18.

²¹ *Ibid.*

Media Massa dalam Perjuangan....

Adapun bahasa yang dipergunakan oleh RRI Aceh pada waktu itu, selain bahasa Indonesia juga bahasa Inggris dan bahasa Belanda.²² Pejuang-pejuang yang aktif dalam urusan penyiaran RRI Aceh pada waktu itu, antara lain T. Junaidi, Armin Lubis, dan Rajulis. Mereka berasal dari Tentara Pelajar Resimen II Aceh Divisi Sumatera. Mereka bahkan sering membuat siaran-siaran sesama pelajar di luar negeri atau dengan mengisi acara-acara kesenian, menyanyikan lagu-lagu perjuangan, dan lagu-lagu yang diciptakan oleh anggota Tentara Pelajar Indonesia sendiri.²³

2) Radio Rimba Raya

Ketika Belanda melakukan Agresi Militer II disertai dengan merebaknya propaganda-propaganda dan berita-berita kebohongan, begitu mengganggu semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Untuk menangkis semua itu, pihak Indonesia memikirkan dan berusaha menambah media informasi, karena beberapa media massa yang ada di Aceh pada waktu itu masih dirasa kurang dalam menangkis rong-rongan Belanda terhadap Indonesia.

Amran Zamzami menyebutkan bahwa Belanda mempunyai corong-corong informasi seperti koran, radio, dan media-media propaganda untuk perang urat saraf (*psywar*). Pihak Indonesia pun tidak mau kalah dari Belanda. Kesadaran pentingnya media massa, baik yang dicetak maupun melalui gelombang udara, diupayakan dengan berbagai cara oleh masyarakat Aceh guna membangkitkan semangat pejuang bangsa Indonesia.²⁴

²²Seorang penyiar dengan bahasa Belanda pada waktu itu adalah Aboe Bakar Bsf. Ali dkk. *Op.cit.*, hlm. 298.

²³Zamzami. *loc.cit.*

²⁴*Ibid.*, hlm. 347.

Media Massa dalam Perjuangan....

Dalam rangka menyebarluaskan informasi dan menangkal upaya Belanda yang mengacaukan lalu lintas berita untuk menjatuhkan semangat perjuangan para pejuang bangsa Indonesia, pihak Indonesia berusaha mendirikan Balai Penerangan dan Penyelidikan pada 17 Agustus 1946 di Medan. Badan itu bertujuan memberikan pendidikan dan penerangan kepada rakyat mengenai politik, ekonomi, kebudayaan,

dan sarana penerangan untuk memperkokoh berdirinya Republik Indonesia. Badan itu juga menyelidiki sejauh mana upaya propaganda musuh dan bagaimana cara menangkal melalui penerangan.



Major John Lie

Untuk menciptakan koordinasi dan pelacakan serta pengorganisasian informasi Balai Penerangan, seminggu sekali diadakan pertemuan dengan wartawan. Selain itu, juga melakukan pertemuan periodik dengan kekuatan sosial, seperti dengan golongan-golongan masyarakat dan militer. Sebagai upaya memperluas informasi, dikeluarkan brosur oleh balai itu yang dikemas dalam bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Brosur dalam bahasa Inggris berjudul *Free Indonesia*, terbit Mingguan untuk kebutuhan orang-orang asing. Pengelolaannya dilakukan oleh Abdul Madjid. Brosur dalam bahasa Belanda diberi nama *Vrijheid* yang dibagikan secara cuma-cuma.

Ketika Belanda melakukan agresi militer pertama pada 'ahun 1947, Pejabat Penerangan Keresidenan Aceh bersama Subpenerangan Divisi-X, mengeluarkan buletin yang terbit harian. Buletin itu diberinama "Komunike Perang", isinya tentang laporan-laporan dari medan pertempuran. Buletin itu setiap hari dicetak sebanyak 8.000

Media Massa dalam Perjuangan....

eksemplar dan dibagikan kepada masyarakat secara cuma-cuma.²⁵ Balai Penerangan dan Penyelidikan yang sama juga didirikan di Kutaraja pada 1 Februari 1946. Pendirian lembaga itu begitu penting sebagai pusat informasi untuk mengolah dan menyampaikan berita-berita demi kepentingan perjuangan. Selain itu, juga dapat mengimbangi bahkan menyaingi pemberitaan propaganda Belanda yang bertujuan melemahkan semangat juang bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya.



A.G. MUTYARA

Lembaga yang baru berdiri itu diketuai oleh Said Ahmad Dahlan, kemudian digantikan oleh Oesman Raliby. Sementara stafnya adalah T. Ali Basyah Talsya dan Tuwanku Ibrahim. Balai Penerangan kemudian secara resmi menjadi Jawatan Penerangan Keresidenan Aceh. Jawatan itu selain bertugas menangkal propaganda musuh, juga melakukan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat serta mengelola siaran RRI Aceh.

Radio RRI Aceh dan Balai Jawatan Penerangan ternyata belum mampu menjawab tantangan musuh, berupa siaran-siaran radio mereka yang merubah opini masyarakat, bahkan opini dunia tentang Indonesia. Untuk menjawab tantangan dan mengimbangi ofensif Belanda dalam menyiarkan berita-berita melalui udara, baik yang disiarkan di Batavia (Jakarta) maupun di Medan, mendorong masyarakat Indonesia yang ada di Aceh untuk menambah pemancar radio.

²⁵Sufi dan Agus Budi Wibowo. *Op.cit.*, hlm. 47.

Media Massa dalam Perjuangan....

Radio tersebut tidak didapatkan secara mudah. Pendaratan pemancar radio dari Malaysia ke Aceh melalui Tanjungpura dengan menembus blokade Belanda yang menjaga ketat sekitar selat Malaka, resiko yang begitu besar²⁶ sehingga pendaratan harus dilakukan dengan cara penyeludupan. Penyeludupan itu dilakukan agar lolos dari blokade Belanda yang sedang berjaga-jaga di perairan selat Malaka. Dalam proses penyeludupan pemancar radio itu menyebabkan 12 orang pasukan TNI dari Batalyon B di bawah pemimpin Nip Karim gugur karena berhasil ditembak oleh tentara Belanda.²⁷ Dengan gugurnya beberapa prajurit menunjukkan betapa beratnya perjuangan dalam upaya mendapatkan sebuah alat pemancar radio yang diperuntukkan bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa gugurnya para pemuda semakin menambah nilai perjuangan yang melekat pada perangkat Radio Rimba Raya. Untuk mendapatkan perangkat radio itu dibeli dengan darah dan nyawa para pemuda Indonesia dari Aceh.

Husin Yusuf meminta pula bantuan Mayor John Lie, perwira pada Angkatan Laut Republik Indonesia, yang sudah biasa menyeludupkan senjata dari Malaya untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bersama John Lie ditugasi pula 24 anggota TNI yang berada di bawah komandi Divisi X.²⁸

²⁶Dua Windu Kodam Iskandar Muda. Kutaraja: 1972. Hlm. 155--157. Zamzami. *Op.cit.*, hlm. 352.

²⁷Husin Yusuf. *Sedjarah Perdjoengan Pemuda di Daerah Atjeh Sedjak Tahun 1945 Sampai Sekarang Ini.*. Tanpa tahun penerbit, hlm. 18.

²⁸ Ali dkk. *op.cit.*, hlm. 299.

Media Massa dalam Perjuangan....



KAPT. NIP XARIM

Terlepas dari jatuhnya korban, seorang yang perlu diperhatikan adalah John Lie, dengan keahlian strategi yang dilakukannya telah memungkinkan pemancar tersebut sampai ke Aceh. Strategi yang ditempuh oleh John Lie, yaitu dengan menggunakan dua speed boat. Speed boat yang satu diisi dengan pemancar radio dan yang satu lagi diisi dengan barang-barang makanan dan kelontongan. Speed boat yang berisi bahan makanan dijadikan pancingan manakala ada pengejaran oleh musuh.

Ketika mereka berada di tengah laut dan beriringan dengan patroli Belanda, speed boat yang berisi barang dan bahan makanan dijadikan umpan dengan cara mempercepat larinya dan memisahkan diri dari speed boat yang berisi pemancar radio. Dengan demikian, seolah-olah speed boat yang berisi barang-barang tersebut lari dari kejaran tentara Belanda. Strategi yang ditempuh demikian memancing patroli Belanda dan mengejar speed boat tersebut hingga berhasil dilumpuhkan. Situasi yang demikian lalu dimanfaatkan oleh speed boat yang berisi pemancar radio untuk mempercepat laju pelayaran menuju pantai Sumatera, kemudian mendarat melalui Sungai Yu, Tamiang.²⁹ Kesempatan mencari perangkat radio ke Malaysia, juga mereka manfaatkan untuk membawa barang-barang dagangan berupa karet, pala, pinang, kopra, dan lain-lain.

²⁹Anonimus. *Peranan Radio Rimba Raya dalam Mempertahankan Kemerdekaan*. Banda Aceh: Kanwil Depdikbud, 1990, hlm. 18.

Media Massa dalam Perjuangan....

Pemancar radio yang sudah berhasil diseludupkan dari Malaysia dipasang pertama kali di Krueng Simpo yang terletak sekitar 19 km dari kota Bireuen.³⁰ Penempatan radio di Krueng Simpo semata-mata pertimbangan keamanan karena pada waktu itu pemancar tersebut belum memungkinkan dibawa ke Kutaraja. Mengingat daerah Krueng Simpo jauh dari intaian Belanda, dirasa sangat tepat mendirikan pemancar radio di sana, sementara studionya dipasang di kota Bireuen. Untuk pemasangan pemancar radio dilakukan oleh W. Schulz, seorang pegawai Dinas Pos dan Telegram/Telepon dan dibantu oleh beberapa orang pemuda yang ada di Aceh, seperti Letnan Sayuddin Thalib, Letnan R. Abdullah, Letnan Syarifuddin, dan Ramli Melayu.³¹

Ketika situasi sudah dianggap memungkinkan, atas perintah Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Teungku Muhammad Daud Beureu-eh,³² pemancar radio tersebut dipindahkan ke Kutaraja. Kutaraja sebagai ibukota dan pusat administrasi pemerintahan



Speed boat yang digunakan oleh John Lie

³⁰Talsya. *Op.cit.*, hlm. 89.

³¹Zamzami. *op.cit.*, hlm. 352.

³² Seperti telah disinggung di atas bahwa pada 21 Juli 1947, Belanda memulai gerakan penyerbuan ke daerah Republik Indonesia. Dalam waktu singkat Belanda berhasil menguasai sebagian besar wilayah Indonesia. Keadaan di Daerah Aceh sebagai akibat penyerbuan Belanda, lambat laun menjadi genting sehingga dianggap perlu mengatasi keadaan gawat itu dengan cara mempertegas tugas dan kewajiban instansi militer. Untuk itu, Wakil Presiden Republik Indonesia, Mohammad Hatta, dalam fungsinya sebagai Wakil Panglima Tertinggi Tentara Republik Indonesia, yang sedang menjalan kekuasaan Pemerintah Pusat RI untuk sementara di Sumatera menetapkan

Media Massa dalam Perjuangan....

pada waktu itu memerlukan pemancar yang memiliki kekuatan jangkauan suara yang jauh seperti yang dimiliki oleh RRI Aceh. Namun, pemindahan pemancar radio ke Kutaraja berkaitan erat dengan situasi politik pada waktu itu. Dengan adanya pemancar radio yang mampu menjangkau hingga ke luar negeri akan memudahkan bagi Gubernur Militer menyampaikan kebijakan politik demi perjuangan dan akan memudahkan pula mengetahui berita-berita perjuangan.

Belanda masih melakukan blokade-blokade terhadap wilayah Indonesia dan propaganda-propagandanya. Atas pertimbangan keamanan demi kelancaran dan keselamatan pemancar radio tersebut, sesampai di Kutaraja di pasang di Cot Gue, sekitar 8 km dari Kutaraja (kini Banda Aceh),³³ sebagai tempat pemasangan pemancar, atas pertimbangan geografis dan keamanan. Daerah Cot Gue terletak di kaki gunung Seulawah dan aman dari jangkauan musuh. Apabila daerah tersebut sewaktu-waktu diketahui oleh musuh, pemancar dengan mudah dapat dipindahkan ke gunung Seulawah melalui Peukan Bilui di Sibreh terus ke Seulimuem.

Penyiaran radio tersebut dilakukan di Kutaraja. Antara studio dan pemancar dihubungkan dengan kabel yang jaraknya sekitar 8 kilo meter. Pemasangan pemancar di Cot Gue juga dilakukan oleh W. Schulz.³⁴ Penyiaran dilakukan dengan beberapa signal calling RRI di Kutaraja yang dipancarkan pada gelombang 19 meter. Sementara gelombang pancaran lainnya menggunakan signal calling Radio Rimba

dalam keputusannya No. 3/BPKU/47, tanggal Bukit Tinggi 26 Agustus 1947, daerah Keresidenan Aceh, Langkat dan Tanah Karo sebagai Daerah Militer. Melalui kawat diberitahukan pengangkatan Teungku Muhammad Daud Beureu-e sebagai gubernur militer dengan pangkat Jenderal Mayor Tituler. S. M. Amin. *Kenang-Kenangan Dari Masa Lampau*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978. Hlm. 40.

³³Talsya. *Op.cit.*, hlm. 89. Ali dkk. *Op.cit.*, hlm. 301.

³⁴*Ibid.*

Media Massa dalam Perjuangan....

Raya dan Radio Tentara Divisi X. Signal calling Radio Rimba Raya dipancarkan pada gelombang 61 meter.³⁵ Penyiaran Radio Rimba Raya di Kutaraja dikelola oleh Bagian Penerangan Tentara Divisi X, dikepalai oleh A. G. Mutyara.³⁶

Sehari setelah pecahnya Agresi Militer Belanda II, tepatnya pada 20 Desember 1948, pemancar Radio Rimba Raya terpaksa harus dipindahkan ke daerah lain yang lebih aman dari jangkauan musuh. Pemandahan itu juga dilakukan atas perintah Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Teungku Muhammad Daud Beureu-eh. Rencana semula akan dipindahkan ke Burni Bius dekat Takengon. Akan tetapi, rencana itu tidak terwujud karena situasi keamanan yang belum memungkinkan.

Melihat situasi yang tidak aman, Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Jenderal Mayor Tituler Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, mengundang seluruh pembesar sipil, militer, dan tokoh masyarakat untuk menghadiri rapat khusus pada 19 Desember 1948 di Kutaraja. Ada tiga keputusan penting yang berhasil disepakati, yaitu *pertama*, rakyat Aceh tetap loyal kepada Republik Indonesia yang diproklamsikan pada 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila, pemimpin Sukarno-Hatta. *Kedua*, sebagai konsekuensi logis dari kebulatan tekad di atas, seluruh rakyat Aceh dihimbau untuk Perang Sabil mengusir penjajah Belanda dari bumi pertiwi. *Ketiga*, Radio Rimba Raya harus difungsikan kembali di daratan tinggi pegunungan Aceh Tengah untuk mengisi kekosongan siaran RRI Pusat melawan propaganda Belanda.³⁷

³⁵Yusuf. *Op.it.*, hlm. 19.

³⁶Ali, dkk. *op.cit.*, hlm. 301.

³⁷Sufi dan Agus BW. *Op.cit.*, hlm. 53.

Media Massa dalam Perjuangan....

Pada malam hari itu juga keluar instruksi Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Teungku Muhammad Daud Beureueh, supaya pemancar Radio Rimba Raya di Cot Gue segera dibawa kembali ke pegunungan Aceh Tengah. Sejumlah pasukan khusus Divisi X melarikannya ke Rong-Ronga di Rimba Raya, Aceh Tengah (setelah Aceh Tengah dimekarkan, daerah Rimba Raya masuk wilayah



Pemancar Radio Rimba Raya

Kabupaten Bener Meriah). Pada 20 Desember 1948, malam harinya sudah mulai beroperasi kembali. Siaran pertama yang dipancarkan adalah instruksi Gubernur Militer, Teungku Muhammad Daud Beureueh, yang memberlakukan mobilisasi umum terhadap seluruh penduduk yang sudah dewasa.³⁸

Pemindahan pemancar radio dari Kutaraja ke tempat-tempat yang direncanakan selalu diintai dan dibayang-bayangi oleh Belanda. Iring-iringan kendaraan yang membawa pemancar radio selalu diburu oleh pesawat terbang Belanda. Tentara Belanda dengan pesawat terbangnya melakukan penerbangan rendah mengejar truk-truk yang membawa pemancar radio.

Akibat pengejaran dari pihak musuh menyebabkan truk yang mengangkut pemancar radio harus menyingkir dan menyusup ke dalam hutan, berlindung dalam semak-semak belukar. Rimbunnya hutan Aceh Tengah sangat membantu persembunyian mereka dari intaian musuh sehingga musuh selalu kehilangan jejak. Atas pertimbangan situasi yang

³⁸A.K Jacobi. "Radio Rimba Raya, Jubir Revolusi", *Harian Serambi Indonesia*, 19 Desember 1995.

Media Massa dalam Perjuangan....

tidak menguntungkan serta pengawasan dari musuh yang begitu ketat sehingga rencana pemasangan di Burni Bius terpaksa dibatalkan. Adapun yang menjadi sopir mobil yang membawa pemancar radio itu bernama Abbas atau lebih populer dengan nama Kapiten Abbas.³⁹

Setelah mendapat nasehat dari Kolonel Husin Yusuf dan W. Schulz, yang disampaikan kepada Gubernur Militer, Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, pemasangan pemancar radio di Burni Bius dibatalkan. Keputusan itu dilakukan atas analisis strategis dan perhitungan secara teknis karena situasi yang tidak menguntungkan serta upaya mengelak dari intaian Belanda. Atas dasar pertimbangan itulah pemancar tersebut dipasang di Rimba Raya, seperti sudah disebutkan sebelumnya.

Daerah Rimba Raya terletak dekat Ronga-Ronga, Kabupaten Bener Meriah sekarang. Lokasinya tidak jauh dari jalan Bireun-Takengon. Dari Bireuen ke Rimba Raya tempat pemasangan pemancar radio itu berjarak sekitar 62 km. Pada waktu itu kawasan Rimba Raya merupakan daerah yang rimbun dengan pohon yang lebat dan kaya dengan marga satwa. Hutan belantara itu kemudian berubah menjadi sebuah ladang yang luas dan tempat permukiman.

Untuk pemasangan Radio Rimba Raya masih tetap dilakukan oleh W. Schulz dan dibantu oleh Ramli Melayu, Syamsuddin, Letnan Syarifuddin, dan Letnan R. Abdullah.⁴⁰ Pada saat pemasangan pemancar mengalami kendala karena belum ada mesin listrik dan tidak cukup kabel sehingga proses penyiaran tidak dapat dilakukan. Mengingat pentingnya mesin listrik untuk menghidupkan siaran radio, berbagai cara diupayakan pencarian listrik dan kabel. Pencarian perangkat listrik itu dilakukan oleh Umi Salamah (istri Kolonel Husin Yusuf) dengan

³⁹Yusuf. *op.cit.*, hlm. 19.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 19.

Media Massa dalam Perjuangan....

menghabiskan waktu yang lama dan begitu melelahkan. Akhirnya mesin listrik ia dapatkan di Kuala Simpang dan langsung dibawa ke Rimba Raya, Aceh Tengah pada waktu itu.

Pemancar yang baru dipasang belum dikenal luas oleh masyarakat karena memang pemasangannya sangat rahasia agar tidak diketahui oleh musuh. Penyiaran Radio Rimba Raya menggunakan sinyal calling Sumatera, Radio Republik Indonesia yang mengudara pada gelombang pancaran 19 meter, dan Suara Indonesia Merdeka yang mengudara pada gelombang pancaran 25 meter. Untuk signal calling RRI Aceh dipakai gelombang 61 meter⁴¹ sehingga di luar negeri dapat diterima siarannya.

Sesuai dengan misinya sebagai pengemban amanah perjuangan bangsa, pengelolaan Radio Rimba Raya diserahkan kepada militer, di bawah Bidang Penerangan Militer Divisi X. Penyerahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan kepada militer erat kaitannya dengan situasi dan kondisi yang masih dalam suasana belum aman. Dari segi kepentingan, Radio Rimba Raya begitu diperlukan untuk keperluan perjuangan melawan Belanda dan untuk mengadakan kontak dan hubungan dengan para tentara divisi yang tersebar dalam hutan dengan tempat yang saling berjauhan.

Kolonel Husin Yusuf dipercayakan untuk memimpin langsung administrasi pengelolaan pemancar Radio Rimba Raya, sedangkan masalah penyiaran ditangani oleh Kepala Penerangan Tentara Divisi X, Kapten A. Gani Mutyara. Untuk melengkapi kerabat kerja, Radio Rimba Raya menarik beberapa tenaga kerja yang dianggap perlu dan memiliki kemampuan tentang kegiatan penyiaran dari instansi-instansi lain.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 302.

Media Massa dalam Perjuangan....



A.G. Mutyara dan Talsya sedang menyusun berita untuk disiarkan oleh Radio Rimba Raya Talsya III: 125

Pada 19 Desember 1948, diangkat pula beberapa tenaga untuk melengkapi kerabat kerja Radio Rimba Raya. Pengangkatan itu secara resmi dilakukan dengan surat penetapan No. DX/309/AP/1948. Komandan Angkatan Perang Divisi X TNI menetapkan Teuku Ali Basyah Talsya dan Abdullah Arif

dengan pangkat Letnan II TNI untuk bertugas pada penerangan divisi. Kepala penerangan divisi selanjutnya melimpahkan kekuasaan penyelenggaraan penyiaran kepada Letnan Abdullah Arif.⁴²

Orang yang bekerja pada jajaran Radio Rimba Raya, baik sebagai teknisi maupun sebagai penyiar dan keamanan tidak hanya terbatas dari orang Aceh, tetapi juga berasal dari berbagai daerah dan terdiri atas berbagai suku bangsa, bahkan dari bangsa asing. Dilihat dari sudut pandang orang yang bekerja di jajaran Radio Rimba Raya, dapat dikatakan bahwa Radio Rimba Raya adalah radio yang berskala nasional bahkan internasional.

Personil yang bekerja pada Radio Rimba Raya terdiri atas tenaga pemimpin, penyiar, teknisi, tenaga administrasi, dan sopir. Pembagian tugas kepada personil yang bekerja pada Radio Rimba Raya tidak begitu ketat. Di antara mereka ada yang merangkap tugas, seperti Letnan W. Sumampaw yang tugas pokoknya sebagai Kepala Keamanan, tetapi juga merangkap sebagai penyiar dalam bahasa Ambon dan

⁴²T. Ali Basyah Talsya. "Peranan Radio Rimba Raya dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia", dalam *Majalah Sinar Darussalam*, Banda Aceh, 1986. Hlm. 155.

Media Massa dalam Perjuangan....

Menado. Personil yang berasal dari bangsa asing, yaitu Letnan Abdullah (mantan militer Inggris, tugasnya sebagai penyiar dalam bahasa Inggris), Letnan Candra (berkebangsaan India yang bertugas sebagai penyiar dalam bahasa Urdu), Letnan Nargis (berkebangsaan India, mantan militer Inggris), W. Schulz (keturunan Indo-Jerman, sebagai kepala teknisi), dan Wung Fei (keturunan Cina yang bertugas sebagai penyiar bahasa Cina). Barisan pemimpin Radio Rimba Raya semuanya berkebangsaan Indonesia, mereka adalah Kolonel Husin Yusuf sebagai pembina sekaligus merangkap editor, Teungku H. Affan juga sebagai pembina, Abdullah Arif sebagai pembina merangkap editor bahasa Aceh, dan Letnan Syarifuddin sebagai wakil ketua sekretaris merangkap sebagai penyiar dalam bahasa Indonesia, bahasa Belanda, dan stenografi.

Adapun yang duduk sebagai penyiar adalah Sersan Mayor Aziz Adli dan Rulamsyah sebagai penyiar dalam bahasa Indonesia dan lagu-lagu, Syamsuddin Rauf sebagai penyiar dalam bahasa Indonesia, dakwah Islam, telegrafis, dan PTT. Ramli Melayu bertugas sebagai penyiar dalam bahasa Indonesia, menyusun lagu-lagu, warta berita, telegrafis PTT, dan komentator. M. Idris bertugas sebagai penyiar bahasa Arab, Inggris transliter bahasa Indonesia, Arab, Urdu, warta berita, dan komentator bahasa asing. M. Agus Gani sebagai penyiar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan transliter Indonesia-Inggris dan Belanda.⁴³

⁴³ Ali dkk. *op.cit.*, hlm. 302.

Media Massa dalam Perjuangan....



Umi Salamah Husin Yusuf

Bagian teknisi yang mengurus masalah teknis mengudaranya Radio Rimba Raya, yaitu sebagai ketua dijabat oleh W. Schulz, dibantu oleh Letnan Raden Abdullah sebagai wakil teknisi. Pada bagian mesin, sebagai kepala juru mesin, yaitu Hanif Mohan dibantu oleh M. Jalil dan Kopral M. Saleh. Pada bidang administrasi dikepalai oleh Amiruddin dari bagian penerangan militer. Selain itu, Umi Salamah (istri Kolonel Husin Yusuf)

menjabat sebagai penghubung, dan M. Husen bertugas sebagai sopir.

Penyiaran Radio Rimba Raya mengudara mulai pada pukul 16.00 Wib. Tahap pertama mulai pukul 16.00-18.00, kegiatannya mengadakan hubungan telegraf dengan stasiun pemancar-pemancar gerilya di dalam dan di luar kota yang dikuasai oleh Belanda. Hal yang demikian penting dilakukan untuk mengetahui keadaan dan perkembangan perjuangan bangsa Indonesia di medan pertempuran. Mulai pukul 19.00--21.00, mengadakan siaran dalam negeri untuk kepentingan masyarakat di dalam negeri dengan menggunakan calling signal suara Republik Indonesia. Mulai pukul 21.00--23.00, mengadakan siaran khusus ke luar negeri. Hal itu sangat penting bagi kepentingan perjuangan diplomasi oleh utusan-utusan Indonesia di luar negeri. Selanjutnya, untuk memberitahukan kepada dunia luar bahwa sesungguhnya negara Republik Indonesia masih ada. Mulai pukul 23.00--24.00 Wib, mengadakan siaran khusus ke garis depan dengan menggunakan calling signal Suara Indonesia Merdeka. Mulai pukul 24.00 hingga pagi diadakan hubungan telepon dengan perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengenai situasi dan

Media Massa dalam Perjuangan....

kendala-kendala yang dihadapi dalam perjuangan di dalam dan luar negeri.⁴⁴

Hubungan radio telepon dengan perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dimaksudkan pula untuk saling memberi dan menerima informasi. Radio Rimba Raya memberitahukan kepada perwakilan Indonesia di luar negeri tentang kebutuhan-kebutuhan perang yang diperlukan oleh para pejuang di dalam negeri. Penyampaian informasi ke luar negeri dilakukan dalam bahasa-bahasa simbol, sedangkan maksud yang sesungguhnya adalah kebutuhan-kebutuhan perang, seperti mesin-mesin perang.⁴⁵

Hubungan dengan luar negeri, Radio Rimba Raya begitu besar peranannya dalam hal mengadakan kontak dengan luar negeri pada waktu itu karena hanya dapat dilakukan melalui Aceh, daerah-daerah lain hampir semuanya dikuasai oleh Belanda. Hal demikian seperti diakui oleh Sudarsono, seorang tokoh diplomat pada waktu itu. Sudarsono mengatakan bahwa hubungannya dengan Indonesia dilakukan dengan menggunakan radio melalui Aceh.⁴⁶

Radio Rimba Raya hampir setiap hari melakukan hubungan dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Berita-berita yang dikirim selain diterima langsung oleh petugas sandi yang bertugas pada perwakilan Republik Indonesia di New Delhi, juga dikutip oleh ALL India Radio, yang kemudian disampaikan ke alamat yang dituju. Kantor perwakilan Republik Indonesia di India pada waktu itu terletak di Aurhugset No. 14 New Delhi, yaitu rumah milik seorang sultan di India yang selalu mendapat informasi mengenai situasi di Indonesia yang diberitakan oleh Radio Rimba Raya.

⁴⁴Sufi dan Agus Budi Wibowo. *op. cit.*, hlm. 60-61.

⁴⁵Talsya. "Peranan Radio...*op.cit.*, hlm. 156.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 159.

Media Massa dalam Perjuangan....



Kegiatan penyusunan berita untuk Radio Rimba, tampak Talsya dan staf. Talsya II: 464

Belanda terus-menerus melakukan propaganda-propaganda melalui siaran-siaran radio yang mereka kuasai, surat kabar mereka begitu merugikan bangsa Indonesia. Melalui siaran radio Belanda yang berada di Medan, Batavia, dan Hilversum di Belanda. Belanda terus saja membeberkan kelemahan dan kejelekan bangsa Indonesia dalam

medan pertempuran. Selain itu, mereka juga mengacaukan strategi perjuangan bangsa Indonesia dan menyampaikan berita-berita yang menghina bangsa Indonesia.

Ketika Yogyakarta dikuasai oleh Belanda pada 20 Desember 1948, menyebabkan Indonesia kehilangan ibu kota negara. Yogyakarta merupakan suatu daerah yang memiliki arti penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sehingga dijuluki oleh Presiden Sukarno dengan “setangkai payung” untuk Yogyakarta dan Aceh. Setelah jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda, seluruh fasilitas dalam kota itu termasuk RRI Yogyakarta dikuasai oleh Belanda. Dalam situasi seperti itu, tampil Radio Rimba Raya sebagai modal perjuangan yang dapat membantah semua propaganda yang dilancarkan oleh Belanda. Hal itu dimungkinkan karena setelah Yogyakarta dikuasai oleh Belanda, tinggallah Aceh sebagai satu-satunya daerah yang menjadi basis pertahanan untuk menyusun kekuatan dan strategi perjuangan melalui informasi.

Dalam situasi genting tersebut, Radio Rimba Raya telah memainkan peranan penting dalam upaya mengobarkan dan membangkitkan semangat perjuangan, terutama bagi mereka yang berada di garis depan medan pertempuran. Penyiaran yang menyangkut

Media Massa dalam Perjuangan....

dengan strategi perang disampaikan dalam bahasa simbol yang diambil dari bahasa Aceh. Penggunaan bahasa simbol terpaksa digunakan, supaya tidak dapat diketahui dan dimengerti oleh musuh. Satu di antara simbol perjuangan yang dilansirkan dalam bahasa Aceh adalah *udeep saree matee cahid*. Penggunaan semboyan dalam bahasa Aceh kemudian dilarang oleh Husin Yusuf karena dikhawatirkan Belanda akan memonitor posisi Radio Rimba Raya.⁴⁷

Perjuangan Radio Rimba Raya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia telah menempatkan diri sebagai alat perjuangan yang berfungsi mengkanter propaganda dengan cara melawan siaran-siaran radio Belanda dan menjelaskan kebrutalan penjajahan Belanda di berbagai pelosok negeri. Selain itu, juga mengungkapkan kekalahan mereka di berbagai sektor pertempuran sebagai masukan bagi para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan.

Pemerintah Darurat Republik Indonesia melalui siaran radionya yang ditempatkan di Suliki, Sumatera Barat, selalu menyampaikan berita-berita tentang keberadaan Indonesia kepada dunia luar. Radio Rimba Raya mengadakan hubungan langsung dengan Radio Pemerintah Darurat Republik Indonesia tersebut. Radio PDRI di Sumatera Barat diasuh oleh Letnan Udara Dick Tamimy. Hubungan Radio Rimba Raya dengan Suliki, Sumatera Barat, yaitu dalam hal merelai pidato-pidato pemimpin pemerintahan, penerangan-penerangan, usulan-usulan atau komentar yang mencetuskan dan membangkitkan semangat nasionalisme. Selain itu, juga menyiarkan warta berita nasional dan berita luar negeri.⁴⁸

⁴⁷H. Dailamu. "Peranan Radio Rimba Raya Dalam Perjuangan Kemerdekaan RI". *Sinar Darussalam*, Banda Aceh, 1986, hlm. 136.

⁴⁸Ali, dkk. *Op.cit.*, hlm. 303. Zamzami. *Op.cit.*, hlm. 352.

Media Massa dalam Perjuangan....

Radio Rimba Raya digunakan pula untuk membuat kontak komunikasi dengan tokoh-tokoh pejuang militer dan diplomasi, seperti hubungan dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan wakilnya T.B. Simatupang di Jawa. Perlawanan militer yang dipimpin oleh keduanya beserta pengikutnya membutuhkan informasi dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Hubungan yang dilakukan oleh Radio Rimba Raya erat kaitannya dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh para pejuang di Jawa. Radio Rimba Raya pada waktu itu berperan sebagai saluran resmi Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam rangka menyampaikan interupsi-interupsi Pemerintah Darurat Republik Indonesia kepada para pejuang serta kepada Komisariat Pemerintah Pusat di Jawa.

Pada awal April 1949, Ketua PDRI, Mr. Amir Syarifuddin Prawiranegara bersama Menteri Agama, K.H. Mansyur berada di daerah Aceh dan menyampaikan pidato di Radio Perjuangan Rimba Raya. Isi pidato Menteri Agama tetap mengobarkan semangat perang sabil. Pidato K.H. Mansyur sempat pula direkam oleh Radio Birma di Rangoon.⁴⁹

Komunikasi dan saling tukar informasi antara Radio Pemerintah Darurat Republik Indonesia dengan daerah begitu penting artinya untuk memperlancar perjuangan dan menjadi kerangka dasar dalam menyusun strategi dan taktik perjuangan selanjutnya. Kontak antara daerah dengan pusat dan sebaliknya sangat membantu dalam memperkuat koordinasi dan memperkokoh keberadaan bangsa Indonesia. Pemberitaan yang objektif oleh pemuda Indonesia akan menambah kepercayaan dan semangat rakyat serta para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Rakyat semakin mengakui keadaan sesungguhnya tentang Indonesia, ketimbang mendengar dari siaran-siaran musuh yang penuh dengan propaganda dan kebohongan-kebohongan demi menjaga kepentingannya.

⁴⁹Jacobi, *Op.cit.*, hlm. 4.

Media Massa dalam Perjuangan....

Radio Rimba Raya juga berperan dalam menyampaikan intruksi-intruksi dari pemimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Hal itu dapat diperhatikan dari proses perpindahan Mr. Syarifuddin Prawiranegara yang berkedudukan di Sumatera Barat ke Kutaraja, disampaikan oleh siaran Radio Rimba Raya kepada perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia di luar negeri yang mendengar pemberitahuan itu, antara lain Sudarsono di India dan L.N. Palar di PBB.⁵⁰

Peranan yang dimainkan oleh Radio Rimba Raya begitu penting artinya bagi mereka yang berada di luar negeri dalam rangka meyakinkan negara-negara luar terhadap perjuangan dan kemerdekaan Indonesia. Berita perjuangan dan perkembangan dalam negeri menjadi landasan dalam berbagai kebijakan yang diambil para diplomat di luar negeri, baik kemajuan perjuangan secara fisik maupun perjuangan diplomasi. Dari hasil pemberitaan Radio Rimba Raya tentang situasi dan kondisi Republik Indonesia, L.N. Palar di PBB secara tegas mengatakan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih utuh. Melalui siaran radio itu pula ia dengan berani membantah propaganda Belanda yang mengatakan bahwa Belanda telah berhasil menguasai Indonesia kembali.

Ketika berlangsung Konferensi Asia yang membahas tentang Indonesia pada 20--23 Januari 1949 di New Delhi, Radio Rimba Raya melakukan kerja ekstra dengan menambahkan jam siaran. Hal dimaksudkan untuk menyampaikan berita-berita yang berkenaan dengan situasi dan kondisi politik dan ekonomi Indonesia kepada wakil-wakil Indonesia yang menghadiri konferensi tersebut. Gambaran tentang peta politik dan ekonomi begitu dibutuhkan sebagai bahan masukan bagi para wakil Indonesia di konferensi. Selain itu, Radio Rimba Raya terus

⁵⁰ Ali dkk. *op.cit.*, hlm. 303.

Media Massa dalam Perjuangan....

memantau perkembangan perjalanan sidang konferensi tersebut sebagai bahan masukan bagi pejuang dan rakyat Indonesia dalam negeri.

Politik yang dimainkan oleh Radio Rimba Raya, baik bagi dalam negeri maupun ke luar negeri terlihat sejak berlangsungnya Agresi Militer Belanda II hingga terjadinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Keberhasilan perjuangan tidak hanya didukung oleh politik semata, tetapi juga keberhasilan sebuah perjuangan sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Di samping faktor politik yang lebih dominan, faktor ekonomi juga begitu menentukan arah jalannya perjuangan. Dukungan ekonomi penting artinya, terutama untuk perbekalan perang sebagai kebutuhan hidup sehari-hari bagi para pejuang. Kebutuhan primer dalam perjuangan biasanya diperoleh melalui sumbangan masyarakat. Kebutuhan lain yang juga penting adalah berupa perbelakan senjata dan peluru. Persenjataan perang dan transportasi untuk perjuangan juga diperoleh dari sumbangan masyarakat dalam bentuk barang-barang yang dapat dijual untuk membeli senjata. Terkumpulnya dana dari masyarakat bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, apalagi dalam situasi peperangan. Untuk itu, tergantung dari pendekatan, penerangan, dan penjelasan yang disampaikan kepada masyarakat. Hubungan yang bersifat tatap muka begitu sulit dilakukan pada waktu itu, apalagi dalam suasana kekacauan akibat peperangan. Kesulitan tersebut hanya dapat diatasi melalui media cetak dan elektronik.

Radio Rimba raya juga ikut ambil bagian dalam upaya pengumpulan dana dari masyarakat. Peranan yang dilakukan oleh Radio Rimba Raya tidak terlepas dari fungsinya sebagai media perjuangan. Radio Rimba Raya mengimbau kepada masyarakat melalui siarannya untuk membantu perjuangan, baik yang sedang berlangsung di Aceh maupun yang sedang terjadi di daerah lain di Indonesia. Radio Rimba Raya menyiarkan berita-berita tentang kegiatan perekonomian perang, baik berupa pemasukan dana dari masyarakat maupun pemasukan dana

Media Massa dalam Perjuangan....

dari luar negeri. Informasi yang disiarkan begitu penting sebagai bahan untuk mempertanggungjawabkan kepada penyumbang dana dan untuk memotivasi para dermawan. Keterbukaan informasi tentang keuangan mengandung nilai psikologis bagi orang yang memberikan sumbangan.

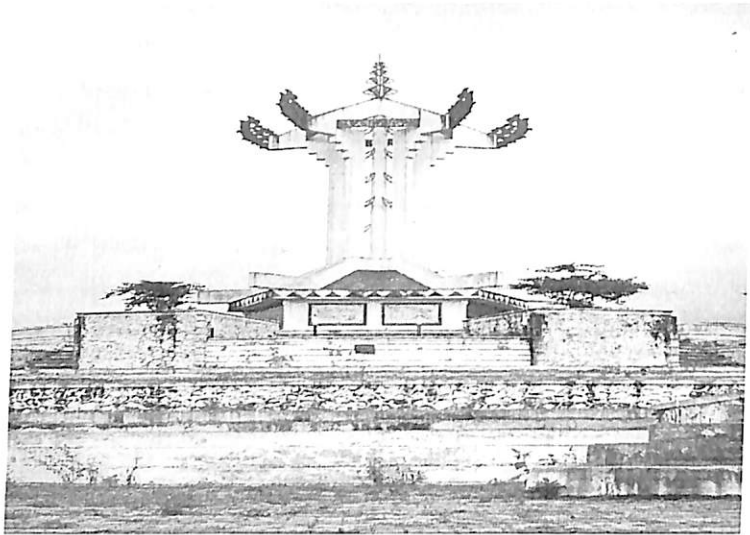
Informasi tentang neraca keuangan sangat membantu para pejuang dan pemimpin perang dalam mengatur penggunaan keuangan supaya sesuai dengan kebutuhan dan persediaan dana. Dari segi politis akan memberikan semangat kepada para prajurit bahwa mereka tidak akan lapar walaupun di hutan bergerilya. Makna politis lainnya, pihak musuh akan merasa takut dan tidak berani dengan sembarangan menyerang Republik Indonesia. Hal itu disebabkan para pejuang Indonesia didukung dan dibiayai oleh seluruh lapisan masyarakat yang terkenal dengan perang rakyat semesta.

Radio Rimba Raya juga berperan sebagai pengatur teknis pengambilan pesawat terbang sumbangan rakyat Aceh kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai modal perjuangan bangsa Indonesia. Pada waktu itu pesawat terbang berada di Rangoon (Birma) untuk diterbangkan ke Aceh. Dalam rangka upaya penerbangannya, sebelumnya harus diberitahukan kepada petugas di Aceh. Radio Birma mengadakan kontak langsung dengan Radio Rimba Raya. Sehubungan dengan keperluan itu, AURI menugasi Sarsono dari pegawai Pos dan Telegram/Telkom untuk menerima dan memberi berita.

Berdasarkan berita dari Radio Birma kepada Radio Rimba Raya, Residen Aceh, Teuku Chik Muhammad Daud Syah, memberitahukan kepada Ali Hasjmy selaku pemimpin Divisi Rencong Ksatria Pesindo untuk mempersiapkan lapangan udara Blang Bintang sebagai tempat pendaratan pesawat tersebut. Penerbangan pesawat dilakukan dengan begitu hati-hati agar tidak kedengaran oleh musuh. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan dari pesawat musuh, pesawat itu dibawa pulang pada malam hari. Ketika pesawat sudah

Media Massa dalam Perjuangan....

berada di Blang Bintang, para prajurit dan laskar-laskar rakyat menyambut dengan gembira dan penuh rasa haru.



Tugu Radio Rimba Raya
di Rimba Raya Kabupaten Bener Meriah

Radio Rimba Raya begitu besar perannya dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui Radio Rimba Raya, berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan sampai ke lur negeri. Berkat jasa dan peranan Radio Rimba Raya, para pemimpin bangsa, baik yang berada di tanah air maupun di luar negeri dapat menjalankan misinya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Mereka dengan mudah dapat menyampaikan pesan, instruksi, dan sebagainya melalui Radio Rimba Raya.

3. Peranan Media Cetak pada Masa Revolusi Kemerdekaan

Beberapa sisa perlengkapan penerbitan *Atjeh Sinbun*, dimanfaatkan oleh pejuang-pejuang Aceh untuk menerbitkan surat kabar *Semangat Merdeka* di Kutaraja pada awal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan berakhirnya kekuasaan Jepang pada bulan Agustus 1945 karena dikalahkan oleh pihak Sekutu, berakhir pula riwayat surat kabar *Atjeh Sinbun* di Aceh. Suatu tahap baru dalam perkembangan masyarakat Indonesia, yaitu alam kemerdekaan yang bebas dari tekanan pihak penjajah, juga mewarnai kehidupan pers di Aceh. Inisiatif baru untuk mendirikan suatu media massa sepenuhnya berada pada tangan orang-orang yang pernah bekerja pada surat kabar *Atjeh Sinbun* masa pendudukan Jepang.⁵¹



Kantor Surat Kabar Semangat Merdeka di Kutaraja (Banda Aceh)

Pergantian kekuasaan dari pemerintah pendudukan Jepang ke orang-orang Indonesia setelah kekalahan Jepang dari Sekutu, tidaklah terjadi dengan begitu saja, akan tetapi proses yang demikian membutuh

⁵¹*Ibid.*, hlm. 112.

Media Massa dalam Perjuangan....



Surat kabar Semangat Merdeka

waktu beberapa hari bahkan bulan. Ada periode vakum antara masa kalahnya Jepang dengan terbentuknya kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia di Aceh. Periode itu walaupun begitu singkat, akan tetapi membingungkan orang-orang karena sulit memprediksikan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Demikian pula halnya dalam bidang pers, orang-orang tidak langsung mendirikan surat kabar-surat kabar yang lepas dari kekuasaan Jepang dan bercorakkan Nasional Indonesia, hal itu dapat dimaklumi karena keadaan yang serba belum menentu.

Suatu kegiatan yang perlu dicatat bahwa para redaktur dan karyawan *Atjeh Sinbun* di bawah pimpinan Ali Hasjmy setelah mendengar adanya berita proklamasi kemerdekaan dari Jakarta, mereka merebut kantor *Atjeh Sinbun* dan melakukan upacara pengibaran bendera merah putih.⁵²

Pada zaman kemerdekaan surat kabar pertama yang lahir di Aceh adalah *Semangat Merdeka*. Pendiri surat kabar itu adalah mantan tenaga-tenaga terampil yang selama berlangsungnya kekuasaan Jepang bekerja pada *Atjeh Sinbun*. Semua pengalaman yang mereka peroleh waktu bekerja pada *Atjeh Sinbun* dipergunakan dalam usaha menerbitkan surat kabar *Semangat Merdeka*.

Sama halnya dengan adanya kevakuman dalam bidang pemerintahan di Aceh setelah menyerahnya Jepang kepada Sekutu, dalam kegiatan pers juga mengalami hal yang serupa. Setelah *Atjeh Sinbun* tidak terbit lagi, juga terdapat kevakuman penerbitan surat kabar

⁵²*Ibid.*, hlm. 112.

Media Massa dalam Perjuangan....



Parada Harahap dari Kementerian Penerangan RI mengunjungi kantor surat kabar Semangat Merdeka. Talsya II: 100

di Aceh, karena harian *Semangat Merdeka* tidak langsung terbit begitu *Atjeh Sinbun* berhenti terbit. Walaupun periode kekosongan pers di Aceh tidak begitu lama, tetapi begitu menentukan dalam perkembangan masyarakat Indonesia. Hal itu disebabkan pada periode itu adalah suatu masa pancaroba,

karena dunia penuh dengan perubahan-perubahan akibat kekalahan Jepang dalam menghadapi Sekutu. Berita-berita penting begitu banyak yang perlu disebarluaskan kepada masyarakat, sedangkan media penyebarannya belum ada. Untuk mengatasi kesulitan itu, beberapa tokoh mantan redaktur *Atjeh Sinbun* berusaha menyebarkan berita-berita penting dengan cara membuat selebaran-selebaran yang distensil, berisi peristiwa-peristiwa penting dan kemudian disebarluaskan kepada masyarakat.⁵³

Suatu hal yang perlu juga diperhatikan bahwa pada masa masih terbitnya *Atjeh Sinbun*, kantor itu juga merupakan suatu tempat yang dipergunakan oleh tokoh-tokoh perjuangan di daerah Aceh sebagai pos tidak resmi para pemimpin perjuangan. Di tempat itu, mereka dapat bertemu untuk saling bertukar pikiran mengenai perkembangan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah adanya berita proklamasi kemerdekaan dan *Atjeh Sinbun* tidak diterbitkan lagi, para pejuang masih saja mengunjungi tempat itu dan melalui para pejuang itulah berita-berita hasil distensil banyak disebarluaskan ke daerah-daerah.

Surat kabar *Semangat Merdeka* yang diterbitkan pertama kali pada 18 Oktober 1945, mempunyai peranan penting dalam

⁵³ *Ibid.*, hlm. 113

Media Massa dalam Perjuangan....

meyampaikan informasi-informasi tentang perkembangan pembentukan Negara Republik Indonesia. Selain itu, juga berita mengenai keadaan perjuangan bangsa Indonesia dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan.

Penerbitan surat kabar *Semangat Merdeka* untuk pertama kali dengan mempergunakan sisa bahan-bahan yang ada dari persediaan penerbitan surat kabar *Atjeh Sinbun*. Sisa kertas yang dapat dipergunakan untuk penerbitan *Semangat Merdeka* cukup untuk kebutuhan dua hari saja. Untuk penerbitan hari-hari berikutnya terpaksa harus mempergunakan kertas yang mutunya rendah yang dipesan dari Pematang Siantar. Oleh karenanya, mengakibatkan surat kabar *Semangat Merdeka* hanya dapat dicetak pada sebelah muka saja dan tidak dapat secara timbal baik.

Ali Hasjmy bertindak sebagai pemimpin redaksi dan penanggung jawab surat kabar *Semangat Merdeka* untuk pertama kalinya. Pada pertengahan tahun 1946, berhubung banyak kesibukan lain dan Ali Hasjmy tidak mungkin lagi dapat mencurahkan perhatian sepenuhnya untuk surat kabar *Semangat Merdeka*, diangkatlah Amelz sebagai pemimpin redaksi dan penanggung jawab. Adapun personil yang mengurus penerbitan *Semangat Merdeka*, antara lain pemimpin redaksi atau penanggung jawab ialah Ali Hasjmy yang kemudian diganti dengan Amelz, serta staf redaksi yang terdiri atas Abdullah Arief, Talsya, dan Ridwan. Sementara Tata Usaha dijabat oleh Syarif. Jawatan Penerangan Sipil Daerah Aceh yang dipimpin oleh Oesman Raliby, pada masa itu juga menerbitkan sebuah buletin yang diberi nama *Siaran Pagi*. Dalam buletin itu juga dimuat berita-berita tentang kemerdekaan Indonesia, dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Setelah terbentuknya organisasi tentara di Aceh, mereka tinggal di Asrama-asrama, dirasakan juga suatu keperluan untuk menerbitkan sebuah majalah yang khusus bagi mereka sebagai media pendidikan. Tentara yang terbentuk itu kebanyakan di antaranya masih kurang

Media Massa dalam Perjuangan....

pengetahuannya, baik dalam bidang pengetahuan umum maupun khusus di bidang kemiliteran. Dalam majalah yang diterbitkan oleh Jawatan Penerangan Militer Daerah Aceh, dimuat di dalamnya beberapa pengetahuan dasar kemiliteran yang berguna bagi tentara. Selain *Buletin Sinar Pagi* yang diasuh oleh Ali Hasjmy, juga diterbitkan sebuah majalah yang diberi nama *Dharma*. Buletin Jawatan Penerangan Militer Daerah Aceh itu diterbitkan setiap seminggu sekali dan penyebarannya meliputi tentara yang tinggal di asrama-asrama, barisan kelaskaran, dan masyarakat luas pada umumnya.⁵⁴

Surat kabar *Semangat Merdeka* yang merupakan surat kabar perjuangan di daerah Aceh untuk kegiatan penerbitannya mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah pada waktu itu. Dalam perkembangan selanjutnya, karena kekurangan dana, pemerintah daerah menghentikan bantuan untuk penerbitan surat kabar *Semangat Merdeka* tersebut. Akan tetapi, setelah terjadinya penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia, Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, memanggil A. G. Mutyara untuk membicarakan kelanjutan surat kabar di Aceh.

Berakhirnya penerbitan surat kabar *Semangat Merdeka*, A. G. Mutyara menerbitkan surat kabar *Tegas* sebagai pengganti *Semangat Merdeka* sejak tahun 1948. Penerbitan surat kabar tersebut tanpa bantuan dari pemerintah daerah. Surat kabar *Tegas* terbit terus hingga tahun 1953, seiring dengan terjadinya peristiwa DI/TII di Aceh. Di samping harian *Tegas*, pada masa yang bersamaan juga diterbitkan surat kabar *Bijaksana*, dipimpin oleh Haji Syamaun yang terbit tiga kali seminggu.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 114-115.

Media Massa dalam Perjuangan....

Pada zaman kemerdekaan, terutama pada masa-masa Agresi Belanda I dan II, di Aceh banyak pula surat kabar harian dan majalah yang diterbitkan. Penerbitan itu ada yang dicetak dan ada pula yang hanya distensil. Beberapa penerbitan yang dimaksudkan, antara lain *Pasifik* yang diterbitkan di Langsa, *Warta Dunia Internasional*, *Gelora*, *Berita Baru*, *Melati*, *Menara*, *Fajar Kebangunan*, *Kebangunan Islam*, *Dunia Fajar*, *Mestika*, *Penabur Bakti*, *Dharma*, *Widjaya*, dan *Pahlawan*, yaitu majalah tengah bulanan Tentara Republik Indonesia Divisi Gajah Sumatera dengan pemimpin umum A. G. Mutyara dan wakilnya Suryadi (mulai terbit 1 Januari 1947). Selain itu, *Bebas Puspa*, *Pendekar Rakjat*, dan *Pragmenta Politica* yang diterbitkan oleh Pejabat Penerangan Aceh berupa majalah tri bulanan mengenai politik (sebagai ketua pelaksana merangkap editor adalah Oesman Raliby, perencana pembantu Mr. S. M. Amin, Soetikno Padmo Soemarto, dan Talsya), *Mimbar Rakjat*, dan *Kesuma*. Majalah yang distensil adalah *Mestika*, *Dewan Pers*, *Perpindo* (Persatoean Peladjar Indonesia), *Bagian Karang Mengarang Daerah Atjeh Kutaradja*, dan lain-lain.⁵⁵

1) Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Penyerahan tanpa syarat Jepang kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945, baru diketahui secara resmi oleh rakyat Aceh pada 25 Agustus 1945, ketika edisi terakhir surat kabar *Atjeh Sinbun* pada headlinenya memuat pengumuman dari *Aceh Syu Chokan*, S. Iino, tentang berakhirnya perang dan himbauan kepada rakyat agar tetap tertib.⁵⁶ Kontingen militer Aceh, yaitu *Gyu Gun*, *Hikojo Kinmutai*, dan

⁵⁵ Abdullah Arif. *Kongres Besar PUSA*. Kutaraja: Seksi Penerangan Panitia Raya Besar PUSA, 1951. Hlm. 25. T. Ibrahim Alfian. dkk. *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945-1949)*. Banda Aceh: Depdikbud Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, 1982. Hlm. 116-117.

⁵⁶ *Atjeh Sinbun*, 25 Hatigatu 2605

Media Massa dalam Perjuangan....



TEUKU NYAK ARIF

Tokobetsu Keisatsutai yang sebelumnya tinggal di barak-barak, dibubarkan dan bergabung kembali dengan rakyat.

Pasukan Sekutu pada 29 Agustus 1945 mulai mendaratkan pasukannya di Sabang. Sementara pesawat-pesawat mereka sejak saat itu berkali-kali melintasi Kutaraja dan beberapa kota lainnya dengan maksud menjatuhkan selebaran yang berisikan pernyataan berakhirnya perang dan sekaligus rencana kedatangan Sekutu

untuk melucut Jepang.

Peristiwa yang drastis itu begitu mengejutkan para pemimpin Aceh, terutama mereka yang sudah terlalu jauh bekerjasama dengan Jepang sejak masa pendaratan hingga pendudukan. Sebagaimana diakui oleh T. Muhammad Ali Panglima Polem, Sayid Ali Alaydrus, Ali Hasjmy, dan Mr. S. M. Amin. Kegusaran tersebut semakin bertambah dengan kedatangan Mayor Knottenbelt di Kutaraja pada awal Oktober 1945 sehingga mendorong sejumlah mantan kolone kelima Fujiwara Kikan berusaha melarikan diri ke Semenanjung Malaya melalui Medan.

Sebaliknya, *uleebalang* yang merasa dirugikan oleh pemerintah militer Jepang, menyambut baik kekalahan Jepang. Di tengah-tengah situasi yang demikian, pesan-pesan berita tentang proklamasi kemerdekaan diterima di Aceh melalui kawat atau radio dari Bukittinggi, seperti yang diberitakan dalam *Majalah Dharma*, 10 Desember 1947.⁵⁷ Akan tetapi, pemimpin-pemimpin di Aceh masih dalam keadaan samar-samar tentang wujud kenegaraan yang

⁵⁷*Majalah Dharma* No. 8 tanggal 10 Desember 1947.

Media Massa dalam Perjuangan....

sesungguhnya. Kabut proklamasi itu mulai bersinar pada permulaan Oktober 1945. Mr. Muhammad Hasan yang telah diangkat oleh Sukarno pada 29 September 1945 sebagai gubernur Sumatra memperoleh *besluit* pengangkatannya. Daerah Aceh selanjutnya dijadikan satu keresidenan dengan pengangkatan Teuku Nyak Arif⁵⁸ sebagai residen Aceh pada 3 Oktober 1945.

Gubernur yang bersikap moderat dan akomodatif itu tampaknya memanfaatkan personil-personil pribumi yang telah diperkerjakan oleh Pemerintah Jepang sebelumnya sebagai aparat Republik. Tuwanku Mahmud, mantan hakim dan kerabat sultan yang dekat dengan unsur radikal ditempatkannya sebagai Ketua Komite Nasional Daerah (KDN). Sementara itu Teuku Muhammad Ali Panglima Polem menjadi asisten residen pada kantor residen Aceh, demikian pula pejabat pamong praja pada tingkat kabupaten ke bawah. Dengan demikian, pemerintah republik diharapkan tidak memperoleh reaksi keras dari pihak Jepang yang masih berkuasa.

Berita kemerdekaan dan pembentukan pemerintah republik segera mendapat tanggapan antusias dari kelompok pergerakan di Aceh. Di Kutaraja sendiri, markas yang mereka gunakan, seperti di kantor *Atjeh Koā Hokokai* dan *Koseikyoku* yang berada di bawah pimpinan Teuku Nyak Arif dan Teuku Muhammad Ali Panglima Polem, di kantor *Atjeh Sinbun* di bawah pimpinan Ali Hasjmy, di kantor *Tiho Hoin* di bawah pimpinan Tuwanku Mahmud, dan di kantor *Maibkatra* dan Mahkamah Agama di bawah pimpinan Teungku Muhammad Daud

⁵⁸Lahir di Ulee Lheue, Kutaraja 1899. Ia tamatan *Kweekschool* (sekolah guru) di Bukittinggi dan Osvia di Serang. Pada tahun 1920, ia diangkat menjadi Panglima Sagi XXVI Mukim menggantikan kedudukan ayahnya. Ia menjadi wakil Aceh pertama di *Volksraad* periode 1927--1931. Pada awal kemerdekaan RI, pernah diangkat menjadi Residen Aceh. Ia diasingkan ke Takengon 1946 sebagai dampak Peristiwa Cumbok dan meninggal pula pada bulan Mei tahun tersebut.

Media Massa dalam Perjuangan....

Bereu-eh. Kaum muda pergerakan itu segera melakukan kontak dengan Teuku Nyak Arif dan Tuwanku Mahmud untuk mengatur langkah-langkah yang akan ditempuh.

Hasil nyata dari kontak tersebut dimanifestasikan melalui pembentukan organisasi paramiliter republik, yaitu Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang dimotori mantan perwira *gyu gun* di Kutaraja. Pertemuan itu mempercayakan Sjamaun Gaharu dan T. Hamid Azwar sebagai pemimpin dan wakil pemimpin Markas Daerah. Di Kutaraja sendiri basis pasukan API berada di Kampung Jawa/Pelanggahan dan Ulee Lheue di bawah pemimpin perwira-perwira mantan *gyugun* setempat, seperti Sayid Ali, Sayid Usman, dan T. Muhammadsyah. Demikian pula di daerah, kesatuan API berada di bawah pemimpin mantan *gyugun* atau *hikojo kinmutai* setempat, seperti T. A. Rahman dan T. Abdullah di Pidie dan Lameulo, serta Hasballah Haji di Meureudu. Sebulan kemudian kesatuan API melakukan sumpah prajurit dan menyatakan diri sebagai kesatuan Tentara Keamanan Rakyat (TKR).⁵⁹

Bersamaan dengan pembentukan API, pemuda pergerakan yang bekerja pada berbagai instansi sipil, seperti Hasballah Daud (putra Teungku Muhammad Daud Beureu-eh) dan yang bekerja pada kantor *Tiho Hoin*, Tuwanku Hasjim dan T. Manyak Arif di kantor *Atjeh Hokokai*, Ali Hasjmy dan S. A Dahlan di kantor *Atjeh Sinbun/Sendenka*, pada 4--5 Oktober 1945 mensponsori pula pembentukan organisasi IPI (Ikatan Pemuda Indonesia) di Kutaraja. Organisasi yang berada di bawah Pemimpin Ali Hasjmy, Tuwanku Hasjim, dan T. Manyak Arif, segera memperoleh dukungan dari residen Teuku Nyak Arif sebagaimana halnya dengan API.

⁵⁹*Harian Semangat Merdeka*, 6 November 1945.

Media Massa dalam Perjuangan....

Upaya konsolidasi terus mereka lakukan terhadap organisasi yang baru dibentuk. Beberapa hari kemudian, mereka melakukan rapat pimpinan di kantor Tuwanku Abdul Aziz, mantan ketua *Maibkatra*, guna menyusun kembali pengurus baru. Ketuanya masih dijabat oleh Ali Hasjmy, anggota pengurus bertambah jumlahnya, sementara beberapa di antara mereka mengalami perubahan posisi. Nama organisasi pun dirubah menjadi Barisan Pemuda Indonesia (BPI), yang secara kebetulan persis sama dengan nama organisasi rekan mereka di kota Medan.

Prakarsa para pemuda di Kutaraja itu segera diketahui oleh rekan-rekan mereka di daerah karena mereka mengalami nasib yang sama dan kepentingan yang sama. Wadah organisasi mereka yang sudah ada sebelumnya, yaitu Pemuda PUSA kelihatannya sudah tidak responsif lagi terhadap perkembangan keadaan yang bergerak cepat. Apalagi organisasi tersebut sudah kurang aktivitasnya sejak pendudukan Jepang. Hal demikian terlihat melalui kesediaan Teungku Amir Husin Al Mujahid, ketua Pemuda PUSA, bersama Nathar Zainuddin sengaja datang ke Kutaraja mengakui BPI sebagai wadah perjuangan mereka. Hal itu dilakukan dalam suatu pertemuan yang dilakukan di kantor Tuwanku Abdul Aziz pada 12 Oktober 1945.

Para pengurus BPI selalu tertuju pada gerak-gerik apa yang dilakukan oleh rekan-rekan mereka di pulau Jawa dalam memperjuangkan kepentingan bersama dan menghadapi musuh bersama, yaitu Belanda. Karena itu, pada 17 Oktober 1945, nama organisasi mereka pun dirubah menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI). Akhirnya, pada 20 Desember 1945, Markas Daerah PRI Aceh berubah lagi namanya menjadi Markas Daerah Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia). Dengan demikian, lengkaplah upaya untuk

Media Massa dalam Perjuangan....

mengartikulasikan perjuangan mereka dengan rekan seperjuangan di pulau Jawa.⁶⁰

Berbagai upaya telah dilakukan oleh para pemimpin PRI daerah untuk memperluas pengaruh mereka terhadap masyarakat. Propaganda dilakukan, baik terhadap orang Aceh maupun terhadap kelompok pendatang yang telah lama menetap di Aceh. Terhadap orang Aceh sendiri, mereka sangat beruntung, karena para ulama yang telah bekerja pada birokrasi militer Jepang, baik secara bersama, yaitu Teungku Haji Jakfar Sidik Lamjabat,⁶¹ Teungku Muhamad Daud Beureu-eh, Teungku Haji Hasan Kruengkale,⁶² dan Teungku Haji Hasballah Indrapuri⁶³ pada 15 Oktober 1945, maupun secara pribadi Teungku Hasan Kruengkale pada 4 November 1945, mengeluarkan fatwa yang mendukung kemerdekaan Republik dan sekaligus perjuangan kemerdekaan sebagai kewajiban bagi setiap orang Islam.⁶⁴ Lebih dari itu, ulama-ulama itu ikut ambil bagian sebagai pembicara dalam berbagai rapat pembentukan cabang atau ranting PRI di desa-desa di daerah Aceh Besar dan Pidie.⁶⁵

⁶⁰*Harian Semangat Merdeka*, 17 November 1945.

⁶¹Lahir sekitar tahun 1873 di Jeureula, Aceh Besar, kemudian menikah dengan seorang wanita dari Lamjabat, Kutaraja. Setelah menuntut ilmu ke berbagai tempat, lalu ia membina Dayah di Jeureula. Ia meninggal pada tahun 1953.

⁶²Lahir pada tanggal 18 April 1886 di Meunasah Ketembu, Pidie. Ia meninggal 19 Januari 1973.

⁶³Lahir di Montasiek, Aceh Besar, beliau lama membina pendidikan Dayah Indrapuri. Ia meninggal 29 April 1959.

⁶⁴*Harian Semangat Merdeka*, 29 November 1945.

⁶⁵*Harian Semangat Merdeka*, 18 dan 27 Oktober dan 6, 8, 10 dan 20 November 1945.

Media Massa dalam Perjuangan....

Kehadiran pemerintah Republik dengan dua organisasi paramiliter sangat mengejutkan Pemerintah Militer Jepang, karena Penguasa Militer Jepang di Aceh dan di daerah lainnya di wilayah Indonesia harus memelihara status quo. Oleh karena itu, S. Iino pada 12 Oktober 1945, memanggil para pemimpin republik di kediamannya untuk menyatakan ketidaksetujuannya. Akan tetapi, rekan lamanya, yaitu Residen Teuku Nyak Arif dan Sjamaun Gaharu⁶⁶ menyatakan penolakan terhadap perintah pembubaran organisasi paramiliter mereka.



SYAMAUN GAHARU

Melihat gelagat seperti itu, Jepang akhirnya mengadopsi kembali kebijaksanaannya di Aceh, secara resmi mereka melaksanakan perintah Sekutu, tetapi secara diam-diam mereka memberikan bantuan, seperti uang atau senjata kepada pihak republik.

⁶⁶Sjamaun Gaharu lahir di Teupin Raya, Pidie Jaya pada tahun 1916. Setelah menamatkan *Normaal School* (sekolah guru) di Pematang Siantar pada tahun 1932, kembali ke Aceh dan mengajar di Taman Siswa Kutaraja. Pergi ke Jawa pada tahun 1938 untuk belajar di *Opleiding voor Landbouw Onderwijzer* (Sekolah Latihan Pertanian untuk Guru) di Bogor hingga tahun 1940. Selama pendudukan Jepang, ia memasuki *gyugun*. Aktif dalam pembentukan API pada tahun 1945, sehingga menjadi komandan TRI dengan pangkat kolonel pada tahun 1946, kemudian ia ditangkap oleh TPR, tetapi berhasil melarikan diri ke Sumatera Selatan dan menjadi Kepala Staf Divisi di sana. Februari 1949 diangkat menjadi Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan. Ia dimutasikan ke Kalimantan pada tahun 1950 dan setahun kemudian diangkat menjadi Komandan Komando Militer Kota Banjarmasin. Pada tahun 1956, ia kembali ke Aceh dan diangkat menjadi Panglima Komando Daerah Militer Aceh pada tahun 1957--1960. Setelah itu, ia dipindahkan ke Jakarta.

Media Massa dalam Perjuangan....

Uleebalang yang telah mendapat pengalaman pahit selama masa pendudukan Jepang, sangat cemas melihat perkembangan keadaan yang terjadi di sekeliling mereka. Lawan-lawan politik mereka dalam organisasi PRI secara leluasa memobilisasi massa.⁶⁷ Mereka melakukan perondaan dan bahkan memiliki senjata api. Pemerintah Republik dalam wujud pemerintah keresidenan atau provinsi belum terorganisir rapi. Sementara Pemerintah Militer Jepang yang masih berdiri kokoh dan pemerintah Sekutu yang di dalamnya terdapat tentara Belanda sudah menduduki kembali Sabang dan Medan untuk melucuti tentara Jepang.

Dalam situasi yang belum jelas siapa sesungguhnya ke luar sebagai pemenang kedaulatan tertinggi, beberapa *uleebalang* (hulubalang) di pantai utara Aceh merasa terpaggil pula untuk mengorganisir pengikut-pengikut mereka. Atas inisiatif T. Ahmad Danu dan T. Cut Hasan, satu organisasi yang bernama Perhimpunan Indonesia (PI) berdiri di Kutaraja pada awal November 1945. Kerabatnya, T. Pakeh Sulaiman dan T. Laksamana Umar segera pula membentuk cabang organisasi itu di daerah yurisdiksinya, yaitu di Pidie dan Negeri Njong. T. Muhammad Daud Cumbok pada awal November 1945 mengorganisir pula daerah Lameulo dengan sebuah organisasi Barisan Penjaga Keamanan (BPK). T. Cik Mahmud Meureudu mempersenjatai pula pengikutnya di Meureudu, sementara di wilayah Lhokseumawe atas inisiatif kepala wilayah setempat, T. Cik A. Latif membentuk pula organisasi paramiliter bernama Gerakan Persatuan Tenaga Rakyat (GPTR) yang dikepalai oleh kerabatnya, T. R. Ibrahim.

Para *uleebalang* segera memanfaatkan posisi sosial ekonomi yang mereka miliki untuk memperkuat organisasi yang mereka bentuk. T. Cut Hasan yang pada waktu itu menjabat asisten residen Aceh Utara telah menyalurkan kain inventaris BDK (Bagi Dan Kumpul) kepada

⁶⁷*Harian Semangat Merdeka*, 27 Oktober dan 3, 6, dan 11 November 1945.

Media Massa dalam Perjuangan....

BPK di Lameulo yang dipimpin oleh T. Mahmud. Hal serupa juga dilakukan oleh T. Muhammad Daud Cumbok dan T. Laksamana Umar kepada organisasi paramiliter mereka.

Tindakan *uleebalang* segera mendapat reaksi dari pemimpin PRI setempat. Dalam pandangan mereka bahwa tindakan *uleebalang* bersangkutan merugikan perjuangan negara Republik. Intimidasi yang dilakukan oleh *uleebalang* terhadap gerakan mereka ditafsirkan sebagai sikap konservatif *uleebalang* yang menentang Republik. *Uleebalang* sebaliknya, menafsirkan pula berbagai tindakan pemimpin milisi sebagai perbuatan yang menggembarkan rakyat jelata ke jurusan yang sesat.⁶⁸

Menyadari kekuatan senjata mereka yang banyak, sejak awal November 1945 para *uleebalang* mengadakan "penertiban" terhadap unsur-unsur radikal yang bergabung dalam PRI di daerah yurisdiksinya. Di Lameulo, pengikut T. Muhammad Daud Cumbok menjalankan taktik intimidasi, penganiayaan, dan penggeledahan terhadap aktivis setempat, termasuk Hasan Muhammad Tiro, ketua PRI, dan abangnya Zainal Abidin Tiro sehingga mereka mengungsi untuk menghindari berbagai intimidasi. Hal serupa juga terjadi di Lueng Putue, Meureudu, dan Lhokseumawe.

Tindakan penertiban yang dilakukan oleh *uleebalang* di daerah yurisdiksinya justru menambah ketegangan politik di daerah yang bersangkutan. Pihak yang dirugikan itu mempergunakan berbagai jalur untuk memojokkan posisi *uleebalang* dengan tuduhan telah berpihak kepada musuh atau "kaki tangan Nica".

Di samping jalur PRI, para ulama yang merasa cemas dengan rencana kembalinya Belanda segera meningkatkan mobilisasi. Pada 17 November 1945, Teungku Umar Tiro (1904-1980) memobilisasi massa

⁶⁸Harian Semangat Merdeka, 1946.

Media Massa dalam Perjuangan....

sekitar 600 orang di mesjid Tiro yang terletak sekitar 4 km dari Lameulo di tempat yang kerabatnya telah mendapat perlakuan tidak baik dari *uleebalang* setempat. Rapat yang dihadiri oleh Teungku Muhammad Daud Beureu-e sebagai pembicara, memberikan sikap terhadap pengkhianat, biaya perang sabil, dan pembentukan laskar Mujahidin. Sepekan setelah itu mobilisasi serupa juga dilakukan oleh ulama-ulama di Aceh Besar.⁶⁹

Dalam suasana demikian, dapat dimengerti apabila *uleebalang* juga melakukan mobilisasi serupa. Pada 21 November 1945, T. Laksamana Umar telah menghimpun *uleebalang* yang terdapat di daerah Pidie untuk membahas situasi dan sekaligus menyusun langkah bersama terhadap lawan politik mereka. Acara penting yang mereka putuskan adalah tindakan keras yang mereka ambil terhadap pemimpin milisi apabila residen Teuku Nyak Arif tidak mampu menertibkannya.

Dengan demikian, suhu politik di antara dua kelompok bersaing sudah begitu memuncak pada akhir November 1945 di Aceh. Sementara pemerintah Republik yang masih lemah disibukkan oleh mobilitas pasukan Jepang yang hendak melakukan evakuasi ke luar daerah Aceh. Dalam situasi demikian, culik-menculik di antara dua kelompok mulai terjadi secara sporadis, baik di Kutaraja, Lameulo, Lueng Putue, Gigieng maupun Lhokseumawe.⁷⁰

2) Revolusi Sosial

Dua orang pemimpin milisi, yaitu T. M. Amin dan Ali Hasjmy, mengusulkan dalam sidang Pleno DPA yang berlangsung pada 28 Desember 1946 sampai dengan 1 Januari 1947 di Kutaraja, agar sidang

⁶⁹*Harian Semangat Merdeka*, 20 dan 27 November 1945.

⁷⁰M. Isa Sulaiman. *Sejarah Aceh: Gugatan Terhadap Tradisi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm. 126.

Media Massa dalam Perjuangan....

menghasilkan penyelesaian yuridis tentang Perang Cumbok dan ekspedisi TPR. Cuplikan itu secara gamblang merefleksikan betapa kegusaran para pemimpin milisi akan digugat balik oleh keluarga *uleebalang* terhadap tindakan-tindakan yang mereka alami selama revolusi. Apa yang mereka gusarkan itu cukup beralasan karena pemimpin milisi hanya berhasil merebut jabatan *uleebalang*, sedangkan *uleebalang* sebagai kelas elit sosial masih tetap ada di Aceh. Beberapa *orang di antara uleebalang* yang mampu menyesuaikan diri dengan *perkembangan* keadaan, seperti T. M. Ali Panglima Polem dan Mr. Muhammad Hasan⁷¹ masih bebas di luar dan menjabat beberapa posisi dalam pemerintahan Republik.⁷²

Dalam situasi demikian sangat logis apabila setelah ekspedisi TPR berakhir, para pemimpin milisi pun menggunakan jalur-jalur hukum untuk menyelesaikan lawan-lawan politik yang telah mereka tangkap. Perwira-perwira pembangkang yang tersangkut dengan kasus penculikan Teungku Amir Husin Al Mujahid⁷³ segera diproses melalui jalur hukum. Sebuah oditur militer di bawah ketua Mr. S. M. Amin⁷⁴

⁷¹Lahir di Pineung, dekat Sigli, tahun 1906. Ia salah seorang putra Teuku Bintara Ibrahim, *uleebalang* Pineung di Pidie. Setelah menamatkan pendidikan MULO dan AMS di Bandung, ia pergi ke negeri Belanda dan memperoleh gelar sarjana hukum di Leiden pada tahun 1933. Ia pernah menghadiri rapat PPKI yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan Agustus 1945, kemudian diangkat menjadi Gubernur Sumatera dan meninggal pada tahun 1997.

⁷²Sulaiman. *Op.cit.*, hlm. 189.

⁷³Lahir di Idi, Aceh Timur sekitar tahun 1910. Ia pernah belajar di Tanjungpura (Sumatra Utara). Menjadi ketua Pemuda PUSA pada tahun 1940. Membentuk Divisi Payabakong, kemudian bergabung dengan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) ketika divisi itu dileburkan ke dalam TNI pada tahun 1948.

⁷⁴Lahir di Kruenggraba (kini masuk Kabupaten Aceh Besar). Setelah menamatkan AMS, ia bersekolah *Rechtschool* di Jakarta pada tahun 1927 dan memperoleh gelar sarjana hukum. Pada tahun 1934 ia kembali ke Aceh dan

Media Massa dalam Perjuangan....

dengan pangkat letnal kolonel dibentuk dalam Divisi V TRI oleh Kolonel Husin Yusuf pada 19 Juli 1946. Oditur terdiri atas sebuah staf yang antara lain terdiri atas Letnan Hasanuddin, Teungku Hasballah Indrapuri, dan Sayid Abubakar, bersidang dan menjatuhkan hukuman beraneka macam sesuai dengan tingkat kesalahan mereka. Setelah menjalankan hukuman, sebagian mereka, seperti Mayor T. Muhammadsyah, Mayor Sayid Usman, Letnan Sayid Ali, Letnan Hamdani, Letnan Banta Khairullah, dan Letnan Abdullah Masri berangkat ke luar daerah Aceh untuk bergabung dengan kesatuan militer yang lagi berjuang di Sumatera Timur (Sumatera Utara). Akan tetapi, setelah Agresi Belanda, sebagian di antara mereka kembali lagi ke Aceh.⁷⁵

Uleebalang yang telah meringkuk dalam tahanan segera diselesaikan melalui aturan hukum. Untuk itu, pemimpin milisi dapat mempengaruhi Residen Teuku Chik Muhammad Daudsyah mengeluarkan pada 13 Agustus dan 15 September 1946, berturut-turut dua surat ketetapan penahanan *uleebalang* yang sudah dalam penjara. Dengan alasan demi keamanan dan keselamatan jiwa mereka, para *uleebalang* di tempatkan di Takengon dan di penjara Bireuen, Sigli, dan Meulaboh. Ada 162 orang nama yang tercantum dalam SK itu, termasuk Teungku Hasbi As Shiddiqi, Sjamaun Gaharu, dan T. A. Hamid Azwar. Akan tetapi, dua dari yang terakhir dapat melarikan diri pada bulan September 1946 ke luar daerah Aceh.

bekerja sebagai ahli hukum di Kutaraja. Pada tahun 1946 ia menjabat wakil ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh di Kutaraja, selanjutnya diangkat menjadi Gubernur Muda Sumatera Utara setahun kemudian. Pada tahun 1948 menjadi Gubernur Provinsi Sumatra Utara.

⁷⁵Sulaiman. *Op.cit.*, hlm. 190.

Media Massa dalam Perjuangan....

Status hukum dibagi atas tiga kategori, yaitu golongan A, B, dan C. Kategori A adalah orang yang dianggap paling berbahaya. Oleh karena itu, mereka diasingkan ke Simpang Balek dan Redelong di Aceh Tengah (kini Kabupaten Bener Meriah). Jumlah tahanan dalam kategori ini mencapai 62 orang, antara lain terdiri atas Teuku Teungoh Hanafiah, Teuku Chik Johan Alamsyah, dan Teuku Idris. Kategori B dan C dianggap tidak begitu berbahaya. Karena itu, mereka ditahan di berbagai rumah penjara di Kutaraja, Sigli, Bireun, Lameulo, dan Mulaboh.

Terbitnya SK memperlihatkan betapa kemampuan pemimpin milisi telah berhasil mempergunakan pemerintahan keresidenan sebagai alat guna merealisasikan kepentingan mereka. Konsideran itu secara tegas menyebutkan, dikeluarkan atas saran dan pertimbangan Badan Siasat Daerah dan Dewan Pertahanan Daerah. Perlu diketahui bahwa kedua lembaga tersebut sesungguhnya berada di bawah kontrol Kolonel Husin Yusuf, Kapten Abubakar Majid, Kapten A. Manaf, dan T. M. Amin.⁷⁶

Harta *uleebalang* yang telah dikuasai secara semena-mena sejak berakhirnya Perang Cumbok, merupakan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemimpin milisi. Ahli waris *uleebalang* yang sudah dibebaskan, demikian juga yang masih dalam tahanan pasti akan mempersoalkan harta mereka. Di lain pihak sebagian penduduk yang korban perang menuntut ganti rugi, sementara yang lain menganggap harta tersebut sebagai harta rampasan perang.

Menyadari peliknya persoalan yang dihadapi para pemimpin milisi di Pidie, yaitu Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, Hasan Ali, dan T. M. Amin berusaha mencari landasan yuridis untuk dapat menyelesaikan persoalan harta yang berada di tangan Markas Besar

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 191.

Media Massa dalam Perjuangan....

Rakyat Umum dan perwakilannya di setiap negeri, yaitu Markas Negeri. Pemimpin Markas Besar Rakyat Umum, Teungku Haji Mustafa Ali, dan Markas Besar Mujahidin, Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, pada bulan April 1946 secara berturut-turut mengirimkan surat kepada Residen Aceh supaya persoalan harta *uleebalang* dapat diselesaikan melalui suatu fomula hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah keresidenan.

Usul tersebut mendapat tanggapan, baik dari pihak Residen Aceh, Teuku Chik Muhammad Daud Syah, maupun Wakil Ketua Dewan Perwakilan Aceh (DPA), Mr. S.M. Amin, dan T. M. Amin, anggota BP DPA yang membidangi masalah politik atau pemerintahan dan agama. Mereka ditunjuk untuk menangani rancangan penyelesaian persoalan. T. M. Amin lalu dibantu oleh jaksa keresidenan, Hasan Ali, menyusun draft rancangan untuk dibicarakan, baik dengan anggota BP DPA pada 20 Juni 1946, maupun dengan pemimpin Markas Besar Rakyat Umum di Sigli pada 22 Juni 1946. Setelah rancangan itu disetujui, pada 24 Juni 1946, Teuku Chik Muhammad Daud Syah selaku Residen Aceh dan Mr. S. M. Amin selaku wakil ketua DPA menandatangani rancangan tersebut menjadi Peraturan Daerah Tentang Menguasai atau Memiliki Harta Benda Peninggalan Pengkhianat-Pengkhianat Negara Republik Indonesia Daerah Aceh.

Perda yang terdiri atas 10 pasal, sesungguhnya berisikan pembentukan Majelis Penimbang pada tingkat kabupaten. Pasal-pasal peraturan tersebut memberikan kekuasaan yang luas dan mutlak kepada Majelis Penimbang. Kekuasaannya mencakup antara lain mengadili, mengumpulkan, mengelola, bahkan menjual harta sitaan dari *uleebalang* bagi keperluan perkara. Vonis majelis tidak dapat diganggu gugat, sementara personalia hakimnya dari "rakyat".

Terbitnya Perda, mendapat sambutan antusias dari kelompok milisi. Markas Rakyat Umum yang selama itu menangani harta *uleebalang* di Pidie, pada 8 Juli 1946 segera membentuk Majelis

Media Massa dalam Perjuangan....

Penimbang untuk dikukuhkan oleh Residen Aceh. Personalianya terdiri atas 12 orang pemimpin milisi, antara lain Teungku Abdul Wahab Seulimuem (ketua I), Hasan Ali (*hoofd* jaksa Kutaraja (ketua II), dan Teungku Hitam Peureulak (anggota). Mereka memperoleh pengukuhan dari Residen Aceh melalui SK Nomor 538/NRI tanggal 22 Juli 1946.⁷⁷

Harian *Semangat Merdeka* dan *Suluh Merdeka* juga menerbitkan berita mengenai berbagai bentuk perselisihan antara ulama dengan *uleebalang* yang sedang menyelimuti perpolitikan di Aceh sejak Perang Cumbok. Para pemimpin milisi, yaitu Ali Hasjmy, A. Gani Mutyara, Abdullah Arif, Hasan Ali, Hasan Muhammad Tiro, Teungku Abdulwahab Seulimuem, Teungku M. Yahya Baden, dan Ismail Muhammad, menulis sajak atau artikel di surat kabar *Semangat Merdeka* dan brosur atau hikayat yang memojokkan *uleebalang* sebagai "kaki tangan Nica" dan berperilaku di luar batas moral.

Di antara organisasi milisi, Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia, perubahan dari PRI sejak 20 Desember 1945) yang paling militan dalam memojokkan *uleebalang*. Ketika penutupan konferensi Pesindo yang berlangsung di Kutaraja pada 17 Januari 1946, mereka mengeluarkan pernyataan bahwa susunan pemerintah di Aceh hendaklah berdasarkan susunan kedaulatan rakyat dengan menyingkirkan pegawai yang kurang revolusioner. Oleh karena itu, semua pejabat pemerintah sejak dari *geucik* (lurah) sampai jabatan tinggi harus dipilih oleh rakyat. Sejak saat itu, pesindo giat melakukan pengumpulan sumbangan amal dari masyarakat untuk membantu rekan-rekan mereka yang telah menjadi korban dalam Perang Cumbok di Pidie.

Teuku Chik Muhammad Daudsyah, pejabat residen yang mulai memangku jabatan pada 21 Januari 1946, dan ketua Komite Nasional Daerah, Mr. S. M. Amin, meminta hakim *Tiho Hoin* Sigli untuk

⁷⁷Harian *Semangat Merdeka* pada tanggal 25 Juni 1946.

Media Massa dalam Perjuangan....

mengakomodasikan aspirasi tersebut. Hal demikian dimanifestasikan melalui langkah-langkah yang mereka tempuh, seperti pengesahan Pesindo untuk menjalankan tugas kepolisian di desa-desa pada 31 Januari 1946. Pengesahan pegawai pamong praja pilihan rakyat di daerah Pidie, dan pengangkatan pemimpin-pemimpin milisi dalam birokrasi pemerintah. Mereka yang diangkat tersebut, antara lain Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, T. M. Amin, dan Sayid Abubakar di kantor Residen. Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap, Teungku H. A. Hasballah Indrapuri pada kantor Agama, Oesman Raliby pada kantor Penerangan, dan Hasan Ali sebagai jaksa penuntut.⁷⁸

3) Ketidakadilan

Kelompok sosial yang sangat terpukul oleh perilaku para milisi yang menguasai ekonomi pada waktu itu adalah buruh atau karyawan yang tidak mendapat tunjangan jabatan, tetapi semata-mata bergantung pada gaji. Lagi pula gaji yang mereka terima tidak tepat pada waktunya.⁷⁹ Sebaliknya, mereka menyaksikan munculnya kelompok baru kebanyakan berasal dari milisi yang hidup mewah dari kegiatan penyeludupan antara daerah Aceh dengan Semenanjung Melayu. Selain itu, diperoleh dari hasil pengelolaan tambang minyak dan perkebunan serta berbagai kegiatan bisnis lainnya.

Benih ketidakpuasan terhadap perilaku kelompok milisi mulai tampak pada akhir tahun 1946. Ketika DPA melangsungkan sidang pleno pada 28 Desember 1946 sampai dengan 1 Januari 1947, Saridin anggota DPA mengusulkan supaya pemerintah mengambil tindakan

⁷⁸*Harian Semangat Merdeka*, 17 dan 18 Januari 1946 dan *Suluh Merdeka* edisi 8 Februari 1946.

⁷⁹*Insider. Op.cit.*, hlm. 71.

Media Massa dalam Perjuangan....

tegas terhadap kebangkitan fenomena feodal baru di kalangan kaum Republikan. Usul itu mendapat tanggapan dari beberapa anggota lainnya, seperti R. Saleh, Affan Daulay, dan Karim Duriat, walaupun usul itu akhirnya hanya diterima sebagai anjuran bukan sebagai keputusan.⁸⁰

Kritik terhadap perilaku kelompok milisi bermunculan melalui majalah *PAHLAWAN* di bawah pimpinan A. Gani Mutyara yang diterbitkan di Kutaraja (Januari – Mei 1947), Bagian Penerangan Divisi Gajah I, dan kemudian *MAJALAH DHARMA* di bawah pimpinan A. Gani Mutyara yang diterbitkan oleh Bagian Penerangan Pesindo (Mei-Desember 1947). Pang Jelata, penjaga rubrik pojok *MAJALAH PAHLAWAN* melakukan sindiran terhadap perilaku opsir yang angkuh, biaya motor pejabat yang mencapai Rp30.000,- korupsi, dan pemimpin-pemimpin yang telah mengawini janda *uleebalang*.⁸¹

Majalah *DHARMA* mengekspos tulisan Satire Vichitra (Tuwanku Hasyim) “Filsafat Uang” dan serial bersambung A. Gani Mutyara “Memperebutkan Gadis Feodal” satu sindirannya terhadap pemimpin milisi yang mengawini gadis atau janda feodal.⁸² Akan tetapi, tulisan-tulisan itu kelihatannya mendapat reaksi dari pihak yang merasa dirugikan sehingga pada bulan Mei 1947, Usman Raliby, membeslah (menyita) kopi kedua majalah tersebut.⁸³

⁸⁰Sulaiman. *Op.cit.*, hlm. 202.

⁸¹*Majalah Pahlawan* No.11 tanggal 5 Januari 1947, No. 3 tanggal 5 Februari 1947 dan No. 10 tanggal 10 Mei 1947.

⁸² *Majalah DHARMA* No. 6 tanggal 10 Oktober 1947 dan No. 8 tanggal 10 Desember 1947.

⁸³Sulaiman. *Op.cit.*, hlm. 203.

Media Massa dalam Perjuangan....

4) Pembaharuan Keagamaan dan Pendidikan

Sejak zaman pendudukan Jepang, elit agama banyak memperoleh konsesi-konsesi terutama melalui pembentukan Mahkamah Agama (*Syu Tyo Hoin*). Akan tetapi, tidak dapat disangkal bahwa lembaga itu bukan saja belum efektif daya pengaruhnya, melainkan juga masih banyak perilaku yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat yang belum sesuai dengan perintah agama. Pelacuran dan pemeliharaan gundik seperti yang terdapat pada zaman Belanda masih terdapat di kota-kota besar di Aceh, seperti di Kutaraja dan Langsa pada zaman pendudukan Jepang. Demikian pula halnya dengan judi, penjualan minuman keras, dan sebagainya. Keadaan itu disebutkan dalam Maklumat Residen Aceh No. 5 yang dimuat dan disebar oleh harian *Semangat Merdeka* pada 8 November 1945.⁸⁴

Menyadari bahwa birokrasi merupakan wadah yang penting dalam menyalurkan dan mengawasi kebijakan maka langkah pertama yang mereka lakukan adalah membentuk atau menyempurnakan lembaga agama yang sudah ada. Perhatian pertama mereka adalah pada Mahkamah Agama, karena dua orang hakimnya, yaitu Teungku Muhammad Daud Beureu-eh sejak Februari 1946 diangkat menjadi Asisten Residen pada kantor keresidenan. Sementara Teungku Hasbi As Shiddiqi sejak bulan Maret 1946 menjadi tahanan politik. Lalu pada awal Juli 1946, Mahkamah Agama bentukan Jepang itu dibubarkan dan diganti dengan lembaga baru yang bernama Mahkamah Syariah. Kepala Mahkamah Syariah Keresidenan dijabat oleh Teungku Hasballah Indrapuri.

Mahkamah Syariah merupakan bagian dari jabatan agama keresidenan yang dikepalai oleh Teungku Muhammad Daud Beureu-eh.

⁸⁴*Harian Semangat Merdeka* tanggal 8 November 1945.



M. Nur El Ibrahimy

Bagian lain dari kantor tersebut adalah Dewan Agama Islam yang dikepalai oleh Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap. Tentang pengangkatan mereka dimuat dan disebarikan oleh *Majalah Suluh Merdeka* pada 6 September dan 9 Oktober 1946.⁸⁵ Pendidikan Agama dikepalai oleh M. Nur El Ibrahimy⁸⁶ dan penerangan Agama dikepalai oleh Teungku Abdullah Umar Lam U. Personalia birokrasi kantor agama itu, baik pada taraf keresidenan maupun pada tingkat kabupaten, kewedanan, dan negeri pada umumnya dijabat oleh mantan guru madrasah, seperti Ismail Yakub dan A.R. Hasyim di kantor keresidenan, Teungku Abdullah Ujong Rimba, Teungku Syeh Hamid, dan Teungku Hasan Hanafiah pada tingkat kabupaten.

Keragaman madrasah, baik dari segi kualitas manajemen maupun mutu pendidikan, telah mendorong kantor Pendidikan Agama untuk melakukan pembenahan terhadap madrasah yang terdapat di seluruh Aceh pada waktu itu. Hal itu dimaksudkan agar kesinambungan eksistensi sekolah agama tetap terjamin.⁸⁷ Teungku Muhammad Daud Beureu-eh membawa persoalan tersebut ke dalam sidang Badan Pekerja Dewan Perwakilan Aceh yang berlangsung pada 10 Agustus

⁸⁵*Suluh Merdeka* tanggal 6 September dan 9 Oktober 1946. Majalah terbitan Pematang Siantar yang dipimpin oleh Yaya Yacub dan Arif Lubis.

⁸⁶Lahir pada awal Januari 1912 di Idi, Aceh Timur. Pendidikannya: Sekolah Melayu, Madrasah Aziziah dan Madrasah Al Muallimin di Tangjung Pura, Langkat. Pada tahun 1930 belajar di Universitas Al Azhar, Cairo.

⁸⁷"Penyeragaman Kurikulum dan Penegerian Sekolah Agama di Aceh" dalam majalah *Santunan* No. 93 tahun 1984 dan No. 94 tahun 1984.

Media Massa dalam Perjuangan....

1946. Sidang yang dipimpin oleh T. Chik Muhammad Daudsyah⁸⁸ itu menyetujui bahwa sekolah agama berada di bawah kewenangan Jabatan Agama Keresidenan, bukan di kantor Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Dengan demikian, tidak kurang 170 buah Madrasah Ibtidaiyah yang beraneka ragam di Aceh dirubah menjadi SRI 7 tahun (Sekolah Rendah Islam) di bawah tanggung jawab pemerintah keresidenan.

Penegerian SRI yang demikian banyak tentulah menimbulkan persoalan terhadap penampungan lulusan yang akan melanjutkan studi. Hal itu disebabkan sebelum kemerdekaan hanya Perguruan Normal Islam Bireun yang menyelenggarakan pendidikan lanjutan (Tsanawiyah). Untuk memecahkan persoalan agama tersebut, elit agama segera mendirikan sekolah lanjutan, seperti Sekolah Menengah Islam (SMI) di Kutaraja, Sigli, Bireuen, dan Lhokseumawe, Madrasah Islam Modern (MIM) di Langsa tahun 1948, dan Sekolah Menengah Islam Atas Kutaraja (SMIA) dengan guru-gurunya, seperti Syekh Afifuddin dan A. Gani Usman. Sama halnya dengan SRI, sekolah agama lanjutan memperoleh dukungan dana dari pemerintah keresidenan.

Melalui birokrasi Jawatan Agama dan kekuatan politik PUSA, Masyumi, Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), dan Mujahidin, para elit agama pun berusaha memberantas perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam di Aceh. Oleh karena itu, pada sidang-sidang BP DPA maupun sidang DPA telah dimanfaatkan oleh pemimpin PUSA untuk mengajukan usulan mereka. Dalam sidang DPA yang berlangsung

⁸⁸Lahir di Idi sekitar tahun 1903, ia sebagai *uleebalang* Idi di Aceh Timur. Pernah belajar di *Bestuurschool* di Jakarta. Pada masa Jepang, ia menjabat sebagai *Guncho* Idi, kemudian dipindahkan ke Langsa. Diangkat menjadi Akting Residen Aceh pada bulan Desember 1945 dan pada tahun 1946 diangkat menjadi Residen Aceh. Ketika Provinsi Aceh dibubarkan pada tahun 1950, dia dipindahkan ke kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan, kemudian pindah ke Jakarta dan meninggal di sana pada sekitar tahun 1964.

Media Massa dalam Perjuangan....

pada 28 Desember sampai dengan 1 Januari 1947, Teungku Muhammad Daud Beureu-eh dan T. M. Amin dengan gigih mengajukan 10 usulan untuk dibicarakan dalam agenda sidang. Hal-hal yang dibicarakan itu, antara lain menyangkut dengan larangan memperjualbelikan minuman keras, pemisahan rumah tahanan laki-laki dan wanita, hukuman berat kepada pelaku zina dan judi, mengadakan jam pelajaran agama di sekolah-sekolah umum, sensor film dan sandiwara, serta pengalihan kantor Harta Negara kepada Baital Mal.

Pada 5 Mei 1948, lima orang tokoh agama, yaitu Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap, Teungku H. A. Hasballah Indrapuri, M. Nur El Ibrahimy, dan Ibrahim Amin mengeluarkan Maklumat Bersama. Maklumat tersebut menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang merusak aqidah, melemahkan semangat beribadah dan membuang harta yang bukan pada tempatnya, seharusnya ditinggalkan. Dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Militer, Teungku Muhammad Daud Beureu-eh pada 9 Agustus, 18 November, dan 29 November 1949 mengeluarkan maklumat yang berisikan ancaman pengasingan ke Blang Pandak Tangse bagi pelaku zina, mencuri, dan judi. Hal itu seperti yang dimuat dan disebarakan oleh harian *Semangat Merdeka* pada 10 Agustus dan 19 Oktober 1948.⁸⁹

5) Membangkitkan Semangat Juang

Agresi Belanda I pada tahun 1947 terhadap Republik Indonesia begitu berpengaruh terhadap perkembangan sejarah Aceh berikutnya. hal itu disebabkan pemerintah provinsi yang menjadi orientasi perjuangan telah lumpuh oleh tindakan agresi Belanda itu. Dengan dikuasainya kota Bukittinggi pada 22 Desember 1948 oleh Belanda

⁸⁹*Harian Semangat Merdeka*, 10 Agustus dan 19 Agustus 1948.

Media Massa dalam Perjuangan....

pada Agresi II⁹⁰ sehingga daerah Aceh praktis berada dalam keadaan otonom.

Suasana perjuangan menghadapi Belanda yang telah mengambil alih kekuasaan Sekutu di Medan, mendorong kesatuan milisi membersihkan lawan-lawan politiknya dari tubuh birokrasi pemerintah. Hal itu, seperti diserukan oleh Ali Hasjmy (ketua Pesindo Aceh) di hadapan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Aceh di Kutaraja pada 28 Desember 1946 sampai dengan 1 Januari 1947. Seruan itu berisikan bahwa pimpinan badan pemerintahan yang penting seharusnya diserahkan kepada orang-orang yang bersemangat revolusioner. Untuk mendukung petisi yang dikeluarkan oleh Pesindo Kutaraja pada 7 Desember 1946, figur pemerintahan yang mereka anggap kurang revolusioner pada waktu itu adalah T. M. Ali Panglima Polem Kepala Jabatan Kemakmuran dan H. M. Zainuddin kepala Kantor Urusan Makanan Aceh.⁹¹

Sebagai bagian Provinsi Sumatera Utara, Daerah Aceh di samping berusaha mempertahankan diri sendiri, juga memikul kewajiban menghalangi gerak maju Belanda yang sudah menguasai kota Medan. Gubernur Sumatera, Mr. T. Muhammad Hasan, telah memindahkan kantornya pada bulan April 1946 dari kota Medan ke Pematang Siantar.⁹² Dalam upaya melaksanakan kewajiban itu, Kolonel Husin Yusuf memindahkan Markas Divisi V TRI (sejak tanggal 17 September berubah menjadi Divisi Gajah I) dari Kutaraja ke Bireuen.

⁹⁰ Mestika Zed. *Somewhere in the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*. Dewan Harian Daerah Angkatan '45 Sumatra Barat: Grafiti, tanpa tahun penerbit. Hlm. 94.

⁹¹ Sulaiman. *Op.cit.*, hlm. 167.

⁹² *Suluh Merdeka*, 25 Oktober, dan 15, 16, 17 November 1946.

Media Massa dalam Perjuangan....

Sejak awal Desember 1946, kontingen militer Aceh yang dipimpin oleh perwira-perwira seperti Mayor Nazir, Kapten Alamsyah, Kapten T. Manyak, Kapten Hasan Saleh, dan Kapten Nyak Adam Kamil segera menempatkan posisi di sekitar barat dan utara kota Medan. Demikian pula kesatuan-kesatuan milisi, baik dari Divisi Rencong, Pesindo, Teungku Chik Ditiro, dan Mujahidin, mereka membentuk satu Resimen Istimewa Medan Area.

Revolusi kemerdekaan bukan saja telah memberikan kesempatan kepada elit agama untuk mengaktualisasikan diri, melainkan juga telah menjamin kehidupan mereka melalui gaji atau santunan yang mereka peroleh dari pemerintah keresidenan. Oleh karena itu, sangat logis apabila elit agama merupakan barisan terdepan dalam membendung Agresi Belanda. Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, Ali Hasjmy, M. Nur El Ibrahimy, Hasan Muhammad Tiro, Amelz, Abdullah Arif, A. Gani Mutyara, dan Ismuha giat menulis karangan-karangan di berbagai surat kabar dengan misi untuk menggelorakan semangat juang kepada pembaca.

Ketika negara dalam keadaan terancam, seperti Agresi Belanda II, ulama berkumpul di Kutaraja pada 23 Desember 1948 untuk menegaskan kembali komitmen bahwa berperang melawan Belanda adalah kewajiban setiap individu. Sebaliknya, orang yang berpihak kepada musuh adalah pengkhianat. Mereka juga turut safari ke desa-desa untuk berceramah dalam rangka menyokong perjuangan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Selain dengan kata-kata, mereka juga melakukan perbuatan nyata untuk membela kemerdekaan. Ketika pemerintah pusat meluncurkan penjualan obligasi pada akhir April 1946, elit agama di Aceh begitu giat membantu Ketua Panitia Obligasi. Demikian juga rakyat di desa-desa, mereka memobilisasikan untuk memberikan bantuan kepada prajurit yang bertugas di Front Medan Area, mereka berkali-kali menyerukan penduduk supaya berpuasa untuk mendukung

Media Massa dalam Perjuangan....

perjuangan perang sabil melawan agresor Belanda. Demikian pula murid-murid sekolah lanjutan agama, yaitu SMI dan SMIA, di bawah pemimpin A.K. Yacobi membentuk organisasi paramiliter, yaitu Resimen Tentara Pelajar Islam (TPI).

Keberhasilan Teungku Muhammad Daud Beureu-eh memperoleh dukungan para ulama guna melawan Agresi Belanda II yang dilancarkan Belanda pada 19 Desember 1948, dapat dilihat dalam serangkaian pertemuan yang diadakan dengan sejumlah ulama dari berbagai kabupaten. Dalam menjawab seruan Teungku Muhammad Daud Bereu-eh tersebut, 17 orang ulama di Aceh Besar menghadiri rapat yang diadakan di Kutaraja pada 23 Desember 1948. Dalam pertemuan tersebut para ulama sepakat mengeluarkan fatwa mengenai perlawanan terhadap Belanda dan mengenai pengkhianatan terhadap perjuangan menentang Belanda. Fatwa tersebut, yaitu *pertama*, menyebutkan bahwa perjuangan menentang agresi Belanda merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Untuk itu, para ulama berpendapat, semua warga negara wajib mengorbankan harta dan jiwanya. Kedua, para ulama tersebut juga sepakat untuk menganggap bahwa orang-orang yang membantu Belanda sebagai pengkhianat tanah air, tetapi penindakan terhadap mereka harus ditangani oleh pemerintah dan hakim.

Kekompakan ulama dalam mendukung seruan pemerintah untuk melawan agresi Belanda dengan sekuat tenaga harus dilihat sebagai keberhasilan kepemimpinan Teungku Muhammad Daud Beureu-eh. Keberhasilan Teungku Muhammad Daud Beureu-eh yang lebih besar lagi datang beberapa hari kemudian dari Aceh Utara. Sejumlah 92 ulama Aceh Utara berkumpul di Geurugok pada 26 Desember 1948 untuk menyatukan pandangan dan meneguhkan sikap. Dalam pertemuan tersebut, para ulama mengumumkan kesiapan mereka untuk mendukung pemerintah dalam perjuangan melawan Belanda dan menyatakan

Media Massa dalam Perjuangan....

perjuangan sebagai jihad untuk mempertahankan kemerdekaan dan agama.

Makna pertemuan itu bagi Teungku Muhammad Daud Beureueh dapat diukur dari kenyataan, bahwa rapat tersebut dipimpin oleh Teungku Hasbi As Shidiqi yang baru saja dibebaskan dari tahanan di Aceh Tengah pada permulaan tahun 1948. Fakta itu dapat dipandang sebagai suatu petunjuk bahwa dalam mempertahankan agama dan daerah, rakyat Aceh bersatu padu dengan teguh. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Belanda membiarkan Aceh sebagai satu-satunya daerah republik yang tidak disentuh dalam aksi militer keduanya kecuali Sabang, setelah kegagalan usaha penerobosan yang dilakukannya di perbatasan Aceh Selatan dan Tapanuli.⁹³

Keteguhan ulama untuk membela Republik dan kenyataan bahwa Aceh tidak dapat dikuasai oleh Belanda dalam agresinya, telah menyadarkan pemerintah pusat bahwa posisi Aceh sangat strategis dalam melanjutkan perjuangan. Keberhasilan Aceh dalam menerobos blokade Belanda telah memungkinkannya melakukan perdagangan barter dengan Malaya. Dari ekspor hasil bumi, Aceh bukan saja dapat mengatasi ketidakstabilan ekonomi yang menghantui daerah-daerah republik lainnya, melainkan juga dapat menyeludupkan senjata dalam jumlah yang banyak ke Aceh. Hasil perdagangan barter dengan Malaya, Aceh juga menyumbang valuta asing kepada pemerintah pusat. Misalnya, untuk membiayai kegiatan diplomasi di luar negeri, pada tahun 1948 Aceh menyumbang S\$200.000 melalui pejabat-pejabat Republik di Singapura dan New Delhi, (pejabat yang dimaksud adalah Utoyo Ramelan di Singapura dan Sudarsono di New Delhi).⁹⁴ Selama bulan April hingga Juni 1949, kas daerah telah mengeluarkan

⁹³Nazaruddin Sjamsuddin. *Revolusi di Serambi Mekah*. Jakarta: UI Press, 1999. Hlm. 264.

⁹⁴Dua Windu Kodam Iskandar Muda. *Op.cit.*, hlm. 155.

Media Massa dalam Perjuangan....

\$500.000, antara lain \$100.000 untuk biaya pengembalian Pemerintah Pusat ke Yogyakarta, dan \$250.000 untuk Angkatan Perang.

Peran penting yang dimainkan oleh Aceh memberikan harapan besar bagi pemerintah pusat yang menyadari bahwa Republik tidak akan mampu mempertahankan Yogyakarta apabila Belanda melancarkan aksi militer berikutnya. Memperhitungkan kemungkinan seperti itu, pemerintah pusat telah merencanakan untuk menjadikan Aceh sebagai pusat perjuangan bagi Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dalam rangka persiapannya, rombongan pejabat militer di bawah pimpinan Kolonel Hidayat (Angkatan Darat) dan Kolonel Subiyakto (Angkatan Laut), dikirim ke Aceh beberapa bulan sebelum dilancarkan aksi militer Belanda kedua. Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat pertahanan dan strategi militer. Sebelum rombongan perwira itu dikirim ke Aceh, Panglima Tentara dan Teritorium Jawa, A. H. Nasution, dan Panglima Angkatan Udara, Komodor Surjadarma, mendesak Presiden Sukarno untuk pergi ke Aceh apabila Yogyakarta di serang oleh Belanda.⁹⁵

Berita-berita tentang semangat dan seruan perjuangan seperti di atas banyak dimuat dan disebarakan melalui majalah *Pahlawan* No. 1 tanggal 5 Januari 1947, No. 2 tanggal 17 Januari 1947, No. 5 Maret 1947, No. 6 tanggal 17 Maret 1947, No. 7 tanggal 5 April 1947, No. 8 tanggal 17 April 1947, No. 9 tanggal 5 Mei 1947 dan No. 10 tanggal 17 Mei 1947. Demikian juga dengan harian *Semangat Merdeka* menyebarkan informasi seperti di atas kepada masyarakat melalui pemberitaan pada 26 Desember 1945, dan 6 Mei 1946.⁹⁶

⁹⁵A.H. Nasution. *Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta: Seruling Masa, 1968. Hlm. 254--255.

⁹⁶Majalah *Pahlawan* No. 1 tanggal 5 Januari 1947, No. 2 tanggal 17 Januari 1947, No. 5 Maret 1947, No. 6 tanggal 17 Maret 1947, No. 7 tanggal 5

Media Massa dalam Perjuangan....

6) Presiden Soekarno ke Aceh

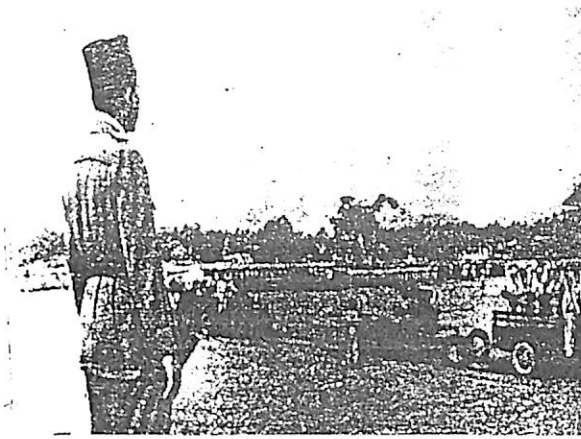
Harian *Semangat Merdeka* juga begitu berperan memuat dan menyebarkan pemberitaan tentang kunjungan Presiden Sukarno ke Aceh. Pada 15 Juni 1948, Daerah Aceh mendapat suatu kehormatan, dikunjungi oleh Presiden Sukarno. Kunjungan itu dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengobarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya di daerah Aceh.

Rombongan kunjungan presiden ke Aceh berjumlah 18 orang, yang terdiri atas pemimpin-pemimpin negara pada waktu itu, baik dari kalangan sipil maupun militer.⁹⁷ Penyambutan dilakukan di lapangan terbang Lhok Nga, Aceh Besar. Penyambutan rombongan kepala negara disambut oleh Gubernur Sumatera Utara, Mr. S. M. Amin, Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Jenderal Mayor Tituler Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, Residen Aceh, Teuku

April 1947, No. 8 tanggal 17 April 1947, No. 9 tanggal 5 Mei 1947 dan No. 10 tanggal 17 Mei 1947. Harian *Semangat Merdeka* tanggal 26 Desember 1945, 6 Mei 1946.

⁹⁷Rombongan tersebut adalah: Sukarno sebagai presiden, Soekiman sebagai Menteri Dalam Negeri, Surjo sebagai ketua Dewan Pertimbangan Agung, Mr. Nazir Datu Pamuncak (utusan RI di Mesir), HS. Mutahar (pegawai tinggi Sekretariat Negara), Tukimin (pegawai Menengah Sekretariat Negara), Said (paman Bung Karno), Hasanuddin (mertua Bung Karno), Mamusung (persfotografer), Asyikin (dokter presiden), Sugandi (ajudan presiden), H. Suyono (opsir udara I), Bob Freeberg (pilot RI. 002), Sunaryo (opsir udara), Budiardjo (opsir udara muda), J. Salatu (opsir udara muda), Nyonya Husein Sastranegara (Kori) pramugari. Rombongan yang turut serta dari Bukittinggi: Mr. Muhammad Hasan (Komisaris Negara untuk Sumatera), Jenderal Mayor (nomenklatur pangkat TNI pada masa perang hingga 1950-an), Suhardjo Harjowardojo (Panglima untuk Sumatera), Dr. F.L. Tobing (Residen Tapanuli, Endamora (staf Komisaris Negara). M. Hasan Basry. *Untuk Apa Kita Merdeka Amanat dan Kursus Politik Bung Karno di Sumatera dalam Masa Perang Kemerdekaan 1945-1949*. Jakarta: Kopkar PIP, tanpa tahun. Hlm. 151.

Media Massa dalam Perjuangan....



Presiden Soekarno ketika berada di Aceh, Juni 1948

Muhammad Daudsyah, Amir Husin Almujaheed, pembesar sipil dan militer lainnya, serta panitia penyambutan yang diketuai oleh Wakil Residen, T. M. Amin.⁹⁸

Selama berada di Aceh, Presiden Sukarno mengadakan serangkaian kegiatan

dalam hubungan meningkatkan semangat perjuangan rakyat di daerah Aceh, di antaranya memberi ceramah dan petunjuk-petunjuk dalam bidang politik di gedung Atjeh Bioskop Kutaraja pada malam hari 15 Juni 1948. Pada keesokan harinya (16 Juni 1948), presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia melakukan pemeriksaan barisan besar Angkatan Perang Republik Indonesia di lapangan Esplanade (kini lapangan Blang Padang di Banda Aceh). Dalam melakukan pemeriksaan barisan itu, presiden didampingi, antara lain oleh Panglima TNI Komando Sumatera, Jenderal Mayor Soehardjo, Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, Panglima Divisi X, Kolonel Husin Yusuf, dan Komandan Barisan Besar (Komandan Upacara), Kolonel H. Sitompul. Setelah selesai pemeriksaan barisan, presiden dan rombongan berdiri di panggung kehormatan untuk menyaksikan defile barisan angkatan

⁹⁸ Ali. dkk. *Op.cit.*, hlm. 283.

Media Massa dalam Perjuangan....

perang. Di tempat yang sama dilangsungkan pula rapat raksasa yang dihadiri oleh banyak orang.⁹⁹

Puncak acara rapat raksasa di lapangan Blang Padang itu adalah pidato Presiden Sukarno. Dalam pidato itulah Presiden Sukarno menjuluki Aceh sebagai "Daerah Modal Perjuangan Bangsa Indonesia." Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa daerah Aceh pada masa perang mempertahankan kemerdekaan tidak berhasil dikuasai kembali oleh Belanda (kecuali Sabang dan baru dikembalikan oleh Belanda pada tahun 1950). Selain menjuluki Aceh sebagai daerah modal perjuangan bangsa Indonesia, presiden dalam pidatonya juga mengatakan antara lain: "...dari ribuan kilo meter kami datang di sini spesial untuk bertemu dengan rakjat Aceh yang terkenal sebagai satu rakjat jang selalu mendjadi kampiun dan pelopor perdjjuangan kemerdekaan rakjat Indonesia, segenap rakjat Indonesia di tanah Djawa, Sumatera, lain-lian kepulauan Sunda Ketjil, Kalimantan, Sulawesi, memandang arah matanya kepada saudara-saudara".¹⁰⁰

Kegiatan lain yang dilakukan oleh Presiden Sukarno pada 16 Juni 1948 adalah memupuk semangat para wanita. Presiden memberikan penjelasan-penjelasan tentang perjuangan bangsa Indonesia dan ajakan agar para wanita Aceh tidak hanya tinggal diam, tetapi harus berperan aktif dalam perjuangan. Kegiatan itu dilakukan presiden di gedung Atjeh Bioskop (kini bekas bioskop Garuda) di Kutaraja. Dalam pertemuan tersebut disampaikan, antara lain "...Saya datang di sini spesial untuk memberikan keinsyafan dan keyakinan kepada saudara-

⁹⁹*Harian Semangat Merdeka* dengan nomor khusus memberitakan tentang kedatangan Presiden Sukarno ke Aceh. Demikian juga *Harian Kedaulatan Rakjat* Yogyakarta memuat berita "Presiden di Tengah Rakjat Atjeh", Kamis, 17 Juni 1948.

¹⁰⁰*Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Atjeh, Modal Revolusi 45. Seksi Penerangan/Dokumentasi Komite Musjawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Atjeh. Kutaraja, 1960. Hlm. 17.*

Media Massa dalam Perjuangan....

saudara, agar supaya juga wanita Aceh ikut serta mutlak di dalam gerakan kemerdekaan kita....”¹⁰¹

Pada pukul 12.00 hari yang sama, presiden mengadakan pertemuan dengan saudagar Aceh yang tergabung dalam Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA). Pertemuan itu berlangsung di Atjeh Hotel, disponsori oleh para saudagar dalam rangka menjamu rombongan kepala negara. Sebelum jamuan makan dimulai, presiden dalam kata-kata sambutannya telah mengetuk hati para saudagar Aceh untuk ikut serta membantu rencana pemerintah dalam usaha perbaikan perekonomian negara pada masa perjuangan. Selain itu, presiden juga menguraikan situasi negara Republik Indonesia pada waktu itu yang sedang dikepung oleh pihak Belanda sehingga sulitnya hubungan antarpulau dan antardaerah di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menerobos kepungan Belanda dan untuk melancarkan hubungan antarpulau di Indonesia, bangsa Indonesia harus memiliki sejumlah pesawat udara. Untuk itu, menurut presiden, di daerah-daerah lain yang telah dikunjungi telah diinstruksikan untuk membentuk panitia pembelian pesawat udara.

Pada kesempatan tersebut, presiden memintakan kepada para saudagar Aceh untuk menyumbangkan satu pesawat udara jenis Dakota. Harganya pada waktu itu (pesawat bekas) M\$ 120.000 (seratus dua puluh ribu dollar Malaysia) atau sama dengan 25 kilogram emas. Himbauan presiden itu mendapat sambutan meriah dari para saudagar Aceh yang tergabung dalam organisasi GASIDA. Pada waktu istirahat, Teuku Muhammad Ali Panglima Polem (Wakil Residen Aceh),

¹⁰¹ Basry. *Op.cit.* Hlm. 53-68.

Media Massa dalam Perjuangan....

mewakili para saudagar Aceh menyanggupi untuk membeli pesawat udara jenis Dakota, sebagaimana himbauan presiden.¹⁰²

¹⁰²Bukti penyerahan uang untuk membeli dua buah pesawat udara jenis Dakota. T.M.A. Panglima Polim. *Memoir (Tjatatatan) T.M.A. Panglima Polim*. Banda Aceh: Alhambra, tanpa tahun. Hlm. 36--37.

Koetaradja, 28 Augustus 1948.

'Ho.' 4749/4/RA

Lampiran : 2.

Salinan kawat Komandan Angkatan Oedara Komandemen-Soematera tanggal 23 Augoestoes 1948 no.3470/KSU/ 48 dan No.3466/KSU/48.

Dikirim dengan horidat kepada padoeka toean T.P.P

Mohd.Ali Ketoea Panitia Peiabeli K&pfcI Oedara di -

✓ Koetaradja.

Residen Atjeh dari Repoeblik

In

donesia.

dto.

T.M. Daoedsjah.

pt residen atjeh

Salinan.

no. 3470/KSD/48 ttk telah menerima kawat; dari

O.U.3 wiwoko terima cheque: dari pt lagi 120.000

jang 140.000 di terima oleh kami waktu pjn pres

telah kami teroeskan. pada ksu auri djokja

Komodor s surjadharna banjak terimakasih atas bantoean p.t. OU3

wiwoko diranggoon berusaha keras pesawat jang lebih

menguntungkan minta doa penoeh harapan sedia uang sebanjak-

banjaknja oentoek kemoengkinan jang akan datang soeka menerima

kabar tentang ini dari p.t. kami djoega bitjarakan dengan ketoea

komposat.

K.S.A.U. kom Sum bkt

O U T h soejono

Bukit Tinggi 23/8-1948

Salinan:

pt residen seluroh Indonesia

no. 3466/KSU/48 mohon pendjelasan pengumpulan -

fonds dakota selain jang telah diserahkan pada

auri pusat bkt berapa jang telah siap terkumpul

Media Massa dalam Perjuangan....



*Gubernur
Mr. S. M. Amin.*

Acara lain dari kegiatan presiden pada tanggal tersebut melakukan pembinaan kepada para pemuda. Acara itu diselenggarakan di Atjeh Bioskop pada pukul 20.30 Wib., dalam rangka membangkitkan semangat perjuangan para pemuda.

Pada 17 Juni 1948, presiden dan rombongan menuju Pidie dan disambut dengan meriah oleh masyarakat Pidie. Di pidie, presiden melakukan pertemuan di lapangan Kuta Asan Sigli. Hal itu, sebagaimana yang diberitakan melalui harian *Semangat Merdeka*.

Pada pertemuan di Lapangan Kuta Asan, Sigli, presiden, antara lain mengatakan, "marilah, marilah saudara sekalian menyusun persatuan yang demikian kita dapat meneruskan perjuangan kita. Dengan demikian, tidak ada kesempatan sedikit juga bagi musuh untuk kembali menjajah".

Masih pada 17 Juni 1948, presiden dan rombongan melanjutkan kunjungan ke Bireuen. Sebagaimana halnya di Kutaraja dan Sigli, di

dalam pengawasan pt tindasan kepada panitia fond
dakota bkt

Ksukomsmbkt
OUI h sujono

Bukit Tinggi 23/8-1948

oentoek salinan jang seroepe djoeroe oesaha I
dto T. Lizansjah

Media Massa dalam Perjuangan....

Bireuen presiden juga memberikan petuah-petuah kepada masyarakat pada acara rapat tersebut. Hal itu juga diadakan khusus untuk membangkitkan semangat rakyat dalam rangka meningkatkan kewaspadaan untuk mempertahankan kemerdekaan akibat adanya Agresi Militer Belanda.

Pada 19 Juni 1948, presiden beserta rombongan kembali ke Kutaraja dan keesokan harinya, yaitu pada 20 Juni 1948, rombongan presiden kembali ke pulau Jawa. Ketika kunjungan ke Kutaraja, presiden juga melantik Mr. S.M. Amin sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1948. Sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1948, Provinsi Sumatera dibagi atas tiga provinsi, yaitu *pertama*, Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli, dengan gubernurnya Mr. S. M. Amin. *Kedua*, Provinsi Sumatera Tengah, terdiri atas Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, dengan gubernurnya Mr. M. Nasrun. *Ketiga*, Provinsi Sumatera Selatan, yang meliputi Keresidenan Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Bangka-Belitung, dengan gubernurnya Dr. Isa. Gubernur Sumatera, Mr. T. Muhammad Hasan, pada 7 Juni 1948 dilantik oleh Presiden Sukarno menjadi Komisararis Pemerintah Pusat untuk Sumatera, sedangkan Mr. S. M. Amin dilantik di Kutaraja pada 19 Juni 1948.¹⁰³

Realisasi pembentukan Provinsi Sumatera Utara dimulai dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara. Pemilihan anggota Badan Eksekutif yang terdiri atas lima orang dan penetapan ibu kota provinsi dalam suatu rapat yang dilaksanakan di Tapaktuan (Aceh Selatan). Acara itu berlangsung pada 13 hingga 16 Desember 1948, beberapa hari sebelum terjadinya Agresi Militer Belanda II.

¹⁰³"Perkunjungan Presiden Sukarno ke Aceh," *Harian Semangat Merdeka*, 1948.

Media Massa dalam Perjuangan....

Pelantikan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Utara, Mr. S. M. Amin, yang merangkap sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara. Dalam pidato pelantikannya tersebut, Gubernur Sumatera Utara, Mr. S. M. Amin, banyak memberikan pengarahan kepada peserta yang hadir.

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara yang dilantik pada acara tersebut sebanyak 45 orang. Anggota dewan tersebut mewakili Partai Masyumi, PNI (Partai Nasional Indonesia), SOBSI, Partai Komunis Indonesia, Pesindo, Partai Kristen Indonesia, dan Barisan Tani Indonesia. Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara di Tapaktuan juga mengadakan pemilihan anggota Badan Eksekutif sebanyak lima orang, yaitu Teungku Muhammad Nur El Ibrahimy (Partai Masyumi), Muhammad Yunan Nasution (Partai Masyumi), Amelz (Partai Syarikat Islam Indonesia), dan Melanton Siregar (Partai Kristen Indonesia). Dalam sidang tersebut ditetapkan juga Kutaraja sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara.

Keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara di Tapaktuan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hal itu disebabkan, tiga hari setelah selesainya sidang, yaitu pada 19 Desember 1948, Belanda mulai melancarkan Agresi Militer II.

Meskipun dalam keadaan tidak aman, Dewan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tetap berusaha menjalankan pemerintahan. Hal itu, sebagaimana yang telah diputuskan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara di Tapaktuan, seperti pengisian jabatan-jabatan pemerintahan. Pengisian itu kemudian mendapatkan pengesahan dari Komisaris Pemerintah Pusat di Bukittinggi. Jabatan-jabatan yang diisi, antara lain, Jawatan Penerangan dikepalai oleh Oesman Raliby, Jawatan Keuangan dikepalai oleh J.P. Pusposucipto, Jawatan Sosial dikepalai oleh Ali Hasjmy, Jawatan

Media Massa dalam Perjuangan....

Kesehatan dikepalai oleh R. Hadri, Jawatan Pengairan, Jalan-jalan, dan Gedung-gedung dikepalai oleh Ir. Muhammad Taher, Jawatan Perikanan dan Pertanian dikepalai oleh R. Hadri, dan Jawatan Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dikepalai oleh Karim M. Duriat.

Berdasarkan Ketetapan No. 5/GSO/tahun 1949, Daerah Aceh yang merupakan satu di antara keresidenan dalam Provinsi Sumatera Utara, dibagi atas tujuh kabupaten, 21 kewedanaan, dan 102 negeri (setingkat kecamatan). Sekaligus pula diangkat pemimpin dalam pemerintahan di Keresidenan Aceh, yaitu.

No	Jabatan		Nama
1	Residen	:	Teuku Muhammad Daudsyah
2	Bupati d/p (Urusan Pemerintahan)	:	T. M. Amin
3	Patih d/p (Sekretaris)	:	Osman
4	Patih d/p	:	Teungku Maimoen Habsyah
5	Wedana d/p	:	Said Aboebakar
6	Wedana d/p	:	Nyak Mansoer
7	Wedana d/p (Urusan Bangsa Asing)	:	Amiroedin
8	Wedana d/p (Bagian Otonomi)	:	Teungkoc Mahmood Haroen
9	Wedana d/p	:	Tocankoc Ibrahim
10	Tjamat d/p	:	Zainal Abidin
11	Kepala Tata Usaha	:	M. Hoesin
12	Penyantun Usaha	:	Potan Harahap
13	Penyantun Usaha	:	T. Pakeh
14	Penyantun Usaha	:	H. Syamaoen
15	Penyantun Usaha	:	T. Ali Basyah
Nama-Nama Bupati			
No	Kabupaten		Nama

Media Massa dalam Perjuangan....

1	Kabupaten Aceh Besar (Kutaraja)	:	Teungku Zaini Bakri
2	Kabupaten Pidie (Sigli)	:	Teungku Abdoel Wahab
3	Kabupaten Aceh Utara (Lhokseumawe)	:	Teungku Sulaiman Daoed
4	Kabupaten Aceh Timur (Langsa)	:	Teukoe A. Hasan
5	Kabupaten Aceh Tengah	:	Radja Abdoel Wahab
6	Kabupaten Aceh Barat (Meulaboh)	:	Mohammad Hoesin
7	Kabupaten Aceh Selatan (Tapaktuan)	:	M. Sahim Hasjmy

Pemerintah Daerah, baik pada tingkat Provinsi Sumatera Utara, maupun dalam Keresidenan Aceh pada masa Agresi Belanda II, belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu disebabkan perhatian dan kekuatan pemerintah lebih banyak dicurahkan dalam usaha melakukan perlawanan menentang agresi Belanda, terutama setelah daerah Sumatera Timur dikuasai oleh Belanda.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli, yang dibentuk berdasarkan UU No. 10 tahun 1948, tidak berlangsung lama, hanya berjalan sekitar enam bulan. Pada bulan Mei 1949, terjadi lagi perubahan bentuk pemerintahan di Aceh khususnya dan Sumatera pada umumnya. Perubahan itu terjadi setelah keluarnya Ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia No. 21/Pem/PDRI, tanggal 16 Mei 1949. Ketetapan itu, membagi Provinsi Sumatera Utara menjadi dua Daerah Militer. Daerah militer itu, yaitu Daerah Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, dengan Gubernur Militernya Jenderal Mayor Tituler Teungku Muhammad Daud Beureu-e dan Daerah Militer Tapanuli dan Sumatera Timur Selatan, dengan Gubernur Militernya Dr. Ferdinand Lumban Tobing. Dalam ketetapan tersebut

Media Massa dalam Perjuangan....

ditegaskan bahwa segala kekuasaan pemerintah, baik sipil maupun militer, dijabat oleh gubernur militer.

Selanjutnya, dengan Keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, 17 Mei 1949, No. 22/Pem/PDRI, ada pasal I, ditetapkan bahwa "dengan berlakunya pemusatan kekuatan sipil dan militer di daerah-daerah militer istimewa, jabatan gubernur provinsi di Sumatera untuk sementara waktu dihapuskan". Pada pasal II ditetapkan pula bahwa "pengawasan atas daerah-daerah otonom (pemerintah sipil) seperti dimaksud dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948, dilakukan oleh Komisaris Pemerintah". Sementara pasal III (1), dinyatakan bahwa pemerintah sipil dalam keresidenan-keresidenan dijalankan oleh Dewan Pertahanan Daerah atas nama dan bertanggung jawab kepada gubernur militer yang bersangkutan.

Komisaris Pemerintah, seperti yang dimaksudkan dalam pasal II Keputusan PDRI, untuk daerah Sumatera Utara diangkat Mr. S. M. Amin, yaitu berdasarkan ketetapan PDRI 17 Mei 1949, No. 22/Pem/PDRI. Dewan Pertahanan Daerah yang dimaksudkan dalam pasal III (ayat 1) ketetapan PDRI No. 22/Pem/PDRI, dibentuk dengan ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara, 13 Juni 1949, No. 3/KPPSU/P. Untuk Keresidenan Aceh, terdiri atas ketua, yaitu Residen Teuku Muhammad Daudsyah, anggota, yaitu Teungku M. Nur El Ibrahimy, M. Yunan Nasution, Yahya Siregar, dan Amelz.

Dengan adanya ketetapan-ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia tersebut di atas, berakhir pula Provinsi Sumatera Utara. Setelah itu, terbentuk suatu sistem pemerintahan baru dengan adanya daerah militer. Meskipun demikian, di daerah-daerah tersebut masih ada daerah-daerah otonom di bawah pemerintahan sipil.

Pada masa perang kemerdekaan, terlihat adanya dualisme dalam bidang pemerintahan, yaitu pemerintahan sipil dan pemerintahan

Media Massa dalam Perjuangan....

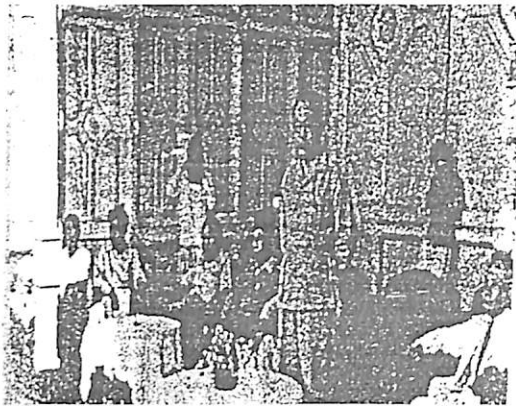
militer. Di antara kedua pemerintahan tidak jelas batas-batas wewenangnya dan kurang terkoordinir.

Kehadiran dua lembaga gubernur pada wilayah yang sama, kerap kali membuat kedua lembaga berada dalam dilema, karena rentang kendali kekuasaan yang belum begitu tegas. Dilema terutama terjadi menyangkut persoalan penggunaan dana. Gubernur Militer Aceh yang merasa lebih berkuasa dalam masalah keamanan, kerap kali melakukan tindakan-tindakan politis dalam penggunaan dana. Sementara Gubernur Sumatera Utara, Mr. S. M. Amin, tidak menyetujui jika berlawanan dengan peraturan yang berlaku. Residen Teuku Chik Muhammad Daudsyah yang bertindak sebagai pemegang kas daerah berada dalam posisi sulit. Apabila terjadi perbedaan di antara kedua figur itu mengenai sesuatu hal, Ali Hasjmy dan T. M. Amin yang pada waktu itu sebagai anggota BP DPA terpaksa ikut campur untuk menengahnya. Permasalahan antara dua lembaga sedikit berkurang sejak Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) mengeluarkan radiogram pada 16 Mei 1949. Radiogram berisi perubahan status Gubernur Sumatera Utara menjadi Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

Dalam posisi seperti itu, beban yang dipikul oleh Teungku Muhammad Daud Beureu-eh sebenarnya bukanlah bertambah ringan, melainkan bertambah berat. Agresi Belanda II telah menyebabkan posisi republik bertambah parah. PDRI yang merupakan ahli waris Pemerintah Republik di Sumatera belum terorganisir dan belum mempunyai markas yang tetap. Akan tetapi, berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain di pedalaman Sumatera Tengah, karena sebagian besar pulau Sumatera telah dikuasai oleh Belanda.

Daerah Aceh sesungguhnya bukan hanya semata-mata berjuang untuk mempertahankan diri dari blokade darat dan laut Belanda, melainkan juga menjaga daerah front Sumatera Timur/Tapanuli dan sekaligus mendukung misi Indonesia di luar negeri. Dalam suasana yang

Media Massa dalam Perjuangan....



Wakil Presiden Muhammad Hatta dalam
Kunjungannya ke Aceh Juli 1949

demikian, logislah apabila menjelang pembukaan Konferensi Meja Bundar (KMB), pemerintah pusat segera menempatkan Wakil Perdana Menteri, Mr. Syarifuddin Prawiranegara, di Kutaraja. Kebijakan itu dimaksudkan supaya ia dapat menggerakkan pemerintah gerilya di Sumatera, sekiranya KMB mengalami kegagalan. Mendapat tugas baru itu, Mr. Syarifuddin Prawiranegara bersama dengan sejumlah staf berangkat dari Yogyakarta pada 23 Agustus 1949 ke Kutaraja untuk menjalankan pemerintahan.

Meskipun KMB hanya berlangsung 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949, Wakil Perdana Mentri, Mr. Syarifuddin Prawiranegara, tetap bermarkas di Kutaraja hingga 20 Desember 1949. Hal itu disebabkan, keputusan konferensi harus pula mendapat ratifikasi dari parlemen kedua belah pihak. Selama di Kutaraja, Wakil Perdana Menteri, Mr. Syarifuddin Prawiranegara, bukan saja sibuk menerima pejabat-pejabat tinggi termasuk Wakil Presiden Mohd. Hatta yang datang berkunjung untuk mendiskusikan politik negara, melainkan juga beberapa kali ia pergi-pulang ke Yogyakarta.¹⁰⁴ Kutaraja selama 4 bulan, seolah-olah merupakan ibu kota kedua republik setelah Yogyakarta.

¹⁰⁴ *Harian Waspada*, 8, 17, 23 dan 30 September 1949. *Haria Waspada*, 25, 27 Oktober dan 16 Desember 1949.

Media Massa dalam Perjuangan....

Keterpaduan rakyat, ketulusan hati, dan ketaatan rakyat Aceh kepada pemimpinnya dan kepada pemerintah pusat, diakui oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta dalam suatu pidatonya ketika mengunjungi Aceh pada 5 Juli 1949. Rombongan wakil presiden yang berkunjung ke Aceh terdiri atas Mr. A.G. Pringgodigdo sebagai Sekretaris Negara, Mr. Ali Satroamijoyo sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Dr. Sukiman sebagai Menteri Dalam Negeri, Muhammad Natsir sebagai Menteri Penerangan, Zainal Baharuddin sebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, A.R. Baswedan sebagai Pegawai Tinggi Negara, dan Syarif Kasim (sultan. Siak). Kunjungan wakil presiden Republik Indonesia ke Aceh adalah dalam rangka meningkatkan pertahanan dan pembangunan negara.

Dalam suatu amanatnya ketika berkunjung ke Aceh, Wakil Presiden Muhammad Hatta, antara lain mengatakan, "sering kita mendengar semboyan, bersatu kita teguh, berpecah kita jatuh. Camkanlah semboyan ini dalam hati saudara-saudara. Baiklah untuk sementara kita lupakan perselisihan antara kita sesama kita yang perselisihan itu kemudian hari mungkin dapat dibereskan secara damai, secara mudah sekali, akan tetapi pokok tujuan kita bersama adalah mencapai rakyat yang makmur, rakyat yang merdeka, rakyat yang sejahtera. Tetapi dalam memperjuangkan cita-cita kita, padulah persatuan, jagalah persatuan, kalau tidak, persatuan kita akan hancur".

Di antara peristiwa penting lainnya yang bersifat nasional, yang peran rakyat Aceh begitu besar dalam rangka memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia adalah pengiriman misi haji. Dalam rangka mencari dukungan luar negeri, dilakukan pengiriman Misi Haji Republik Indonesia II pada bulan September 1949 ke Mekah. Rombongan misi itu juga singgah ke beberapa negara Arab lainnya. Susunan misi haji itu adalah: Teungku Syekh Abdul Hamid Samalanga (Aceh) sebagai ketua, Teungku Muhammad Nur El Ibrahimy (Aceh) sebagai sekretaris. Sebagai anggota adalah: Ali

Media Massa dalam Perjuangan....

Hasjmy (Aceh), A. Kahar Muzakkir (Yogyakarta), Syekh Awab Syahbal (Solo), dan Haji Syamsir (Jakarta).

Di tengah kegembiraan menyambut KMB, elit berkuasa di Aceh sebenarnya dibayangi oleh dua isu yang menimbulkan kekusaran dan ketidakpastian masa depan mereka. Isu yang dimaksud adalah soal otonomi dan tawanan *uleebalang*. Hal itu disebabkan, apabila KMB diratifikasi, permusuhan Indonesia-Belanda akan berakhir dan struktur pemerintah akan diperbaharui. Selama masa revolusi mereka menikmati otonomi yang besar dan bertindak semena-mena terhadap *uleebalang*.

Mengantisipasi situasi yang akan berubah, beraneka cara telah mereka tempuh, di antaranya dengan menerbitkan buku putih yang berjudul *Revolusi Desember '45 di Atjeh ATAU Pembasmian Penghianat Tanah Air*, dikeluarkan oleh Pemerintah R.I. Daerah Atjeh. Akan tetapi, ada sumber yang menyebutkan bahwa konseptor utama buku tersebut adalah Hasan Muhammad Ditiro, kemudian diterbitkan dengan label Pemerintah R. I Daerah Atjeh.¹⁰⁵ Komisaris Polisi M. Insyah dan Gubernur Militer Teungku Muhammad Daud Beureueh melalui surat mereka secara berturut-turut No. 187/Sangat Rahasia tanggal 19 Desember 1949 dan No. 606/Sangat Rahasia tanggal 20 Desember 1949 kepada WKMP, Syarifuddin Prawiranegara, meminta yang bersangkutan mengeluarkan ketetapan pemerintah mengenai kasus *uleebalang*. Tiga orang pemimpin Masyumi, yaitu Teungku Abdulwahab Seulimuem, A. Gani Usman, dan Hasan Ali juga beraudiensi dengan WKPM, Syarifuddin Prawiranegara, yang kebetulan juga tokoh Masyumi untuk membicarakan masalah otonomi dan tawanan *uleebalang*.

Surat dan lobi elit lokal kelihatannya memperoleh banyak hasil. Pada 17 dan 21 Desember 1949, hanya beberapa saat sebelum

¹⁰⁵ Sulaiman. *Op.cit.*, hlm. 179.

Media Massa dalam Perjuangan....

meninggalkan Kutaraja, WKPM Syarifuddin Prawiranegara telah mengeluarkan serangkaian ketetapan. Ketetapan itu, yaitu berkenaan dengan penataan kembali organisasi pemerintahan Republik di Sumatera dan ketetapan tentang abolisi terhadap mereka yang terlibat langsung dalam Perang Cumbok. Selain itu, pembebasan bersyarat terhadap tawanan. Ketetapan itu merupakan kemenangan politisi pihak pemimpin milisi dalam menyongsong pengakuan kedaulatan. Permasalahan tersebut di atas diberitakan beberapa kali oleh Harian Waspada Medan.

7) Aceh Menolak Negara Sumatera

Ketika ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta, dikuasai oleh Belanda pada 19 Desember 1948. Bersamaan dengan itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta bersama beberapa pemimpin lain ditawan oleh Belanda, keadaan Pemerintah Republik menjadi semakin lemah. Dibentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tiga bulan lebih setelah ibu kota Republik Indonesia dikuasai oleh Belanda, datanglah undangan tertanggal 17 Maret 1949 dari Wali Negara Sumatera Timur, Tengku Mansur, kepada Gubernur Militer Aceh, Teungku Mohammad Daud Beureu-e. Undangan tersebut dimaksudkan untuk menghadiri Mukhtar Sumatera yang akan diadakan di Medan pada 28 Maret 1949. Tujuan Mukhtar itu adalah mengadakan hubungan pertama di antara daerah-daerah dan suku-suku bangsa Sumatera yang berbagai macam dan menyatakan pengharapan moga-moga perhubungan yang pertama berangsur-angsur tumbuh menjadi pertalian yang bertambah-tambah eratnya untuk kebahagiaan bangsa Sumatera dan bangsa Indonesia seluruhnya. Utusan yang diundang pada waktu itu adalah Aceh, Tapanuli, Nias, Minangkabau, Bengkulu, Indragiri, Riau, Bangka, Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu.

Media Massa dalam Perjuangan....

Ada tiga pilihan bagi Aceh pada waktu itu. *Pertama*, Aceh dapat meninggalkan Republik Indonesia dan bergabung dengan Negara Sumatera yang akan dibentuk. *Kedua*, peluang untuk menyatakan Aceh sebagai sebuah negara merdeka. *Ketiga*, tetap berada dalam pangkuan Republik Indonesia. Persepsi Aceh terhadap undangan Negara Sumatera Timur itu dimuat dalam surat kabar *Semangat Merdeka* pada 23 Maret 1949, yang memuat pernyataan Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, antara lain, sebagai berikut.

Perasaan kedaerahan di Aceh tidak ada, sebab itu kita tidak bermaksud untuk membentuk suatu Aceh Raya dan lain-lain karena kita di sini adalah bersemangat Republikan. Sebab itu juga, undangan dari Wali Negara Sumatera Timur itu kita pandang sebagai tidak ada saja, dari karena itulah tidak kita balas.

Selanjutnya, dalam surat kabar *Semangat Merdeka*, Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, menyatakan,

Kesetiaan rakyat Aceh terhadap Pemerintah Republik Indonesia bukan dibuat-buat serta diada-adakan, tetapi kesetiaan yang tulus dan ikhlas yang keluar dari hati nurani dengan perhitungan dan perkiraan yang pasti. Rakyat Aceh tahu pasti bahwa kemerdekaan secara terpisah-pisah, negara per negara, tidak akan menguntungkan dan tidak akan membawa kepada kemerdekaan yang abadi.

Demikian semangat persatuan rakyat Aceh di bawah bendera Republik Indonesia yang dinyatakan oleh Teungku Muhammad Daud Beureu-eh. Andaikata tidak demikian tentulah peta Republik Indonesia tidak sebagaimana yang kita lihat dewasa ini.

Media Massa dalam Perjuangan....

8) Maklumat Pemerintah

Surat kabar juga begitu berperan dalam menyampaikan pesan perjuangan dan amanat pemerintah kepada masyarakat. Hal itu, seperti yang dilakukan oleh harian *Semangat Merdeka* yang banyak memuat berita tentang maklumat pemerintah dan pesan perjuangan untuk disampaikan kepada masyarakat. Di antara berita yang dimuat oleh harian *Semangat Merdeka* berkaitan dengan pemerintahan, di antaranya sebagai berikut.

MAKLOEMAT OELAMA SELOEROEH ACEH

Perang Doenia Kedoea jang maha dahsjat telah tammat. Sekarang di barat dan di timur oleh 4 keradjaan jang besar sedang diatoer perdamaian doenia jang abadi oentoek keselamatan machloek Allah. Dan Indonesia tanah toempah darah kita telah dimakloemkan kemerdekaannja kepada seloeroeh doenia serta telah berdiri Repoebliek Indonesia di bawah pimpinan jang moelia maha pemimpin kita Ir. Soekarno.

Belanda adalah satoe keradjaan jang ketjil serta miskin satoe negeri jang ketjil, lebih ketjil dari daerah Atjeh, dan telah hantjoer leboer, mereka telah bertindak melakoekan kechianatannja kepada tanah air kita Indonesia jang soedah merdeka itoe oetoekek didjadjahnja kembali. Kalaoe maksoed jang djahannam itoe berhasil, maka pastilah mereka akan memeras segala lapisan rakjat, merampas semoea harta benda negara dan harta rakjat dan segala kekajaan jang kita koempoelkan selama ini akan moesnah sama sekali. Mereka akan memperboedak rakjat Indonesia mendjadi hambanja kembali dan menjalankan oesaha oetoekek menghapoes agama Islam kita jang soetji serta menindis dan menghambat kemoeljaan dan kemakmoeran bangsa Indonesia.

Di Djawa bangsa Belanda dan kaki tangannja telah melakoekan kegasannja terhadap Kemerdekaan Repoebliek

Media Massa dalam Perjuangan....

Indonesia hingga terdjadi pertempoeran di beberapa tempat jang achimja kemenangan berada di pihak kita. Soenggoehpoen begitoe, mereka beloem joega insaf. Segenap lapisan rakjat telah bersatoe padoe dengan patoeh berdiri di belakang maha pemimpin Ir. Soekarno oentoek menoenggoe perintah dan kewajiban jang akan didjalankan. Menoeroet kejakinan jang diseboet "Perang Sabil". Maka pendjadjah wahai bangsakoe, bahwa perdjoeangan ini adalah sebagai samboengan perdjoeangan dahoeleoe di Atjeh jang dipimpin oleh Almarhoem Teungkoe Tjik di Tiro dan pahlawan2 kebangsaan jang lain.

Dari sebab itoe, bangoenlah wahai bangsakoe sekalian, bersatoe padoe menjoesoen bahoe mengangkat langkah madjoe ke moeka oentoek mengikoet djedjak perdjoeangan nenek kita dahoeleoe, toendoeklah dengan patoeh akan segala perintah2 pemimpin kita oentoek keselamatan Tanah Air, Agama, dan bangsa.

Koetaradja, 15-10-1945

Atas nama Oclama Seloeroeh Atjeh

Teungku Hadji hasan Kroeng Kale Tgk. M Daoed Beureu-eh
Tgk. Hadji Dja'far Sidik Lajabat

Tgk. Hadji Ahmad Hasballah Indrapoeri

Diketahoei oleh
Residen Atjeh
T. Nja' Arif

Disetoejoei oleh Jml. T.B.
Jml. Ketoea Komite Nasional
Toeankoe Mahmoed

Media Massa dalam Perjuangan....

Surat kabar harian *Semangat Merdeka* juga memuat beritan tentang pidato Gubernur Sumatera Utara pada sidang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara di Tapaktuan pada 13 Desember 1948. Isi pidato yang dimuat pada harian *Semangat Merdeka*, sebagai berikut.

Paduka Tuan-tuan yang terhormat !

Sudah pada tempatnya bilamana saya terlebih dahulu mengucapkan kata-kata penghargaan terhadap Tuan-Tuan yang telah memenuhi undangan untuk hadir pada saat ini di tempat ini. Saya mengetahui, bahwa di dalam keadaan yang sulit sekarang ini, terutama mengenai perhubungan, maka adalah hadirnya Paduka Tuan-Tuan di tempat ini suatu bukti tentang perhatian Tuan-Tuan terhadap kesempurnaan negara kita.

Seterusnya saya mengucapkan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah mengizinkan kita semua pada saat ini berkumpul di ruangan ini di kota Tapaktuan di pantai Atjeh Barat yang indah permai ini, dengan maksud melaksanakan kewajiban yang diletakkan atas bahu kita masing-masing, yaitu kewajiban membentuk Dewan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Kewajiban ini adalah untuk menyempurnakan bunyi Undang-Undang No. 10 tahun 1948 yang telah disusun sebagai akibat dari Undang-Undang Dasar kita yang menghendaki supaya daerah-daerah kesatuan dalam Republik kita ini mempunyai pemerintahan yang bercorak demokratis.

Bilamana nanti Dewan perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah terbentuk, maka dapatlah dinyatakan, bahwa kita telah memperoleh kemajuan selangkah lagi dalam usaha kita menuju ke arah pembentukan negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat; suatu negara dimana segala sesuatu dilaksanakan atas dasar keinginan rakyat umum; dimana setiap tindakan dilakukan untuk kepentingan bersama, dimana setiap warga negara, dengan tidak memandang bangsa, agama atau jenis, mempunyai kedudukan yang sama; dimana setiap penduduknya dapat hidup

Media Massa dalam Perjuangan....

di dalam kebahagiaan dan kesentosaan, terlepas dari setiap ancaman dan perasaan takut atau cemas.

Paduka Tuan-Tuan yang terhormat,

Negara yang sedemikian rupa masih menyerupai suatu cita-cita; masih jauh jalan yang harus kita lalui sebelum cita-cita itu menjelma menjadi kenyataan; masih banyak kesukaran-kesukaran, kesulitan-kesulitan dan rintangan yang harus diatasi. Marilah kita sumbangkan tenaga, fikiran, harta, dan bila perlu jiwa kita sekalipun dalam usaha menegakkan negara yang kita cita-citakan itu.

Paduka Tuan-Tuan yang terhormat,

Pembentukan D.P.S.O. yang akan kita lakukan ini adalah salah satu daripada usaha-usaha untuk mendekatkan tibanya suatu saat dimana kita dapat mempersaksikan penjelmaan cita-cita kita itu dari alam keinginan ke alam kenyataan. Pembentukan Dewan ini adalah suatu pekerjaan yang tidak sukar, suatu pekerjaan tidak menghayati pengorbanan fikiran ataupun tenaga. Yang menghayati fikiran dan tenaga, yang menghayati kepatuhan, keteguhan hati, kesabaran, ketenangan, yang akan memberikan ujian yang memberi ujian yang sehebat-hebatnya pada kita, adalah pelaksanaan segala kewajiban dan hak-hak yang terkandung dalamnya dan yang terpikul atas kita bersama sebagai wakil rakyat. Pelaksanaan segalanya ini dengan sempurna, menghendaki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Antara lain:

Kita harus mempunyai keyakinan, bahwa perobahan yang akan diakibatkan oleh Undang-Undang No. 10 tahun 1948 ini, memang adalah suatu perobahan yang akan membawa kita ke arah perbaikan. Pertimbangan yang bersifat subjektif, dan mengenai kepentingan diri sendiri dan yang mungkin dapat dijadikan sebagai alas dan untuk menentang maksud Undang-Undang perobahan ini, hendaklah kita basmi dari hati sanubari kita. Perobahan pemerintahan yang akan dilaksanakan ini membawa perobahan prinsipil dan perobahan yang bersifat

Media Massa dalam Perjuangan....

radikal. Sampai pada saat ini maka dasar pemerintahan daerah adalah kesatuan keresidenan; kesatuan keresidenan ini adalah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang terutama bersifat etnologis. Keresidenan Aceh didasarkan atas kesatuan Aceh; keresidenan Tapanuli atas kesatuan Batak; Keresidenan Sumatera Timur atas kesatuan Melayu. Nyatalah kepada kita, bahwa bentukan kesatuan ini didasarkan atas kesatuan kebangsaan yang sempit; suatu dasar yang seharusnya tidak layak lagi dipergunakan di dalam Republik kita.

Oleh karena itu, maka pembentukan provinsi yang akan kita laksanakan ini, tidaklah lagi didasarkan atas dasar yang lama, akan tetapi atas dasar baru, yaitu atas dasar-dasar yang mengenai persatuan ekonomi, politik, dan lain-lain.

Paduka Tuan-Tuan yang terhormat,

Corak pemerintahan yang dijelmakan ini, adalah demokratis, bukanlah suatu hal yang baru. Memang cara pemerintahan yang demikian rupa adalah sesuai dengan adat pemerintahan di daerah itu. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa perobahan yang diakibatkan oleh Undang-Undang No. 10 tahun 1948 ini tidak akan mengakibatkan kegelisahan di kalangan penduduk.

Untuk daerah Aceh dan Sumatera Timur hal ini berlainan sedikit. Daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang sejak berabad-abad lamanya tidak mengenal pemerintahan yang bercorak collegial; sejarah daerah-daerah ini meriwayatkan bahwa penduduk daerah-daerah ini sejak beratus tahun lamanya hidup di bawah perintah sultan dan uleebalang, yang melaksanakan pemerintahan secara diktatorial. Oleh Karena itu, maka mungkin penduduk di daerah-daerah yang tersebut mula-mula akan merasa canggung menghadapi perobahan ini.

Akan tetapi, sekalipun begitu, keyakinan ada pada kami, bahwa pada akhirnya, dengan mengingat pada pengalaman yang diperoleh selama tiga tahun lamanya, sejak saat pemakluman kemerdekaan bangsa kita sampai dewasa ini, penduduk daerah-

Media Massa dalam Perjuangan....

daerah Aceh dan Sumatera Timur pun akan dapat menyesuaikan diri dengan akibat-akibat dari perobahan.

Tuan-tuan yang terhormat,

Saya percaya dan yakin, bahwa tidak ada seorangpun di antara kita yang tidak mempunyai kepercayaan, bahwa kita semua, sebagai warga Negara dan wakil rakyat, cukup mempunyai pemandangan luas. Kita sanggup menyampingkan kepentingan keresidenan yang selama ini kita pelihara, untuk kepentingan suatu kesatuan yang lebih luas.

Perobahan pemerintahan ini sedikit banyaknya akan mengakibatkan kerugian; akan tetapi sebaliknya juga keuntungan. Dan marilah kita insafi, bahwa keuntungan jauh lebih besar dari kerugian. Kerugian sebagai akibat dari perobahan ini adalah semata-mata kerugian yang mengenai individu (seseorang); mungkin ada pangkat-pangkat yang sampai saat ini memberikan kekuasaan besar, akan terhapus ataupun memperoleh sifat tidak senang yang semata-mata diakibatkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang berdasar atas kepentingan diri sendiri. Marilah kita atasi setiap perasaan yang berakar dalam pertimbangan yang mengenai kebangsaan yang sempit ataupun yang mengenai perbedaan agama. Negara kita berdasar antara lain atas kebangsaan yang satu, bangsa Indonesia; tidak ada tempat untuk bangsa Aceh, bangsa Batak ataupun bangsa Melayu; bagi Negara hanyalah satu bangsa; bangsa Indonesia yang terdiri dari beberapa golongan, yaitu yang berasal dari daerah Tapanuli, daerah Aceh, daerah Sumatera Timur dan seterusnya. Perbedaan agama bagi kita bukanlah menjadi soal. Kita bebas menganut agama yang kita percayai menurut keyakinan kita; perbedaan agama tidaklah sekali-sekali memecah persatuan kebangsaan kita.

Paduka Tuan-Tuan yang terhormat,

Pelaksanaan Undang-Undang tentang perobahan pemeritntahan ini adalah berlangsung pada suatu masa yang mengandung kesulitan dan kegentingan, baik yang bersumber

Media Massa dalam Perjuangan....

sendiri dari kepentingan umum, dapatlah hendaknya berubah dalam masa depan.

Bila keinsafan yang dimaksud telah menjelma dalam hati kedua golongan tadi, niscaya kepercayaan yang mulai lenyap itu akan tiba kembali dan segala sesuatu akan berjalan lebih lancar dari pada waktu yang sudah-sudah.

Paduka Tuan-Tuan yang terhormat,

Kita bersidang untuk melaksanakan pembentukan Dewan Perwakilan untuk Provinsi Sumatra Utara, dewan ini pada saat ini belum ada dan oleh karena itu belumlah dapat diberikan pemandangan-pemandangan mengenai pengalaman-pengalaman Dewan ini pada masa yang lampau. Hal-hal yang dapat dikemukakan dari pengalaman-pengalaman untuk dijadikan bahan bagi mengadakan rancangan pekerjaan untuk masa depan, belum ada. Akan tetapi, sekalipun begitu, baik juga rasanya kami memberikan pemandangan secara ringkas tentang suasana yang meliputi Negara kita dewasa ini.

Kita mengetahui, bahwa oleh Wakil Presiden kita dengan pihak Belanda, sekarang sedang dilakukan pembicaraan sebagai persiapan untuk perundingan yang akan dilaksanakan / kembali. Nampaknya belum dapat juga diatasi segala kesulitan-kesulitan yang menjadi halangan dan rintangan untuk memperoleh persetujuan antara Republik dengan Belanda. Mengingat keadaan yang demikian rupa maka adalah pada tempatnya, bilamana seluruh rakyat Indonesia tetap memberi sokongan yang sebaik-baiknya kepada Pemerintah Pusat; sokongan batin maupun sokongan lahir. Salah satu dari bantuan yang berharga adalah, disiplin nasional, yang harus kita tunjukkan. Seterusnya keinsafan yang sungguh-sungguh pada setiap warga negara tentang kewajiban mereka terhadap negara.

Media Massa dalam Perjuangan....

Tidak dapat dimungkiri, bahwa keadaan dalam negeri dewasa ini menyerupai suatu keadaan yang menimbulkan kecemasan bagi setiap orang yang menghendaki kebahagiaan dan kesentosaan bagi setiap Warga Negara. Pokok dari segala kesulitan ini adalah menurut faham kami keadaan ekonomi kita yang sangat jauh letaknya dari tingkatan kesempurnaan. Makanan-makanan dan barang-barang yang sangat dibutuhkan, membubung harganya, sehingga sebagian besar dari warga negara, terutama mereka yang memperoleh nafkah dengan cara memburuh ataupun menjadi pegawai negeri, tidak sanggup memperoleh barang-barang untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Membubungnya harga barang-barang adalah di dalam keadaan kita sekarang ini, menurut faham kami, akibat dari perimbangan yang tidak sehat di antara jumlah barang-barang yang diperjualbelikan dan jumlah wang yang ada di dalam peredaran.

Berdasar atas ini, maka adalah kewajiban utama dari pemerintah, mengembalikan perimbangan yang sehat. Caranya antara lain adalah, memperbanyak produksi dan membatasi percetakan wang. Memperbanyak produksi dapat dilaksanakan dengan mengerahkan setiap tenaga berlebihan ke arah pertanian, perindustrian, perternakan dan sebagainya. Rasionalisasi dalam setiap jabatan Pemerintahan perlu dilaksanakan secepat mungkin dan setiap tenaga yang berlebihan, hendaklah dijadikan tenaga yang produktif. Juga pengeluaran wang perlu dihematkan. Kontrol (pengawasan) atas pengeluaran wang sangat dihadjati.

Bilamana dengan cara demikian telah dapat diperoleh keuangan yang lebih sehat barulah dapat diarahkan perhatian sepenuhnya terhadap lapangan-lapangan lain. Kecerdasan rakyat dapat dipertinggi dengan pendirian sekolah-sekolah dan perbaikan alat-alat pelajaran. Kesehatan rakyat dapat memperoleh

Media Massa dalam Perjuangan....

perhatian secukupnya dengan cara mendirikan rumah-rumah sakit dan mengadakan obat-obat seperlunya. Perbubungan dan lalu-lintas dapat diperbaiki dengan mengadakan jalan-jalan, jembatan-jembatan, telepon, telegrafi yang sempurna. Kehewanan, pertanian, dengan pendek kata, segala sesuatu akan dapat dirobah ke arah perbaikan.

Paduka Tuan-Tuan yang terhormat,

Kita semua insaf, bahwa segala sesuatu hanya dapat berjalan dengan baik, bilamana tenaga manusia dapat dipergunakan dengan sempurna. Kesempurnaan pemakaian tenaga manusia ini hanya dapat dicapai bila manusia yang memberikan tenaga itu dapat hidup dalam keadaan serba cukup. Bila ia hidup dalam keadaan serba kekurangan, niscaya kewajiban yang terpikul atas dirinya itu tidak mudah dapat dilaksanakan dengan sempurna. Oleh karena itu, maka adalah perhatian terhadap nasib pegawai, juga salah satu dari kewajiban-kewajiban mana bagi kita di masa depan.

Paduka Tuan-Tuan yang terhormat,

Sebagai anggota Dewan Perwakilan, terpikul atas Paduka Tuan-Tuan kewajiban mengemukakan dan membicarakan soal yang mengenai kepentingan masyarakat dan seterusnya berusaha, peraturan-peraturan yang perlu bagi masyarakat, dapat dijadikan undang-undang, sehingga kehidupan dalam masyarakat teratur di atas dasar Undang-Undang Pemerintah. Untuk mengetahui segala sesuatu yang mengenai keperluan umum sangat perlu anggota Dewan Perwakilan itu senantiasa memelihara perhubungan yang erat dengan masyarakat yang diwakilinya itu.

Di samping perhubungan yang bersifat informatoris ini perlu juga dipelihara perhubungan yang bersifat "opvoedend" (mendidik). Maka adalah juga kewajiban dari wakil rakyat, memberikan pendidikan kepada

Media Massa dalam Perjuangan....

masyarakat yang diwakilinya itu, agar masyarakat itu mencapai suatu tingkatan kecerdasan yang dapat mendekati kecerdasan bangsa lain di dunia ini. Terutama perlu diinsafkan pada mereka, hal-hal yang dapat membawa mereka pada suatu tingkatan kecerdasan yang sanggup menerima fikiran-fikiran baru yang dewasa ini menjadi fikiran yang dipupuk dalam hati sanubari setiap bangsa yang beradab di dunia ini.

Marilah kita berusaha dengan setiap kuasa yang ada pada kita, mendidik bangsa kita sedemikian rupa, sehingga mereka dapat menerima dan mengerti makna dan arti dasar-dasar negara kita sebagai tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita! perikemanusiaan, ketuhanan yang Maha Esa, Keadilan sosial, Kedaulatan Rakyat, dan Kebangsaan.

Marilah kita berusaha supaya mereka dapat menyelaraskan diri dengan keadaan-keadaan sebagai akibat dari dasar-dasar negara kita itu. Dapatlah hendaknya mereka insafi, bahwa memang sudah semestinya, setiap warga negara Indonesia, dengan tidak memandang agama, bangsa atau jenis, mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum negara, dan sebagai akibat dari kedudukan yang sama ini mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama; bahwa setiap warga negara bebas menganut agama atau faham yang disukainya, bahwa sikap kita terhadap setiap bangsa, baik yang berwarna kuning, hitam ataupun putih adalah sikap yang didasarkan atas perikemanusiaan.

Fikiran-fikiran ini adalah ide yang dimiliki oleh setiap bangsa yang telah meningkat pada tingkatan kecerdasan yang tinggi dan setiap gerak-gerik mereka dipengaruhi oleh ide ini.

Paduka Tuan-Tuan yang terhormat,

Media Massa dalam Perjuangan....

Kenyataan membuktikan, bahwa sebahagian dari rakyat umum belum lagi cukup mengetahui dengan jelas pokok-pokok (elementaire beginselen) dari pemerintahan kita yang bercorak kedaulatan rakyat. Masih sangat perlu ditegaskan kepada mereka:

bahwa kedaulatan rakyat yang dimaksud bukan sekali-kali berarti bahwa setiap warga negara pada setiap saat dan kesempatan berhak menuntut perubahan atau perbaikan dari sesuatu keadaan yang dianggapnya tidak sempurna, akan tetapi hak kedaulatan rakyat itu adalah dimiliki dan dilaksanakan oleh wakil-wakil dari rakyat yang melaksanakan hak itu sebagai anggota Dewan Perwakilan dalam sidang-sidang dewan itu.

Bahwa di dalam organisasi pemerintahan bukanlah sekali-kali instansi-instansi Pemerintahan mempunyai kedudukan yang sama satu dengan lain, akan tetapi instansi-instansi itu juga mempunyai tingkatan-tingkatan (deradjat) serta hak dan kewajiban yang berlainan satu dengan lain.

Bahwa perhubungan dari instansi-instansi itu, satu dengan lain, adalah secara hirarki, bahwa adalah suatu keajaiban dan suatu kejadian yang bertentangan dengan pokok, Hukum Tata Negara, bilamana instansi rendahan menuntut kepada instansi tinggi supaya instansi tinggi ini memberikan pertanggungjawaban tentang suatu peristiwa yang kejadian di daerah pemerintahan instansi rendahan sendiri; oleh karena yang dapat menuntut pertanggungjawaban itu sebenarnya adalah instansi tinggi kepada instansi rendahan, yang berkewajiban memberikan pertanggungjawaban ini di dalam masa yang sesingkat-singkatnya.

Bahwa pembentukan daerah-daerah otonomi yang di dalam masa yang singkat akan diusahakan, tidaklah sekali-kali berarti daerah otonomi ini akan terpisah dari Pemerintah Pusat dan akan berhak seluas-luasnya membentuk peraturan yang mengenai daerah itu, akan

Media Massa dalam Perjuangan....

tetapi pemberian otonomi itu hanyalah, pencerahan oleh pemerintah pusat pada daerah yang tersebut, penyelenggaraan beberapa urusan-urusan negara yang tertentu dan selama ini termasuk pada kompetensi pemerintah pusat, sedangkan hubungan dengan pemerintah pusat tetap ada.

Paduka Tuan-Tuan yang terhormat,

Salah faham tentang hal-hal tadi adalah suatu faktor yang terpenting dari sebab-sebab yang mengakibatkan kurang lancarnya perjalanan pemerintahan pada waktu yang lewat. Atas paduka tuan-tuan sebagai wakil rakyat yang bertanggung jawab, terlelak kewajiban yang utama, memberikan penerangan dan penjelasan secukupnya. Moga usaha tuan-tuan kejurusan ini membawa hasil-hasil yang nyata sehingga perjalanan pemerintahan dalam masa yang akan datang menjadi lebih sempurna dari masa yang sudah.

Paduka Tuan-Tuan yang terhormat,

Saat untuk pelantikan Tuan-Tuan sebagai anggota Dewan Perwakilan Sumatera Utara telah tiba. Sebelum menyatakan pelantikan Paduka Tuan-Tuan sebagai anggota D.P.S.O., ada baiknya saya terlebih dahulu mengemukakan beberapa hal yang hendaknya dapat senantiasa menjadi perhatian bagi kita bersama.

Keanggotaan sesuatu Dewan Perwakilan menempatkan seseorang pada suatu kedudukan yang teristimewa dan memberikan padanya hak-hak luar biasa. Dapatlah hendaknya paduka tuan mempergunakan hak-hak itu dengan sempurna untuk kepentingan rakyat umum, bukan untuk segolongan atau seseorang.

Kita insafilah hendaknya, bahwa kita tidaklah duduk dalam dewan perwakilan ini sebagai wakil seseorang ataupun sesuatu golongan untuk mempertahankan kepentingan seseorang atau sesuatu golongan, akan tetapi

Media Massa dalam Perjuangan....

kita adalah wakil rakyat penduduk negeri seluruhnya dan kepentingan merekalah yang harus kita pertahankan, sekalipun keanggotaan kita itu adalah sebagai akibat dari usaha seseorang atau sesuatu golongan.

Paduka Tuan yang terhormat,

Keanggotaan dewan perwakilan ini memberikan seterusnya kepada seseorang hak mengemukakan pendapatnya tentang sesuatu soal dan melakukan pembicaraan dalam sidang dewan tersebut dengan cara yang bebas. Undang-undang negara menjamin, bahwa seorang anggota tidak dapat dituntut berhubung dengan pembicaraannya di rapat dewan perwakilan. Hak luar biasa ini hendaklah dapat kita pergunakan dengan sempurna dan hendaklah kita insafi, bahwa hak ini bukan sekali-kali mengandung arti, bahwa kita sebagai anggota dapat melahirkan pikiran di sidang dengan tidak menghiraukan segala sesuatu yang diwajibkan harus diperhatikan, baik oleh agama, adat, sopan santun, peri kemanusiaan, tata tertib, peraturan dan sebagainya. Kebebasan dengan tidak terbatas, berarti kebebasan liar, yang menyerupai anarki.

Oleh karena itu dapatlah kita hendaknya mengemukakan fikiran kita dalam sidang ini dengan cara teratur, dengan tidak memperkosa syarat-syarat yang diingini oleh agama, adat, sopan santun, peri kemanusiaan, tata tertib, peraturan negara; lepas dari pengaruh perasaan takut, lepas dari pertimbangan yang mengenai kepentingan diri sendiri, kepentingan seseorang, ataupun kepentingan sesuatu golongan.

Paduka Tuan-tuan yang terhormat,

Pada saat yang bersejarah ini, di ruangan tempat kita berkumpul di kota Tapaktuan yang terletak di pantai barat Aceh Selatan, saya umumkan pembentukan D.P.S.O. yang

Media Massa dalam Perjuangan....

beranggota sejumlah 45 orang, yaitu terdiri dari Tuan-tuan:

Teungku Ismail Jacob Soetikno P. S. Amelz H. Moetafa Salim Karim M. Doeryat M. I. Daoed Abd. Moekti Apan Daulay Tgk. A. Wahab M. Abdoeh Sjam M. Saridin Bagindo Boedjang Tgk. Mohd. Noer Ibrahimy Hadely Hasibuan A. Sutardjo A. Xarim M.S. Agus Salim Herman Siahaan H. Abd. Rahman Sjihab M. Joesoef Abdoellah Dr. Gindo Siregar Dr. R. Sunario	Bachtiar Joenoes Dr. Cashmir Harahap D. Dyar Karim M. Siregar Kario Siregar Nulung Sirait M. Hutasoit M. Yunan Nasution S. M. Tarigan Lokot Batocbara A. St. Soaloan S. M. Simandjuntak Mr. H. Silitonga Mr. R. L. Tobing Dr. H. L. Tobing Dr. Warsito Fachroedin Nasution Abd. Hakim Rustelumbanua Patuan R. Natigor St. Mangaradja Muda Hadji A. Azis Jahja Siregar.
--	--

Setelah mengucapkan selamat bahagia kepada anggota-anggota tersebut, maka seterusnya saya nyatakan pembukaan rapat pertama dari sidang pertama Dewan Perwakilan Sumatra Utara. Moga-moga sidang pertama ini akan membawa basil yang nyata bagi bangsa dan negara kita.¹⁰⁶

M e r d e k a !

¹⁰⁶ Insider (S.M. Amin). *Atjeh Sepintas Lalu*. Djakarta: Fa Archapada, 1950. Hlm. 1004-115.

Media Massa dalam Perjuangan....

Harian *Semangat Merdeka* pada tahun 1948, memuat Maklumat Gubernur Sumatera Utara, Mr. S.M. Amin. Isi maklumat tersebut, menyerukan kepada segenap penyelenggara pemerintahan untuk melakukan tugasnya dengan baik dan rasionalisasi jabatan dalam pemerintahan agar terjadi perbaikan dalam pemerintahan. Isi maklumat, sebagai berikut.

Maklumat

Hasrat sebahagian besar dari penduduk daerah ini untuk memperbaiki pemerintahan daerah dengan cara perubahan susunan pegawai-pegawai, adalah cita-cita yang juga telah lama dalam kandungan pemerintah. Pemerintah di dalam hal ini telah mengambil suatu ketetapan, dengan selekas mungkin menjalankan "rasionalisatie" dalam setiap jabatan.

Akan tetapi pemerintah sekali-kali tidak dapat menyetujui keinginan yang hendak melaksanakan perubahan dengan serta merta, atas tuduhan-tuduhan, yang tidak atau belum nyata berdasar atas alasan-alasan yang tepat dan terbukti kebenarannya.

Cara melaksanakan rasionalisatie yang dikehendaki oleh pemerintah adalah suatu cara yang teratur dengan undang-undang dan cara yang menyimpang dari undang-undang ini adalah suatu cara yang berarti kerugian bagi negara.

Oleh karena itu, dinasihatkan kepada setiap orang yang menghendaki perbaikan pemerintahan, supaya mereka menaruh perhatian atas bunyi dan maksud maklumat ini dan jangan sekali-kali melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan kehendak pemerintah.

Pemerintah tidak akan segan-segan, bila perlu, mempergunakan segala alat kekuasaannya untuk mengatasi suatu kepentingan yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan

Media Massa dalam Perjuangan....

seseorang, sekalipun tindakan itu dilakukannya dengan maksud dan tujuan yang suci.

Kutaradja, 20 Agustus 1948
Gubernur Sumatera Utara
Mr. S. M. Amin¹⁰⁷

Harian *Semangat Merdeka* pada tahun 1948, memuat pula berita tentang isi maklumat Gubernur Militer Atjeh, Langkat, dan Tanah Karo, Teungku Muhammad Daud Beureu-eh. Isi maklumat tersebut, menyerukan supaya masyarakat jangan terpengaruh oleh gerakan Said Ali yang telah mengacaukan keamanan di masyarakat dengan gerakannya. Pemerintah akan melakukan tindakan terhadap gerakan tersebut karena dianggap merong-rong pemerintah. Isi maklumat itu, sebagai berikut.

Maklumat No. GM-14-M.

Kepada sekalian penduduk di daerah ini !

Pada tanggal 3 November 1948 pemerintah telah mengambil tindakan terhadap gerakan Said Ali c.s.¹⁰⁸ yang terus

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm. 102.

¹⁰⁸ Perilaku elit berkuasa dalam menjalankan roda pemerintahan di Aceh menimbulkan perasaan tidak puas di kalangan masyarakat luas pada waktu itu. Sayid Ali Assagaf, putra seorang pemilik kebun kelapa di Kutaraja, segera memelopori gerakan protes terhadap elit berkuasa. Mengirim rekes pertama bersama Teungku M. Asyek pada 18 Juli 1947. Kemudian bersama Waki Harun beserta lima orang figur lainnya di Kutaraja mengirim lagi surat rekes pada 13 Maret 1948 kepada Gubernur Sumatra, Mr. T.M. Hasan, di Bukittinggi dan Gubernur Muda Sumatera Utara, Mr. S.M. Amin, di Kutaraja. Surat itu berisikan keluhan mereka terhadap perilaku pemimpin milisi di Aceh, seraya memohon pemerintah untuk melakukan koreksi. Lebih lanjut lihat Sulaiman. *op.cit.*, hlm. 203-211.

Media Massa dalam Perjuangan....

menerus menghasut sebahagian rakyat untuk mengadakan revolusi umum sebagai sambungan gerakan mereka pada tanggal 18 Agustus 1948 yang baru lalu.

Orang-orang yang mengepalai gerakan ini yang juga turut campur dalamnya telah ditangkap untuk diadili.

Setelah maklumat gubernur Sumatera Utara tanggal 20 Agustus 1948 dikeluarkan berkenaan dengan soal tersebut itu, mereka telah berkali-kali dinasehati agar jangan berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan kekeruhan dan kekacauan yang akan merugikan negara dan penduduk seumumnya, akan tetapi mereka tiada mengindahkan, bahkan dengan diam-diam dan dengan cara licin mereka mengadakan berbagai usaha hasutan untuk menggerakkan sebahagian rakyat guna meneruskan maksud mereka yang sangat merugikan bagi keselamatan negara dan penduduk seumumnya.

Oleh karena itu, dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap keselamatan negara beserta ketentraman umum, maka pemerintah merasa perlu mempergunakan alat kekuasaannya mengambil sikap sebagai tersebut di atas.

Maka kepada penduduk dan sekalian rakyat yang tiada tersangkut paut dalam soal ini, diharap tenang dan tenteram dalam keadaan apapun juga.

Pemerintah bertindak dengan segala kebijaksanaan yang ada padanya.

Demikianlah agar rakyat dan segenap penduduk mengetahuinya.

Kutaraja , 4 Nopember 1948

Gubernur Militer Atjeh, Langkat, dan Tanah Karo
Teungku Muhammad Daud Beureu-eh.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Insider (S.M. Amin). *Op.cit.*, hlm. 103.

Media Massa dalam Perjuangan....

Pada 27 Desember 1949, harian *Semangat Merdeka* memuat pidato Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara di Kutaraja. Isi pidato itu, sebagai berikut.

Saudara- sekalian,

Pada saat jang bersedjarah ini, — saat jang membuka pintu gerbang kedaulatan jang akan memberikan djaminan lebih besar kepada bangsa Indonesia, tertjapainja tjita² kita bersama, kebahagiaan, kesentosaan, kesedjahteraan, kemakmuran, ketenteraman dan keamanan, — dengan mengutjapkan sjukur ke hadirat Allah Subhana Wata'ala, saja berhadapan dengan hadirin dan hadirat guna mengutjapkan kata sepatah dua untuk memenuhi suatu kewadjiban jang terletak atas pundak saja; suatu kewadjiban jang akan saja laksanakan dengan perasaan terharu, disebabkan kewadjiban jang sedemikian adalah oleh saja dirasa sebagai kehormatan jang tidak terhingga.

Pada saat ini berlangsung di suatu tempat jang beribu mil djauh letaknja dari tempat kita ini. Suatu upatjara penyerahan kedaulatan atas Indonesia, oleh Pemerintah Keradjaan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia Sjarikat.

Dengan upatjara ini maka berakhirlah suatu keadaan jang lelah lama mendjadi suatu pokok perselisihan di antara dua aliran di dunia ini; aliran reaksionair dan aliran progressief. Aliran jang menjerupai suatu kekuasaan dengan pengikut² jang tidak sedikit djumlahnja, jang bertebaran di seluruh kota dan desa, di seluruh pelosok dari setiap Negeri di atas dunia jang luas ini, pada satu fihak, berlawanan dengan aliran progressief jang djuga menjerupai suatu kekuasaan jang maha hebat dan djuga mempunjai pengikut² jang bukan sedikit djumlahnja serta djuga bertebaran di seluruh

Media Massa dalam Perjuangan....

kota dan desa, diseluruh pelosok dari setiap Negeri di dunia jang hias ini, pada fihak lain.

Pengikut kedua aliran ini tidak mengenal bangsa, Pengikut aliran reactionair terdapat dalam setiap bangsa, demikian djuga pengikut dari aliran progressief.

Empat tahun lamanja aliran-aliran kedua ini bertentangan dalam soal perdjjuangan bangsa Indonesia mewujudkan tjita² kebangsaannja.

Empat tahun lamanja pengikut² kedua aliran ini, berhadapan satu dengan lain dan mempergunakan segala usaha dan tenaga mereka masing² dalam mempertahankan tuntutan mereka masing². Perdjjuangan ini, sebagaimana kita telah alami, berlangsung dalam lapangan diplomatic, akan tetapi ada djuga tarafnja, dimana perdjjuangan berlangsung dalam lapangan militair. Sehingga bukan sedikit djumlahnja pentjinta kemerdekaan gugur, berpindah dari alam jang fana ini kealam jang baqa, dengan meninggalkan istri, ibu, bapak, anak ataupun ahli famili di dalam keadaan kesedihan.

Dengan Kurnia Allah Jang Mahakuasa, maka pada akhirnja, ternjata, bahwa segala korban jang telah dipersembahkan oleh bangsa Indonesia dalam usahanja mentjapai tjita² jang sutji murni itu, tidaklah sia² belaka. Sebagai hasil pengorbanan djiwa, tenaga dan harta bangsa kita, maka tertjapailah suatu persetudjuan di antara Keradjaan Belanda dengan Indonesia, dengan mana Belanda menjatakan kesediaannja mengembalikan kepada suatu Negara Republik Indonesia Sjarikat jang akan meliputi sebagian terbesar dari kepulauan Indonesia kita ini, kedaulatannja atas pulau-pnlan ini, dengan tidak bersjarat, dan penuh.

Saudara² sekalian.

Media Massa dalam Perjuangan....

Kita pada saat ini berada di tempat ini guna menghadiri upatjara mengenai pelaksanaan pernjjataan kesudian Keradjaan Belanda menjerahkan kedaulatannja atas Tanah Air kita kepada bangsa kita.

Renungkanlah dengan hati jang tenang dan fikiran jang sehat, arti dan makna saat jang bersedjarah ini, dan sesudah saudara² sekalian memenuhi permintaan ini dan kemudian menginsjafi akibat² dari peristiwa ini, maka saja jakin, bahwa perasaan jang akan meliputi seluruh djiwa dan hati sanu-bari saudara² sekalian, adalah perasaan Sjukur jang tidak terhingga ke hadirat Allah jang Maha Kuasa.

Tjita² bangsa Indonesia, mengambil tempat kedudukan di samping Negara² Merdeka di dunia ini, telah tertjapai. Bangsa Indonesia telah mendjadi suatu Bangsa jang merdeka, suatu Bangsa jang dapat mengurus rumah-tangganja sendiri, suatu bangsa jang dapat mengurus segala soal kebangsaan dengan tjara jang dikehendaki sendiri, terlepas dari tekanan sesuatu kekuasaan jang tidak berasal dari kalangan bangsa sendiri.

Sungguh, saudara², bajangan masa jang terletak di hadapan kita, adalah penuh dengan pengharapan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesentosaan, penuh dengan kemakmuran.

Akan tetapi, sekalipun demikian, hendaknja djangan kita lupakan, bahwa di samping kenikmatan jang akan dirasa itu, pun akan ada djuga pengalaman² jang pahit, penderitaan² jang berat. masa jang penuh dengan kesulitan², jang harus dilalui.

Saudara² sekalian,

Maka adalah suatu kenjjataan, bahwa manusia pada umumnja di samping sifat² jang terpujdi, djuga mempunjai sifat² jang semestinja harus didjauhi.

Media Massa dalam Perjuangan....

Bilamana seseorang manusia di dalam segala usahanya mentjapai hasil yang menjenangkan, maka seharusnya ia bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniai ia dengan segala apa yang dikehendakinya. Dan seharusnya ia menjaga dengan lebih teliti dan tjermat, segala gerak-geriknya serta sikapnya, supaya setiap orang tetap menaruh perhatian dan simpati kepadanya.

Akan tetapi sering kejadian sebaliknya. Demikian juga dengan sesuatu bangsa. Bilamana bangsa itu telah memperoleh kemenangan² dalam perjuangannya dan memperoleh hasil² yang gilang-gemilang, maka sering bangsa itu lupa, bahwa segala hasil dari usahanya itu, segala kemenangannya itu adalah kurnia dari Allah Yang Maha Kuasa. Bangsa itu menganggap, bahwa ia berkuasa di seluruh dunia ini dan tidak ada kekuasaan di alam ini yang dapat mengatasi kekuasaannya itu. Perasaan takbur telah mulai bersemi dalam jiwa bangsa itu, Akibatnya adalah keruntuhan.

Sedjarah dunia memberikan kita tjukup bukti² tentang ini.

Oleh karena itu, maka sudah pada tempatnya, bila dilahirkan pengharapan, moga-moga dapatlah hendaknya bangsa Indonesia yang telah dikaruniai Allah kemerdekaan dalam perjuangan kemerdekaannya, menginsjafi hal ini; perasaan yang meluap-luap, pandangan yang menghina dan meletjeh terhadap bangsa lain, segala gerak-gerik dan sikap yang menunjukkan kebentjian dan permusuhan terhadap bangsa² lain, terutama terhadap bangsa yang pada masa yang lampau menjadi tandingannya dalam perjuangan dahsjat yang meminta korban manusia dan harta, dapatlah kiranya didjauhi; segala perasaan dendam dan permusuhan dapatlah kiranya dilenjapkan dari hati sanubari kita. Sikap kesatria, yang dapat memaafkan dan menghargai lawan yang telah menjadi

Media Massa dalam Perjuangan....

kawan, dapatlah hendaknya menjadi pedoman bagi kita dalam masa yang datang.

Segalanya ini menghadjati perubahan yang radikal dalam jiwa bangsa kita, perubahan dalam tjara berfikir, dalam tjara menempatkan sesuatu pada tempatnja, tjara mana dewasa ini seharusnya berlaku menurut aliran suasana dan masa. Saudara² sekalian,

Undang-Dasar Republik Indonesia Sjarikat, bersifat demokratis. Ini berarti, bahwa segala sesuatu yang berlangsung dalam Negara ini, akan berlangsung dalam garis² yang telah ditentukan oleh hukum² yang memang telah diakui oleh dunia demokrasi sebagai hukum dasar. Hukum² dasar ini adalah antara lain kemerdekaan dalam mengeluarkan fikiran, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kemerdekaan berkumpul dan bersidang, kemerdekaan menganut dan mengembangkan sesuatu faham, kemerdekaan beragama, kemerdekaan berpindah agama dan seterusnya. Dengan kata yang pendek, kemerdekaan dalam segala-galanya, kemerdekaan dalam setiap lapangan penghidupan.

Atas kita, setiap Warga Negara terletak suatu kewadajiban yang maha berat, memelihara dan menghormati segala hukum² ini. Kritik yang agak pedas, pernyataan sesuatu faham yang tidak dapat kita setudjui, pengikut sesuatu agama yang bukan agama yang kita anut sendiri, hendaknya djangan sampai menimbulkan perselisihan di antara kita sama kita.

Sebaliknya, harus djuga kita insjafi, bahwa segala hak demokrasi yang dijamin oleh Undang² Dasar Republik Indonesia Sjarikat, bukanlah sekali-kali membuka pintu bagi seseorang mengadakan kritik di luar garis peri kemanusiaan; pernyataan faham yang berlainan dengan faham orang lain, pelaksanaan segala sesuatu yang dikehendaki oleh sesuatu agama, djanganlah berlangsung sedemikian rupa sehingga menjakiti hati segolongan lain dalam masjarakat.

Media Massa dalam Perjuangan....

Kemerdekaan jang dimaksud bukanlah berarti kemerdekaan liar tetapi kemerdekaan teratur jang hanya dapat dilaksanakan dengan tjara² jang tertentu dalam garis² jang ditetapkan oleh Undang², oleh perikemanusiaan, oleh tata-tertib, oleh sopan-santun.

Maka adalah suatu kenjataan, jang tidak dapat disangkal, bahwa sampai saat ini dalam masjarakat kita masih ada djuga timbul peristiwa² jang menundjukkan tafsiran jang salah tentang arti dan makna hak demokrasi ini. Perobahan dalam masa jang sesingkat-singkatnja adalah suatu hal jang sangat dihadjati.

Saudara² sekalian,

Kesimpulan jang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

Bangsa Indonesia pada saat ini, berdiri di hadapan pintu gerbang untuk memasuki suatu zaman jang baru, suatu zaman kedjajaan dan kebesaran. Akan tetapi, dalam menudju ke arah kedjajaan dan kebesaran jang kekal abadi, bangsa Indonesia masih akan harus melakukan perobahan dalam beberapa hal jang mengenai djiwanja untuk dapat mengatasi segala kesulitan² dan rintangan² jang masih akan dihadapinja.

Saudara² sekalian,

Apakah dalam hati saja timbul pertanjaan: Bagaimanakah kiranja masa depan dari bangsa kita? Akan dapatkah rasanja bangsa kita mengatasi segala sesuatu jang akan timbul dalam perkembangan Negara kita ini? Sehingga ia dapat kelak menegakkan dan mempertahankan kebesaran Tanah Airnja? Maka dapatlah saja dengan penuh kepertjajaan dan keinsjafan memberikan djawaban jang memuaskan.

Media Massa dalam Perjuangan....

Bukankah zaman jang lampau, jang dapat diketahui dari perdjalanen sedjarah tanah air kita ini, menundjukkan beberapa masa (periode²), jang membuktikan dengan sedjelas-djelasnja, bahwa bangsa kita bukanlah suatu bangsa jang belum pernah mengenai kemerdekaan? Bangsa kita telah pernah mengenai zaman emas, dimana dengan djajanja tegak berdiri beberapa keradjaan sebagai umpamanja Keradjaan Seri Widjaja, Modjopahit, Mataram, Atjeh dan seterusnya. Bukankah, sewaktu Keradjaan² ini masih berdiri dan menguasai seluruh kepulauan kita ini sampai ke pulau Madagaskar di sebelah Barat, ke Philipina di sebelah Timur, segala lapangan penghidupan dalam masjarakat itu mengalami kemadjuan jang tidak ada tolok bandingannja?

Bukankah sedjarah menjatakan kepada kita, bahwa kapal² Indonesia pada zaman emas itu meraungi setiap lautan samudera jang luas ini, saudagar² bangsa kita didjumpai di seluruh pendjuru dunia ini, kebudajaan kita perguruan kita, pendek kata segala-galanja berdjalan dengan baik dan teratur, dan setiap Warga Negara hidup dalam kebahagiaan dan kesentosaan?

Saudara² sekalian,

Tindjauan kedjurusan zaman jang lampau memberikan kita harapan dan kejakinan, bahwa dengan kurnia Allah Jang Maha Kuasa memang bangsa kita pada saat ini menghadapi/aman gemilang. Marilah kita mengadakan persiapan lahir dan bathin untuk menudju kesuatu zaman dimana setiap anggota bangsa kita dapat hidup sebagai Warga dari suatu Negara jang merdeka dan Berdaulat, di dalam keamanan dan ketenteraman, dalam rukun dan damai, dalam kebahagiaan, kesentosaan dan keadilan.¹¹⁰

¹¹⁰ *Ibid.*, 116--121.

Media Massa dalam Perjuangan....

Sekianlah !

Harian *Semangat Merdeka* pada tahun 1948, juga memuat berita tentang maklumat Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Maklumat tersebut menyerukan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan mengganggu keamanan di masyarakat. Isi maklumat tersebut, sebagai berikut.

MAKLUMAT GM 12 M.

Kepada segenap penduduk di dalam daerah Kemiliteran Atjeh, Langkat dan Karo dipermaklumkan bahwa:

a). Perbuatan djudi, zina dan tjuri adalah perbuatan jang dilarang oleh Undang² Negara, dan berdasar atas keadaan di daerah pada dewasa ini, djuga dianggap sebagai perbuatan jang dapat mengganggu mengatjaukan dan menggontjangkan ketertiban dan keamanan umum, jang akibatnja membawa kelemahan semangat pada perdjoangan — pertahanan tanah air dan amat merugikan pada penghidupan bersama di dalam suatu masjarakat dari Negara jang Merdeka. Pemerintah dengan rasa tanggung djawab jang penuh terhadap ketenteraman, pertahanan dan kebahagiaan seluruh penduduk, bermaksud memberantas perbuatan² itu dengan mengambil tindakan² jang sesuai dengan tudjuan.

Oleh karena itu, berdasar atas kekuasaan jang ditentukan dalam pasal X dari Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 30, dengan ini dinjatakan bahwa:

Barang siapa jang melakukan atau turut berhubungan dengan perbuatan djudi dalam rupa dan

Media Massa dalam Perjuangan....

tjara jang bagaimana sekalipun, jang melakukan perbuatan zina atau tjuri, baik sesudah mendjalankan hukumannja menurut keputusan Hakim, maupun tidak ada keputusan Hakim untuk itu, kita, djika merasa perlu akan mengambil ketetapan untuk memindahkan mereka itu dari tempat tinggal asalnja kepada suatu tempat tinggal lain jang ditentukan, untuk waktu jang tidak tertentu, dimana mereka itu diwadjabkan mengerdjakan sesuatu menurut petundjuk Pemerintah".

Demikianlah supaja dimaklumi dan didjadikan peringatan bagi segenap penduduk.¹¹¹

Kutaradja, 18 September 1948.

Kita Gubernur Militer Daerah Kemiliteran Atjeh, Langkat dan Tanah Karo. Djenderal Majoor TKG. DAOED BEREUEH.

Maklumat-maklumat pemerintah di atas begitu penting diketahui oleh masyarakat sebagai pencerahan bagi kehidupan mereka. Dalam situasi yang belum stabil, masyarakat membutuhkan informasi tentang daerahnya. Demikian pula dengan pemerintah memerlukan saluran informasi untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Di antara sarana yang dapat digunakan untuk penyampaian informasi tersebut adalah media massa, seperti surat kabar. Dengan demikian, media massa begitu besar peranannya dalam menyampaikan informasi perjuangan dan pembangunan daerah.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 122--123.

9) Tokoh Media Massa

Di bawah ini dijelaskan profil tokoh yang begitu berjasa dalam pengembangan media massa di Aceh. Namun, tidak semua mereka dapat dijelaskan profilnya karena belum semua datanya diperoleh. Di antara mereka, sebagai berikut.

(1) Abdullah Arif

Abdullah Arif dilahirkan pada 17 Agustus 1922 di Desa Dayah Tuha, Kemukiman Langga, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. Ayahnya yang bernama Tgk. Muhammad Arif Sufi adalah seorang



Abdullah Arif

pemuka agama di kampungnya dan merupakan keturunan dari Syekh Jalaluddin Lam Gut, seorang ulama Aceh yang mengarang kitab "Tanbihul Ghafilin". Ketika berusia 17 tahun, Tgk. Muhammad Arif Sufi ditahan oleh Belanda dan diasingkan ke Betawi (Jakarta). Setelah empat tahun ditahan oleh Belanda di Betawi, Tgk. Muhammad Arif Sufi diizinkan kembali ke Aceh oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, setelah pamannya Syekh Ibrahim Lam Gut yang menjabat sebagai imam Mesjid Raya Baiturrahman meminta dilepaskan kepada Gubernur Jenderal tersebut.

Sementara ibunya yang bernama Nyak Aminah adalah seorang wanita yang masih keturunan ulama-ulama Tiro yang secara terus-menerus melawan penjajahan Belanda. Tgk. Abdullah Arif adalah putra kedua dari Tgk. Muhammad Arif Sufi dengan Nyak Aminah.

Sebagaimana layaknya putra-putri Aceh lainnya, Abdullah Arif mendapatkan dasar-dasar pengetahuan agama dari ibunya yang juga berprofesi sebagai guru mengaji (*gure seumebut*) di rumahnya pada malam hari. Ketika Abdullah Arif berusia 8 tahun, ia mulai belajar secara formal dan sekolah formal pertama yang ia tempuh adalah

Media Massa dalam Perjuangan....

Inlandsche Volkschool (sekolah dasar rakyat). Dengan ketekunannya, ia berhasil menamatkan pendidikan di sekolah ini dalam tiga tahun. Setelah menamatkan pendidikan, ibunya bermaksud memasukkannya ke *dayah* milik ayahnya di Lam Gut Aceh Besar. Akan tetapi, Abdullah Arif melanjutkan studinya di Perguruan Islam Teungku Abdul Wahab Seulimum Aceh Besar. Sekolah ini adalah sekolah modern dan di antara guru yang mengajar di sekolah ini adalah Ali Hasjmy yang baru kembali dari pendidikannya di Sumatera Barat. Ide-ide dan pemikiran Ali Hasjmy begitu berpengaruh dalam proses pembentukan bakat dan pola pikir Tgk. Abdullah Arif.

Semasa belajar di sekolah ini, Abdullah Arif mulai menunjukkan bakat mengarangnya. Ia mulai menulis karangan dan diterbitkan dalam surat kabar milik Jepang yang bernama *Atjeh Sinbun*. Dengan semangatnya yang tinggi untuk mencari ilmu, selanjutnya ia melanjutkan pendidikan ke Normal Institut yang baru berdiri di Bireuen. Tidak lama kemudian, ia berangkat ke Jakarta dan menjadi mahasiswa pada Universitas Ibnu Khaldun. Tidak lama belajar di sini, ia melanjutkan pendidikannya di IAIN Ar-Raniry dan berhasil meraih gelar Sarjana Muda tahun 1965 pada Jurusan Dakwah. Pada tahun 1967, Abdullah Arif berangkat ke Mesir bersama dengan 17 orang mahasiswa Indonesia lainnya dari IAIN seluruh Indonesia dan ia ditunjuk sebagai pimpinan rombongan.

Berkat ketekunan, kedisiplinan, dan kerja kerasnya, Abdullah Arif bersama dengan enam orang mahasiswa Indonesia lainnya selanjutnya diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat Magister (S2) di Universitas Al-Azhar Kairo. Ia lulus dengan nilai baik sekali dan mendapatkan gelar Master of Arts (MA) dalam bidang studi “dakwah wal Irsyad”. Program S2 ini dapat ia selesaikan dalam waktu relatif singkat, yaitu dua tahun. Menjelang akhir hayatnya, Abdullah Arif sedang menyiapkan disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor dalam bidang yang sama dan dari universitas yang sama. Ia

Media Massa dalam Perjuangan....

menguasai beberapa bahasa asing dengan baik, seperti bahasa Arab, Inggris, Jepang, Belanda, dan Perancis.

Ia mulai menulis dan tulisannya muncul pertama kali di surat kabar *Atjeh Sinbun* adalah ketika usia remaja dan sedang belajar di perguruan Islam Tgk. Abdul wahab Seulimum. Sejak itu, Abdullah Arif terus aktif menulis dan mengasah bakatnya tersebut. Beruntung ia, pada tahun 1942 Abdullah Arif diterima sebagai wartawan koran lokal tersebut dan karirnya dalam bidang kewartawanan terus menanjak naik. Karena ia menguasai bidang kewartawanan tersebut, ia selanjutnya bekerja pada Jawatan Penerangan Aceh di Banda Aceh (waktu itu bernama Kutaraja). Biro Politik Kabinet Menteri Penerangan di Jakarta dan juga pernah memegang jabatan sebagai ahli tata usaha/Sekretariat Kabinet Menteri Penerangan di Jakarta

Sebagai sosok yang pernah mengecap pendidikan di Perguruan Islam Tgk. Abdul Wahab Seulimum, mahasiswa IAIN, dan meraih gelar Master of Arts dari Al-Azhar, pengetahuan agama Tgk. Abdullah Arif tidak diragukan lagi. Sejak muda ia sudah aktif di organisasi Pemuda Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Karena keulamaannya, ia juga masuk dalam jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh pada tahun 1969, ketika kepemimpinan MUI Aceh diketuai oleh Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba. Apabila kita membaca karya sastranya, baik yang berupa pantun maupun hikayat, karyanya tersebut sarat dengan pesan-pesan akhlak.

Sisi yang unik dari keulamaan Abdullah Arif adalah jalur yang ia gunakan dalam mendidik masyarakat tidaklah sama dengan beberapa ulama Aceh lainnya. Dengan kata lain, sebagian besar ulama Aceh lainnya menyebarkan pengetahuan dan mendidik masyarakat dengan cara mendirikan lembaga pendidikan atau dayah. Tidak demikian halnya dengan Abdullah Arif, keulamaannya menonjol dalam menyebarkan pengetahuan dan mendidik masyarakat melalui tulisan-tulisan, berupa buku ilmiah dan dalam bentuk pantun dan hikayat serta dalam bentuk

Media Massa dalam Perjuangan....

artikel lepas di berbagai media terbitan Banda Aceh, Medan, dan Jakarta. Walaupun demikian, kepeduliannya terhadap dunia pendidikan begitu tinggi. Sebagai bukti akan kepeduliannya, ia pernah membangun sebuah Madrasah Ibtidaiyah di kampung halamannya, di Langga. Ia juga aktif tercatat sebagai satu di antara seorang dosen di Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry dan pernah menjabat posisi sebagai pembantu dekan di fakultas ini.

Abdullah Arif kembali ke haribaan Allah pada 6 Januari 1970 dan meninggalkan seorang istri serta tujuh anak. Ia dikebumikan di desa Lam Gut, Aceh Besar. Sebagai seorang tokoh masyarakat, acara pemakamannya dihadiri oleh Muspida Tingkat I, Gubernur Aceh, Muzakir Walad, tokoh-tokoh masyarakat lainnya, mahasiswa, dan masyarakat umum.

(2) Ali Hasjmy

Ali Hasjmy lahir di Montasik, Aceh Besar pada 28 Maret 1914. Ayahnya bernama Teungku Hasjim dan ibunya bernama Nyak Buleun.



Ali Hasjmy

Sebagaimana layaknya putra-putri Aceh lainnya, ia memperdalam ilmu agama di *meunasah* yang ada di kampungnya. Selain itu, pendidikan formal pertama ia dapatkan dari lembaga pendidikan Belanda *Gouvernement Inlandsche School Montasie*. Setamat dari sekolah ini, Ali Hasjmy berangkat ke luar Aceh dan belajar di *Thawalib School* Padang Panjang. Sebagai orang yang haus ilmu pengetahuan, Ali Hasjmy melanjutkan pendidikan ke al-Jamiah al-Islamiyah Padang yang dipimpin oleh Mahmud Yunus. Ia juga pernah masuk kampus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Media Massa dalam Perjuangan....

Sejak muda, jiwa nasionalis dan patriotisnya begitu tinggi. Jiwa ini disalurkan melalui berbagai organisasi pergerakan. Semua itu dimaksudkan sebagai bagian dari upayanya melawan penjajahan. Organisasi yang dimasuki di antaranya Perhimpunan Pemuda Islam Indonesia (HPII) sejak tahun 1932 s.d. 1935. HPII merupakan *onderbow* dari partai politik Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI), suatu partai radikal yang menganut sistem nonkooperasi terhadap Pemerintah Hindia Belanda.

Sekembali dari Padang Panjang pada tahun 1935, Ali Hasjmy bersama beberapa pemuda mendirikan Serikat Pemuda Islam Aceh (SEPIA). Ia kemudian terpilih sebagai sekretaris umum pengurus besar SEPIA. Setelah SEPIA diubah menjadi Pergerakan Angkatan Muda Islam Indonesia (Peramindo), ia menjadi salah seorang pengurus besarnya. Peramindo merupakan suatu gerakan pemuda yang radikal dan giat melakukan gerakan politik menentang penjajahan Belanda.

Setelah terbentuk Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada tahun 1939, Ali Hasjmy menjadi salah satu pengurus pemuda PUSA. Pada awal tahun 1945, bersama sejumlah pemuda lainnya, ia bekerja pada surat kabar berbahasa Indonesia, yaitu *Atjeh Sinbun*, sebagai redaktur. Selain itu, ia juga bekerja pada kantor berita *Domai*. Walaupun ia bekerja pada kedua lembaga tersebut, tetapi secara intens melakukan pergerakan melawan penjajahan. Ali Hasjmy bersama sejumlah pemuda mendirikan suatu gerakan, yaitu Ikatan Pemuda Indonesia (IPI) yang bertujuan mengadakan persiapan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda, jika kembali lagi setelah Jepang menyerah.

Setelah Indonesia merdeka, Ali Hasjmy aktif sebagai pegawai negeri dan menjabat berbagai jabatan. Selain aktif di lingkungan pegawai negeri, ia juga bergerak dalam berbagai bidang kemasyarakatan. Sebagaimana di lingkungan pegawai negeri, atas kemampuan yang dimiliki, ia dipercaya dalam berbagai jabatan yang dijalaninya.

Media Massa dalam Perjuangan....

Di bidang media massa, ia aktif di berbagai surat kabar, seperti Semangat Merdeka pada awal kemerdekaan Indonesia. Menjabat sebagai pimpinan umum Harian Nusa Putra dan staf redaksi Harian Karya Bhakti di Jakarta ((1964-1965).

Salah satu kegemaran yang tidak terlepas dalam diri Ali Hasjmy adalah menulis. Menulis merupakan makanan harian baginya. Hal itu dilakukan sejak Ali Hasjmy berumur 20 tahun. Sudah banyak tulisannya yang diterbitkan oleh berbagai penerbit.

Berbagai jabatan yang dijabatnya bukan hanya suatu jabatan yang tidak mendatangkan kemaslahatan bagi umat. Dengan jabatan itu, Ali Hasjmy berusaha memberikan manfaat bagi orang lain.

Dalam usia 80 tahun, Ali Hasjmy dipanggil oleh Allah untuk selama-lamanya. Ia kembali kepada Allah pada saat umat Islam sedang berada di bulan mulia, 19 Ramadan 1418 H, bertepatan dengan 18 Januari 1998. Selama hayat dikandung badan, Ali Hasjmy terbukti telah mendarmabaktikan seluruh kemampuannya demi keagungan Islam, kebesaran nusa dan bangsa, serta kejayaan masyarakat Aceh.

(3)Amelz (Abdulmanaf El Zamzami)

Lahir di Kutabuloh, Aceh Selatan pada 20 Januari 1921. Ayahnya bernama Nyak Zamzam dan ibunya bernama Hayani. Memulai



Amelz

pendidikan pada sekolah *Inlandsche Vervolkschool* Pante Pirak, Susoh, Aceh Selatan (sekarang Aceh Barat Daya). Di samping itu, ia juga belajar pada Perguruan Islam (Madrasah Islamiyah) yang terdapat di Gapong Rawa, Susoh, yang dipimpin oleh Teungku Munir Byth dan Teungku Haji Umar Taher. Setelah menamatkan pendidikannya di Madrasah tersebut, ia melanjutkan studinya ke

Media Massa dalam Perjuangan....

Perguruan Islam Saadah Abadiyah di Blang Paseh, Sigli, yang diasuh oleh Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba dan Teungku Muhammad Daud Beureu-eh. Setelah beberapa lama belajar di lembaga pendidikan di sana, Amelz melanjutkan lagi studinya ke Perguruan Indonesia Commercial Class dan Union English School di Medan. Selanjutnya, Amelz melanjutkan pendidikan ke Bukittinggi di Perguruan Muslim Bukittinggi. Amelz meninggal pada 23 Februari 1982.

(4) Husin Yusuf

Lahir di Blang Blahdeh dekat Bireuen pada 11 Agustus 1912. Menyelesaikan pendidikan di *Volksonderwijs*, pendidikan guru untuk sekolah dasar berbahasa Indonesia di Lhokseumawe. Mengajar pada



KOLONEL HUSIN YUSUF

Volkschool di berbagai tempat di Aceh Utara selama 1930-1939. Menjadi reporter surat kabar di Medan, seperti *Sinar Deli* dan *Seroean Kita*. Selama pendudukan Jepang, ia bergabung dalam *Tokubetsu Keisatsutai*, kemudian pindah ke *gyugun*. Akhirnya, menjadi letnan satu pada Dinas Intelijen Resimen Fojoka di Bireuen. Ikut serta dalam pembentukan API, kemudian menjadi Kepala Sekretariat TRI di Kutaraja dengan pangkat Mayor. Menjadi panglima TRI pada tahun

1946 dengan pangkat kolonel. Pada tahun 1950 dimutasi ke Kementerian Pertahanan di Jakarta, tetapi ia menolaknya.

(5) Oesman Raliby

Lahir di Sigli pada 23 Mei 1915. Bersekolah di HIS, MULO, dan SLA Taman Siswa. Setelah itu ia ingin melanjutkan pendidikan ke Fakultas Ilmu Politik, Univeritas Berlin. Akan tetapi, orang tuanya menentang keinginannya, mengingat usianya yang masih muda. Ia

Media Massa dalam Perjuangan....

kemudian aktif dalam dunia pergerakan politik sehingga membuatnya sering berurusan dengan pihak keamanan Pemerintah Hindia Belanda. Ia melanjutkan pendidikan ke Universitas Al Azhar, Cairo. Sekembalinya ke Aceh, aktif dalam organisasi PUSA. Pada awal kemerdekaan, ia dilantik sebagai ketua Partai Masyumi Aceh. Kemudian memimpin Departemen Penerangan di Aceh. Kepiawaiannya berpidato menyebabkan Presiden Sukarno tertarik kepadanya dan memintanya pindah ke Yogyakarta untuk memperkuat jajaran Departemen Penerangan. Di tempat itu, ia menjadi teman diskusi Presiden Sukarno dalam masalah-masalah propaganda dan perang urat saraf dengan Belanda. Pernah pula ia ditugasi mengambil alih Radio Belanda untuk dijadikan RRI. Kemudian ia ditarik ke Departemen Dalam Negeri.

(6)T.A. Talsya

Pada tahun 1942, T. Alibasjah (T.A. Talsya) sudah menjadi seorang penulis, di antaranya dalam bentuk sajak dan cerpen. Kariernya selaku sastrawan dan sekaligus wartawan bermula ketika Talsya menjadi redaktur surat kabar Atjeh Sinbun (1942-1945).



Teuku Ali Basyah

Talsya aktif berjuang dalam BPI (Barisan Pemuda Indonesia) yang kemudian berubah menjadi PRI (Pemuda Republik Indonesia). Dalam PRI, ia menjabat sebagai Sekretaris Pertama Dewan Penerangan Markas Daerah Aceh. Selanjutnya, ia menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI.) Divisi X Komandemen Sumatera yang ditugaskan pada Staf Penerangan.

Media Massa dalam Perjuangan....

Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, Talsya diangkat menjadi Kepala Jawatan Penerangan Aceh Besar. Beberapa tahun kemudian dipindahkan ke Jakarta sebagai Kepala Seksi Publikasi pada Kementerian Penerangan Republik Indonesia. Pada tahun 1960, Talsya dikembalikan ke Aceh untuk kemudian diangkat menjadi Kakanwil Deppen atau Kepala Jawatan Penerangan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (1964-1968).

Sebagai wartawan, ia aktif di berbagai media massa, seperti menjadi Redaktur Atjeh Sinbun dan Semangat Merdeka. Selanjutnya, berturut-turut menjadi redaktur majalah *Fragmenta Politica*, *Majalah Dharma*, *Api Pancasila*, dan *Majalah Sinar Darussalam*. Sementara pada surat kabar *Siaran Pagi* (1947), *Warta Mingguan* (1949), *Pembimbing* (1951), *Majalah Kesuma* (1952), *Harian Duta* (1974), Talsya adalah sebagai Pemimpin Redaksi. Di samping itu, ia menjadi pembantu pada beberapa surat kabar dan majalah ibu kota, seperti *Siasat*, *Mimbar Indonesia*, *Star Weekly*, *Merdeka*, *Antara*, dan *Gema*.

(7) Teungku Muhammad Daud Beureu-eh

Dilahirkan pada 15 September 1898 di sebuah kampung bernama "Beureueh", Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie. Ayahnya seorang ulama yang berpengaruh di kampungnya dan mendapat gelar dari masyarakat setempat dengan sebutan "*Imuem* (imam) Beureueh". Teungku Daud Beureueh tumbuh dan besar di lingkungan yang religius. Ia memasuki masa dewasa di bawah bayang-bayang keulamaan ayahnya yang sangat kuat mengilhami langkah hidupnya.

Orang tuanya memberi nama Muhammad Daud. Dari penamaan ini sudah terlihat, sesungguhnya yang diinginkan orang tuanya adalah apabila besar nanti, ia mampu mengganti posisi dirinya sebagai ulama sekaligus mujahid yang siap membela Islam. Karena itu, pada masa-masa usia sekolah, ayahnya tidak memasukkan beliau ke lembaga

Media Massa dalam Perjuangan....



Teungku Muhammad Daud
Beureueh

pendidikan resmi yang dibuat oleh Belanda. Akan tetapi, lebih mempercayakan kepada lembaga pendidikan yang telah lama dibangun ketika masa kerajaan Islam dahulu, semodel *dayah/zawiyah*. Hal yang menjiwai ayahnya adalah semangat anti-Belanda/penjajah yang masih begitu kuat. Apalagi ketika Aceh masih dalam suasana perang, yang gema Hikayat Perang Sabil masih nyaring di telinga masyarakat Aceh.

Setelah dewasa, Muhammad Daud menikah dengan seorang putri bernama Cut Halimah. Dari perkawinan itu mereka dikaruniai tujuh orang anak. Pernikahan dengan istri kedua yang bernama Asma, dikarunia tiga orang anak, sedangkan pernikahan dengan istrinya yang ketiga dikarunia seorang anak.

Kiprahnya dalam dunia pendidikan begitu besar, meskipun untuk mencurahkan ilmunya tidak melalui wadah pendidikan formal, seperti langsung menjadi dosen di suatu perguruan tinggi, tetapi setiap alam pemikirannya dan fatwa yang diucapkannya didengar dan diteladani oleh masyarakat Aceh. Muhammad Daud seorang orator ulung, berceramah dan menyampaikan pidato-pidato ke setiap daerah di Aceh selalu disambut dengan antusias oleh masyarakat.

Arus pencerahan terhadap dunia pendidikan juga disambut baik oleh Muhammad Daud. Ia mengembangkan sistem baru dalam dunia pendidikan, pendidikan juga merupakan wadah bagi organisasi-organisasi pendidikan dan kemasyarakatan. Untuk mengelola madrasah-madrasah dengan sistem pendidikan baru, didirikan pula organisasi, seperti Jamiyah Diniyah, Jamiyah Hasbiyah, Jamiyah Madaniyah, Jamiyah Najdiyah, dan Jamiyah Khairiyah. Semuanya merupakan cikal-bakal dari organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).

Media Massa dalam Perjuangan....

PUSA adalah organisasi yang didirikan atas dasar perlunya suatu wadah para ulama dalam mempersatukan pemikiran terhadap kelangsungan hidup negeri ini. Sebelumnya telah ada di Aceh organisasi ulama, yaitu Syarikat Islam, tetapi kemudian dilarang oleh Pemerintah Hindia Belanda.

PUSA pada awalnya bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan. Kegiatan politiknya sangat terselubung. Pada kongres seluruh ulama yang diadakan di Matang Glumpang Dua pada tahun 1939 didirikan PUSA, sekaligus mengangkat Muhammad Daud sebagai ketua umum. Kemampuan Muhammad Daud yang luar biasa dalam memimpin organisasi, menyebabkan PUSA dalam waktu singkat tumbuh menjadi organisasi besar dan berpengaruh serta berhasil dalam menggerakkan kesadaran dan kekuatan rakyat.

Setelah pecah Perang Asia Timur Raya, PUSA mengambil satu kebijakan politik yang sangat penting, yaitu tidak bekerjasama dengan Belanda dalam menghadapi Jepang. Meskipun itu diserukan oleh pemimpin Indonesia di Jakarta. Namun, kesempatan justru dipergunakan untuk memberontak terhadap kekuasaan Belanda yang sudah goyah. Para pemimpin PUSA dan para pemimpin pemuda PUSA menggorganisir gerakan bawah tanah untuk memimpin pemberontakan. Pada bulan Februari 1942 pecah pemberontakan pertama di Seulimuem, Aceh Besar, yang dipimpin oleh Teungku Haji Hasballah Indrapuri, Teungku Abdulwahab Seulimuem, dan kawan-kawan. Kemudian pemberontakan di Sigli dipimpin oleh Muhammad Daud sendiri. Selanjutnya, di Aceh Barat dipimpin oleh Teuku Sabi Lageun, sehingga akhirnya seluruh ulama Aceh turut memberontak terhadap Belanda.

Pada masa revolusi, Teungku Muhammad Daud Beureu-eh juga terlibat dalam peristiwa Cumbok pada akhir 1945, yaitu peristiwa konflik antara sebagian ulama dengan sebagian *uleebalang*. Kaum ulama memandang sebagai bagian dari revolusi nasional, sebab mereka

Media Massa dalam Perjuangan....

menganggap Peristiwa Cumbok sebagai pertentangan antara unsur-unsur yang pro dan anti republik.

Pada waktu yang hampir bersamaan, Teungku Muhammad Daud Beureu-eh muncul sebagai tokoh utama yang mendirikan Masyumi di Aceh pada tahun 1946. Memulai karirnya sebagai Kepala Kantor Urusan Agama pada akhir 1945. Diangkat oleh Pemerintah Pusat menjadi Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo pada tahun 1947 dengan pangkat Jenderal Mayor Tituler, jabatan itu sampai akhir tahun 1949. Ketika jabatan itu dihapus kemudian ia menjadi Gubernur Aceh. Dia dimutasikan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan diangkat menjadi anggota DPR pada awal tahun 1950, seiring dengan pengurangan status Aceh dari provinsi menjadi keresidenan dalam Provinsi Sumatera Utara.

Merasa tidak puas dengan perkembangan politik setelah kemerdekaan, dia memimpin perlawanan melalui Darul Islam Aceh pada tahun 1953--1962. Setelah peristiwa itu berakhir, ia mengundurkan diri dari politik. Akan tetapi, pengaruh politiknya di Aceh tetap kuat hingga akhir hayatnya pada tahun 1987.

BAB IV

PENUTUP

Perjuangan rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, telah dilakukan dengan sungguh-sungguh, baik dengan harta maupun jiwa sebagai wujud rasa tanggung jawab terhadap agama dan tanah airnya. Oleh karena itu, Presiden Sukarno pada suatu kunjungannya ke Aceh pada tahun 1948, mengatakan bahwa "rakyat Aceh adalah pahlawan. Aceh selalu menjadi contoh perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia dalam masalah semangat dan taktik peperangan harus melihat ke Aceh, serta mencari kekuatan batin ke Aceh dan Aceh tetap menjadi obor penerang perjuangan rakyat Indonesia".

Semangat rakyat Aceh dalam perang melawan penjajahan dipancarkan dari nilai-nilai Islam sebagaimana yang dikobarkan dalam hikayat perang sabil. Nilai perjuangan dalam masyarakat Aceh diukur dengan bobot mati syahid, jika seorang menemui ajalnya karena perjuangan membela agama dan bangsa dari gangguan musuh, ia akan mendapat pahala mati syahid.

Kepercayaan yang diberikan rakyat Indonesia kepada Aceh sebagai modal perjuangan telah dilaksanakan secara konsekuen sehingga telah menempatkan Aceh sebagai benteng perjuangan Republik Indonesia. Tugas dan kepercayaan itu berkat dukungan dari semua lapisan masyarakat, telah berhasil dengan baik menunaikan tugas-tugasnya sebagai warga negara.

Situasi dan keadaan negara yang penuh dengan kemelut perang yang dapat mengancam keselamatan bangsa Indonesia, mengundang perhatian dan partisipasi para ulama seluruh Aceh di bawah pimpinan Teungku Hasan Kruengkale untuk memberikan motivasi religius kepada

Penutup

para pejuang dan rakyat Aceh. Partisipasi para ulama Aceh pada waktu itu diwujudkan dalam bentuk fatwa yang menggugah kesungguhan dan kegigihan para pejuang. Pada 23 Desember 1948, para ulama memfatwakan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan melawan penjajahan adalah kewajiban setiap warga negara Indonesia. Fatwa tersebut menambahkan bahwa barang siapa yang membantu musuh, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, ia dianggap sebagai pengkhianat tanah air dan patut diambil tindakan tegas atas dirinya.

Ditinjau dari kapasitas peranan dan tanggung jawab media massa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, media massa di Aceh begitu layak mendapat tempat dalam peta sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peranannya ketika terjadi Agresi Belanda dan juga ketika pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia begitu menonjol. Pada masa berlangsung Pemerintah Darurat Republik Indonesia, media massa tidak hanya berfungsi sebagai alat penghubung saja, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan, pengumuman, bahkan interuksi-interuksi dari para pemimpin bangsa kepada para pejuang di medan perang.

Agresi Militer Belanda II menyebabkan hampir seluruh wilayah negara Republik Indonesia dikuasai oleh Belanda, kecuali daerah Aceh. Banyak para pejuang dan pemimpin negara yang ditawan oleh Belanda sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan perlawanan. Kenyataan itu diperparah lagi oleh propaganda-propaganda Belanda melalui media massanya kepada dunia luar yang menyatakan bahwa Indonesia sudah dikuasai kembali oleh Belanda.

Pada saat-saat genting seperti itu, tampillah media massa di Aceh sebagai juru penyelamat yang membantah semua berita propaganda Belanda, dan sekaligus memberitahukan bahwa Negara Republik Indonesia masih tetap utuh dengan pusat pemerintahannya di

Penutup

Sumatera Barat. Oleh karena itu, sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia, rakyat Aceh telah turut ambil bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, baik melalui perjuangan fisik maupun melalui media massa.

Sebagaimana definisi media massa, yaitu mencakup seluruh alat komunikasi massa, seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, maupun hasil-hasil penerbitan yang memenuhi syarat untuk disebarluaskan, terbit secara periodik, bersifat umum, dan aktual. Untuk itu, jenis media massa yang begitu berperan pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, di antaranya adalah radio rimba raya dan harian semangat merdeka.

Media massa begitu besar peranannya dalam upaya menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pada masa revolusi kemerdekaan, media massa dapat menjadi sarana penyebarluasan paham kebangsaan dan semangat menentang penjajahan. Oleh karena itu, pembangunan media massa sekarang ini seharusnya diarahkan kepada hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sekaligus berupaya untuk memupuk kesadaran masyarakat terhadap bangsa dan negaranya melalui pemberitaan media massa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Taufik. 1990. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Press.
- Alfian, Teuku Ibrahim. 1982. *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945-1949)*. Banda Aceh: Depdikbud Proyek Pengembangan Permuseuman daerah Istimewa Aceh.
- _____, 1999. *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.
- Ali, Abdullah. 1985. *Sejarah Perjuangan Rakyat Aceh Dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949*. Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Amin, S.M. 1978. *Kenang-Kenangan Dari Masa Lampau*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Anonimus. 1990. *Peranan Radio Rimba Raya dalam Mempertahankan Kemerdekaan*. Banda Aceh: Kanwil Depdikbud.
- Arif, Abdullah. 1951. *Kongres Besar PUSA*. Kutaraja: Seksi Penerangan Panitia Raya Besar PUSA.
- Basry, M. Hasan, *Untuk Apa Kita Merdeka Amanat dan Kursus Politik Bung Karno di Sumatera dalam Masa Perang Kemerdekaan 1945-1949*. Jakarta: Kopkar PIP, tanpa tahun.
- Dua Windu Kodam Iskandar Muda. 1972. Dinas Sejarah Militer Kodam I Iskandar Muda.

Daftar Pustaka

- Ghazali, Zulfikar (peny.). 1995. *Sejarah Lokal: Kumpulan Makalah Diskusi*. Jakarta: Depdikbud.
- Gottschalk, Louis. 1969. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Insider (S.M. Amin). 1950. *Atjeh Sepintas Lalu*. Djakarta: Fa Archapada.
- Kartodirdjo, Sartono, dkk. 1973. *Sejarah Nasional*, jilid V, (Jakarta: Depdikbud.
- _____, 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kuntowijoyo. 1992. *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana/Aditya.
- “Laporan Politik Mengenai Daerah Aceh dan Daerah Takluknya Selama Semester Pertama Tahun 1933”, *Seri Informasi Aceh*, Th. V. No. 4. Alih bahasa Aboe Bakar. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1981.
- Mochtar, Kustiniyati (peny.). 1992. *Memoar Pejuang Republik Indonesia Seputar “Zaman Singapura” 1945-1950*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Modal Revolusi 45* (Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Atjeh. Seksi Penerangan/Dokumentasi Komite Musjawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Atjeh, 1960.
- Muhammad TWH. 1997. *Belanda Gagal Rebut Pangkalan Berandan*. Medan: Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan RI di Medan.
- Nasution, A. H. 1968. *Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta: Seruling Masa.

Daftar Pustaka

- Polim. T.M.A. Panglima. *Memoir (Tjataan) T.M.A. Panglima Polim*. Banda Aceh: Alhambra, tanpa tahun.
- Rusydi, Lathief. 1989. *Dasar-Dasar Rhetorica Komunikasi dan Informasi*. Medan: Firma Rimbow.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1997. *Revolusi di Serambi Mekah*. Jakarta: UI Press.
- Sufi, Rusdi dan Wibowo, Agus Budi. 2004. *Sumbangsih Radio Rimba Raya terhadap Republik*. Banda Aceh: Badan Perpustakaan Nanggroe Aceh Darussalam.
- Sulaiman, Isa. 1997. *Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Talsya, Teuku Ali Basyah. 1960. "Pemancar Radio Revolusi di Atjeh", dalam *Modal Revolusi 45*. Seksi Penerangan/Dokumentasi Komite Musjawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh.
- . 1990. *Batu Karang Di Tengah Lautan (Perjuangan Kemerdekaan di Aceh) 1945-1946*, jilid I,II,III. Banda Aceh: Lembaga Sejarah Aceh.
- Yusuf, Husin. 1967. "Prasaran Tentang Sejarah Perjuangan Pemuda di Daerah Aceh". *Seminar Perjuangan Rakyat Aceh Semenjak tahun 1873-1950*, Medan.
- Zamzami, Amran. 1990. *Jihad Akbar di Medan Area*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Zed, Mestika. *Somewhere in the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*. Dewan Harian Daerah Anggatan '45 Sumatra Barat: Grafiti, tanpa tahun penerbit.

Daftar Pustaka

Surat Kabar

Majalah Dharma No. 8 tanggal 10 Desember 1947.

Majalah Pahlawan No.11 tanggal 5 Januari 1947, No. 3 tanggal 5 Februari 1947 dan No. 10 tanggal 10 Mei 1947.

Majalah DHARMA No. 6 tanggal 10 Oktober 1947 dan No. 8 tanggal 10 Desember 1947.

Majalah Santunan No. 93 tahun 1984 dan No. 94 tahun 1984.

Sinar Darussalam, No. 15. Juli 1969

Sinar Darussalam, No. 32 Maret 1971.

Sinar Darussalam, Banda Aceh, 1986.

Majalah Pahlawan No.11 tanggal 5 Januari 1947, No. 3 tanggal 5 Februari 1947 dan No. 10 tanggal 10 Mei 1947.

Majalah Pahlawan No. 2 tanggal 17 Januari 1947, No. 5 Maret 1947, No. 6 tanggal 17 Maret 1947, No. 7 tanggal 5 April 1947, No. 8 tanggal 17 April 1947, No. 9 tanggal 5 Mei 1947 dan No. 10 tanggal 17 Mei 1947.

Atjeh Sinbun, 25 Hatigatu 2605

Harian Serambi Indonesia, 19 Desember 1995.

Harian Semangat Merdeka, 6 November 1945.

Harian Semangat Merdeka, 17 November 1945.

Harian Semangat Merdeka, 29 November 1945.

Harian Semangat Merdeka, 18 dan 27 Oktober dan 6, 8, 10 dan 20 November 1945.

Harian Semangat Merdeka, 1946.

Harian Semangat Merdeka, 20 dan 27 November 1945.

Harian Semangat Merdeka, 25 Juni 1946.

Harian Semangat Merdeka, 17 dan 18 Januari 1946 dan

Harian Semangat Merdeka, 8 November 1945.

Harian Semangat Merdeka, 26 Desember 1945, 6 Mei 1946.

Suluh Merdeka, 8 Februari 1946.

Suluh Merdeka, 6 September dan 9 Oktober 1946.

Suluh Merdeka, 25 Oktober, dan 15, 16, 17 November 1946.

Harian Waspada, Medan, 8, 17, 23 dan 30 September 1949 dan 25, 27 Oktober dan 16 Desember 1949.